Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2024

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2024 ini kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan baik. BPPK terus berupaya melanjutkan transformasi pengelolaan pendidikan dan pelatihan demi mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization* yang didukung oleh manajemen pengetahuan yang andal.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja BPPK dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan selama tahun 2024. Laporan Kinerja memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja dan realisasi anggaran BPPK di sepanjang tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini sepatutnya tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal tetapi juga memberikan gambaran mengenai progres yang sudah dicapai BPPK dalam merespons perubahan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Kami percaya dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, BPPK mampu bermanfaat bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah (KLID) lainnya, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan negara yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik

Andin Hadiyanto

Ringkasan Eksekutif

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur pencapaian dan kualitas kinerja Tahun 2024, BPPK telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Tahun 2024 dari 23 (dua puluh tiga) IKU yang dimiliki BPPK, seluruh IKU memiliki realisasi melebihi target yang ditetapkan di awal tahun (capaian berstatus hijau). Berikut rincian dari 23 IKU tersebut.

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target
1	Tingkat implementasi *learning organization*	108,52%	100,00%
2	Indeks integritas organisasi	110,25	100,00
3	Tingkat kepuasan *stakeholders* dan pengguna layanan	115,83%	100,00%
4	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	104,72%	90,00%
5	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366,40	365,00
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	95,36%	91,00%
7	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	116,27%	85,00%
8	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,78	4,35
9	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	114,83	100,00
10	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	110,35%	90,00%

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target
11	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4,50	4,00
12	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	117,60	100,00
13	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	103,33	100,00
14	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	118,67%	100,00%
15	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	118,92%	100,00%
16	Nilai evaluasi organisasi	104,48	100,00
17	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	120,00%	100,00%
18	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics	100,00%	94,00%
19	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	117,16	100,00
20	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	90,06	84,10
21	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	120,00	100,00
22	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	110,00	100,00
23	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	95,19	82,00

Capaian kinerja dari keseluruhan IKU tersebut menyumbang Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK sebesar 111,48. NKO tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan NKO BPPK Tahun 2023 sebesar **112,00**. Penurunan NKO ini disebabkab karena target IKU BPPK 2024 dirancang menantang untuk memperoleh nilai K3 yang berkualitas. Meskipun realisasi IKU meningkat, karena target yang ditetapkan juga meningkat maka capaiannya menurun. Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan *trajectory target* secara triwulanan.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan pencapaian kinerja periode tahun 2024, BPPK memiliki total pagu anggaran sebesar Rp728.761.335.000,00. Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan sampai dengan berakhirnya tahun 2024 adalah sebesar Rp710.468.086.787,00 (**97,49%** dari total pagu anggaran). Rincian realisasi anggaran menurut kegiatan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Legislasi dan Litigasi	21.488.000	9.653.316	44,92%
Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	287.498.296.000	283.131.598.821	98,48%
Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN)	150.197.687.000	149.014.351.772	99,21%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1.043.056.000	962.350.415	92,26%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	545.934.000	438.271.184	80,28%
Pengelolaan Organisasi dan SDM	242.111.587.000	230.341.411.210	95,14%
Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	46.503.082.000	45.921.366.811	98,75%
Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	190.558.000	128.437.045	67,40%
Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	88.205.000	60.115.471	68,15%
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	561.442.000	460.530.742	82,03%
Total	728.761.335.000	710.468.086.787	97,49%

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel viii
Bab I 2
A. Latar Belakang 2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
C. Peran Strategis 9
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 10
E. Sistematika Laporan 13
Bab II 16
A. Rencana Strategis 16
1. Visi dan Misi 16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis 17
3. Arah Kebijakan dan Strategi 17
4. Matriks Target Kinerja 20
5. Restrukturisasi Program dan Kegiatan 24
B. Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran 25
C. Penetapan Perjanjian Kinerja 2024 29
1. Peta Strategi 29
2. Indikator Kinerja Utama 30
3. Manajemen Risiko 34
4. Inisiatif Strategi 39
D. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 40
Bab III 48
A. Capaian Kinerja Organisasi 48
B. Realisasi Anggaran 213
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 221

D. Kinerja Lain-Lain 227
E. Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2023 267
Bab IV 272

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 : Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020 – 2024 20

Tabel 2. 2 : Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2024 26

Tabel 2. 3 : Pagu Anggaran BPPK Periode Tahun 2024 28

Tabel 2. 4 : Daftar IKU Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2024 31

Tabel 2. 5 : Perubahan Trajectory IKU 33

Tabel 2. 6 : Daftar Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2024 35

Tabel 2. 7 : Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK 39

Tabel 2. 8: Perjanjian Kinerja BPPK Tahun 2025 41

Tabel 3. 1 : Capaian Kinerja tiap Perspektif 48

Tabel 3. 2 : Target, Realisasi dan Capaian IKU BPPK Tahun 2024 49

Tabel 3. 3 : SS SDM Keuangan Negara yang Kompeten 52

Tabel 3. 4 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi LO 59

Tabel 3. 5 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi 67

Tabel 3. 6 : Perbandingan Indikator indeks Integritas 68

Tabel 3. 7 : Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) 76

Tabel 3. 8 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase alumni yang meningkat kinerjanya 85

Tabel 3. 9 : SS Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak 87

Tabel 3. 10 : Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Vokasi 90

Tabel 3. 11 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Perilaku Kerjanya 105

Tabel 3. 12: SS Perencanaan Pembelajaran yang Sesuai Kebutuhan 107

Tabel 3. 13 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran 111

Tabel 3. 14: SS Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi 115

Tabel 3. 15 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi 117

Tabel 3. 16 : SS Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak 119

Tabel 3. 17 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN 125

Tabel 3. 18 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan 132

Tabel 3. 19 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni 138

Tabel 3. 20 : SS Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Reliabel 140

Tabel 3. 21 : Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi 146

Tabel 3. 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Akreditasi Program Pelatihan Bidang Keuangan Negara 147

Tabel 3. 23 : SS Manajemen Pengetahuan yang Matang 149

Tabel 3. 24 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Ketepatan Waktu Penyelesaian Infrastruktur Knowledge Management 151

Tabel 3. 25 : SS Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel 154

Tabel 3. 26 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran 159

Tabel 3. 27 : SS Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel 161

Tabel 3. 28 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM 164

Tabel 3. 29 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi 172

Tabel 3. 30 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat penyelesaian Proyek Strategis TIK 176

Tabel 3. 31 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK Dan Data Analytics 178

Tabel 3. 32 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel 184

Tabel 3. 33 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 189

Tabel 3. 34 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan 195

Tabel 3. 35 : SS Komunikasi Publik yang Efektif 198

Tabel 3. 36 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 199

Tabel 3. 37 : SS Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif 203

Tabel 3. 38 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP 207

Tabel 3. 39 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI 212

Tabel 3. 40 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2024 Menurut Jenis Belanja 214

Tabel 3. 41 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2024 Menurut Jenis Kegiatan 215
Tabel 3. 42 : Realisasi Output BPPK Tahun 2024 216
Tabel 3. 43 : Realisasi Program Unggulan BPPK Tahun 2024 231
Tabel 3. 44 : Realisasi Jamlator Kementerian Keuangan Tahun 2024 233
Tabel 3. 45 : Realisasi Jamlator Non Kementerian Keuangan Tahun 2024 233
Tabel 3. 46 : Kegiatan PUG di BPPK Sepanjang Tahun 2024 235
Tabel 3. 47 : Daftar Benchmarking ke BPPK Tahun 2024 261

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 : Struktur Organisasi BPPK 4

Gambar 2. 1 : Peta Strategi BPPK Tahun 2024 30

Gambar 3. 1 : Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK 49

Gambar 3.2 : Dokumentasi Pelaksanaan Program Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BPPK 252

Gambar 3. 3 : Dokumentasi Pemberian Penghargaan pada Ajang Top Digital Awards 2024 253

Gambar 3. 4 : Dokumentasi Trophy Top Digital Awards 2024 254

Gambar 3. 5 : Dokumentasi Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif 254

Gambar 3. 6 : Dokumentasi Penghargaan PTP Connect 255

Gambar 3. 7 : Dokumentasi Penerimaan Predikat WBBM 256

Gambar 3. 8 : Dokumentasi Penghargaan Mitra Strategis KPK 256

Gambar 3. 9 : Dokumentasi Penghargaan ACCA Indonesia 257

Gambar 3. 10 : Dokumentasi Penghargaan Terbaik I Banten SDGS Awards Kategori Perguruan Tinggi/Mahasiswa 258

Gambar 3. 11 : Dokumentasi Akreditasi dari LAN RI 258

Gambar 3. 12 : Dokumentasi Penghargaan PPID Tingkat II PKN STAN Kategori Informatif 259

Gambar 3. 13 : Dokumentasi Penghargaan Duta Transformasi Terbaik Tahun 2024 260

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum, penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Periode Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Periode Tahun 2024 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPK pada periode yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPPK menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut.

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
d. pelaksanaan administrasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK terdiri atas Sekretariat Badan, enam Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Politenik Keuangan Negara STAN. Keenam Pusdiklat tersebut adalah Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum.

Untuk penyelenggaraan pembelajaran di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri atas sebelas Balai Diklat Keuangan (BDK) dan satu Balai Diklat Kepemimpinan. Kesebelas BDK tersebut antara lain BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

Struktur organisasi BPPK tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BPPK

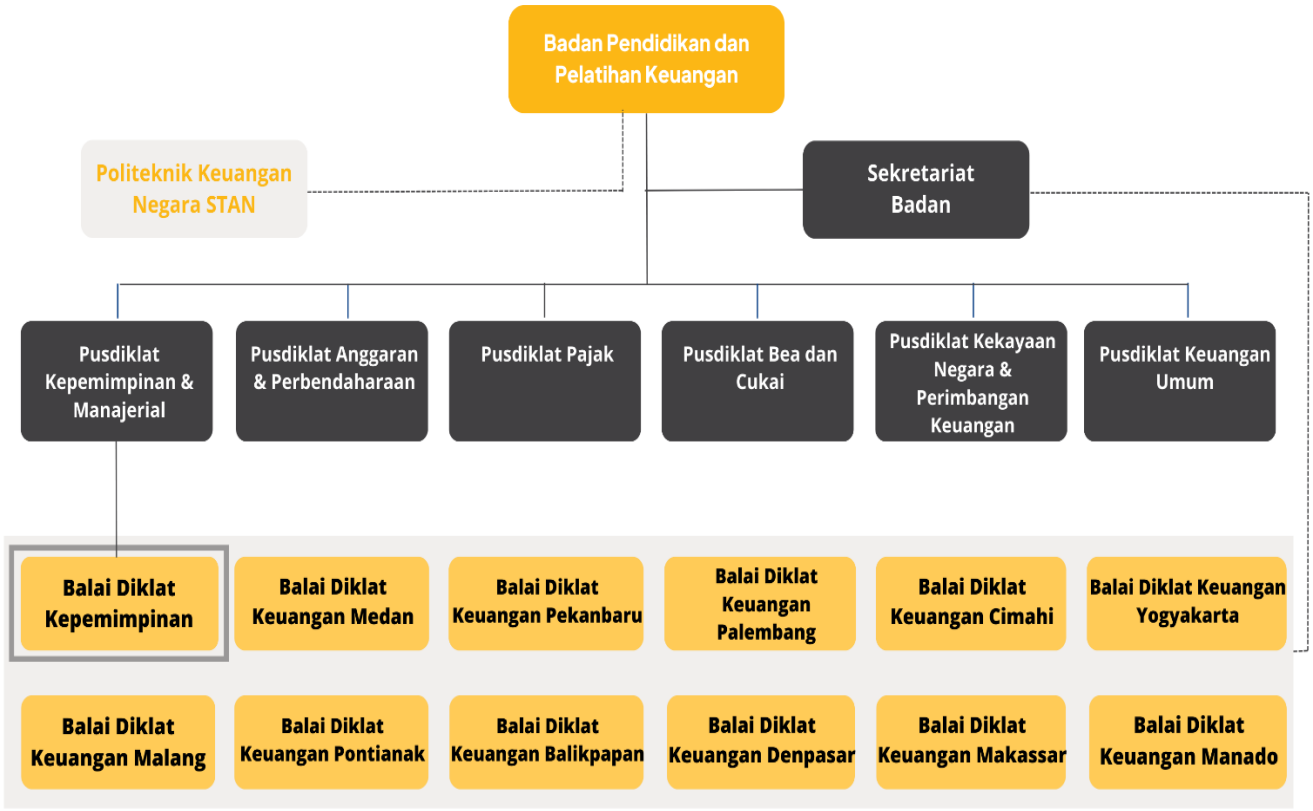

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, pada tanggal 5 November 2024 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Peraturan ini dirancang dengan mempertimbangkan tantangan dan dinamika dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks di tengah perkembangan global dan domestik. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, juga berdampak bagi BPPK. Perubahan yang dialami oleh BPPK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, adalah adanya perubahan susunan organisasi, penajaman tugas dan fungsi, penyesuaian struktur pusat dengan merujuk unit eselon II dan perubahan nomenklatur beberapa unit.

Dari sisi penajaman tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, BPPK tidak hanya bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara tetapi juga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan manajemen pengetahuan. Fungsi yang diselenggarakan oleh BPPK juga mengalami perubahan. Terdapat dua fungsi baru yang

diselenggarakan oleh BPPK, yaitu pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan jabatan fungsional.

Perubahan lain yang diakibatkan oleh penetapan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 adalah perubahan struktur organisasi di BPPK. Perubahan struktur ini tidak hanya terdapat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan namun juga di Sekretariat Badan. Apabila sebelumnya BPPK terdiri dari enam Pusdiklat yaitu Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum maka dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 maka keenam Pusdiklat yang dimiiki oleh BPPK berubah menjadi 5 Pusdiklat dan 1 Pusat Pembinaan, yaitu Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Keuangan Publik dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

Peraturan Presiden terbaru ini juga mengakibatkan adanya penambahan dua unit eselon I di Kementerian Keuangan dimana salah satunya adalah Badan Teknologi Digital, dan Informasi Intelijen Keuangan (BATIIK) yang akan menjadi sentral unit IT di Kementerian Keuangan. Sentralisasi IT ini akan memberikan dampak pada dua unit eselon IV BPPK, yaitu Subbagian Sistem Informasi dan Subbagian Dukungan Teknis, Bagian TIKMP, Sekretariat Badan. Selain itu penambahan unit eselon I di Kementerian Keuangan ini juga membuat adanya penambahan bidang tugas (mitra kerja) pada Pusdiklat yang ada di BPPK.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPPK didukung oleh 1.235 pegawai, dimana 1.168 nya merupakan pegawai aktif, 51 pegawai tugas belajar, 3 pegawai tugas belajar *blended learning* dan 13 pegawai *secondment* (per 31 Desember 2024).

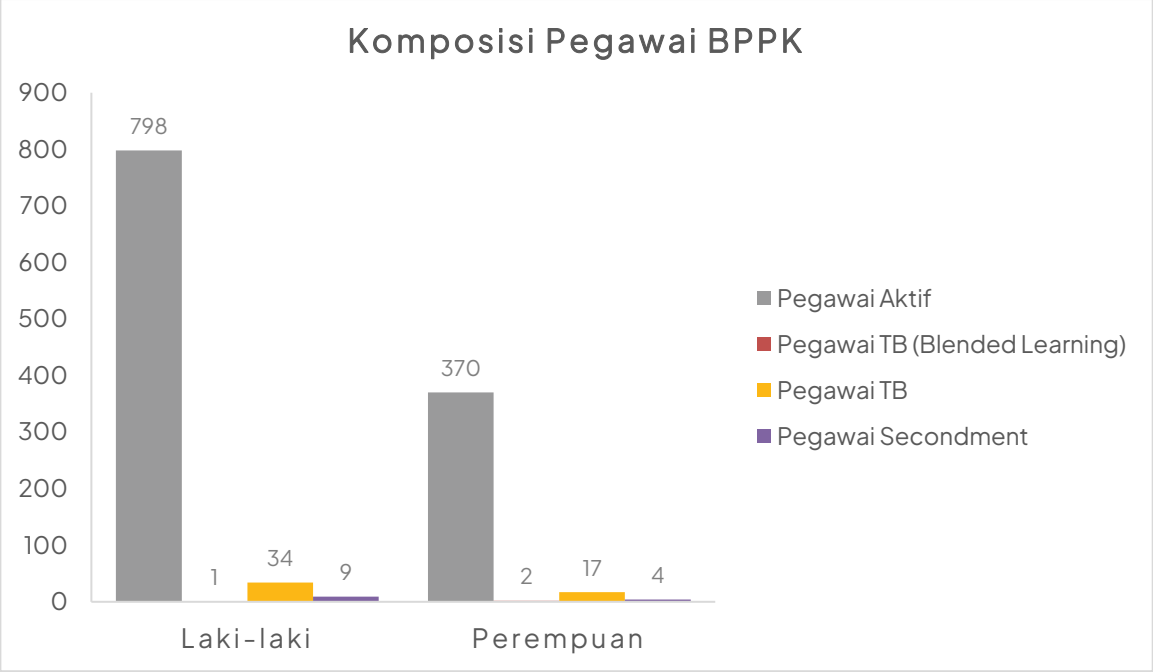

Adapun Sebaran profil pegawai pada BPPK berdasarkan jenis kelamin, usia, pangkat golongan dan jabatan adalah sebagai berikut.

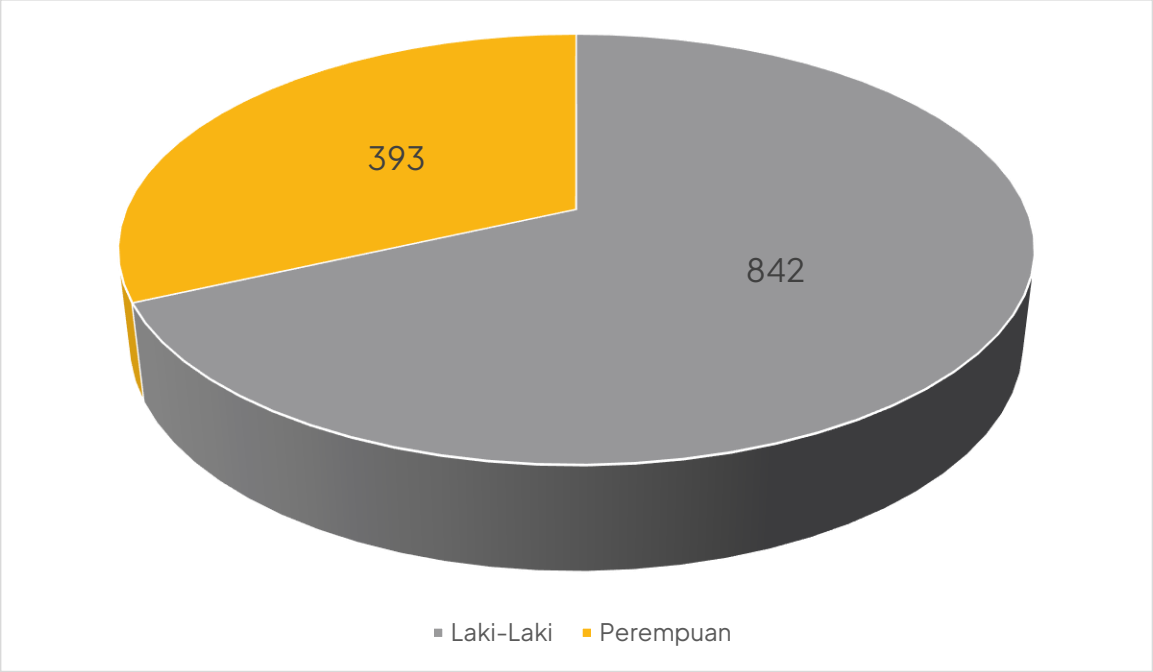

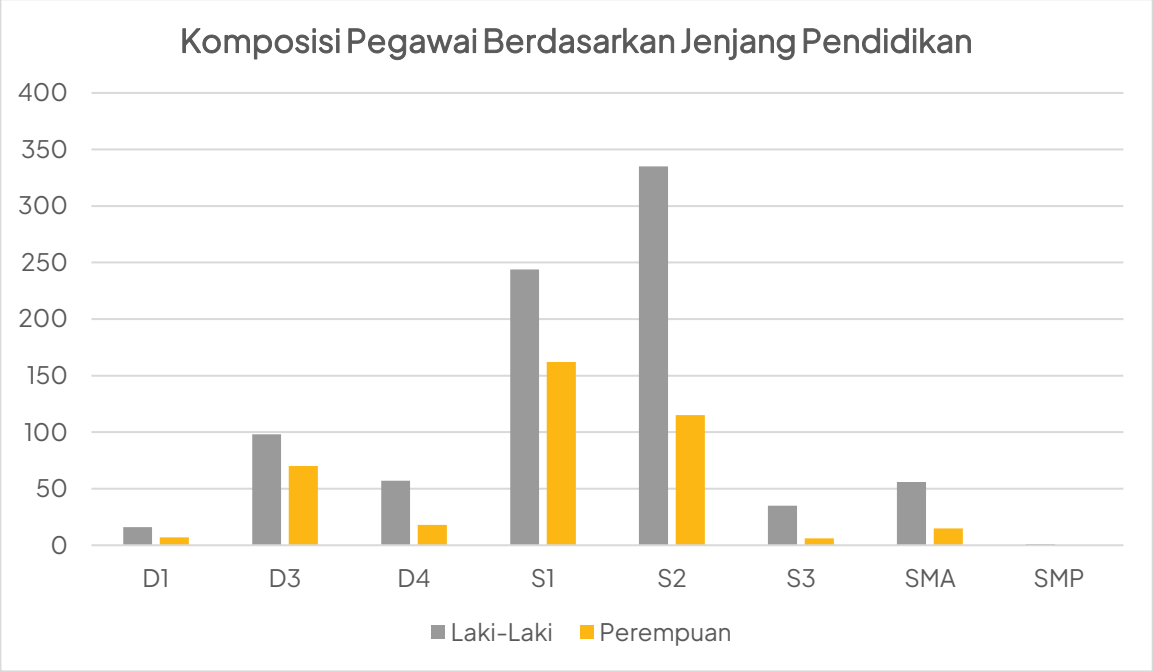
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
400
350
300
250
200
150
100
50
0
D1
D3
D4
S1
S2
S3
SMA
SMP
Laki-Laki
Perempuan

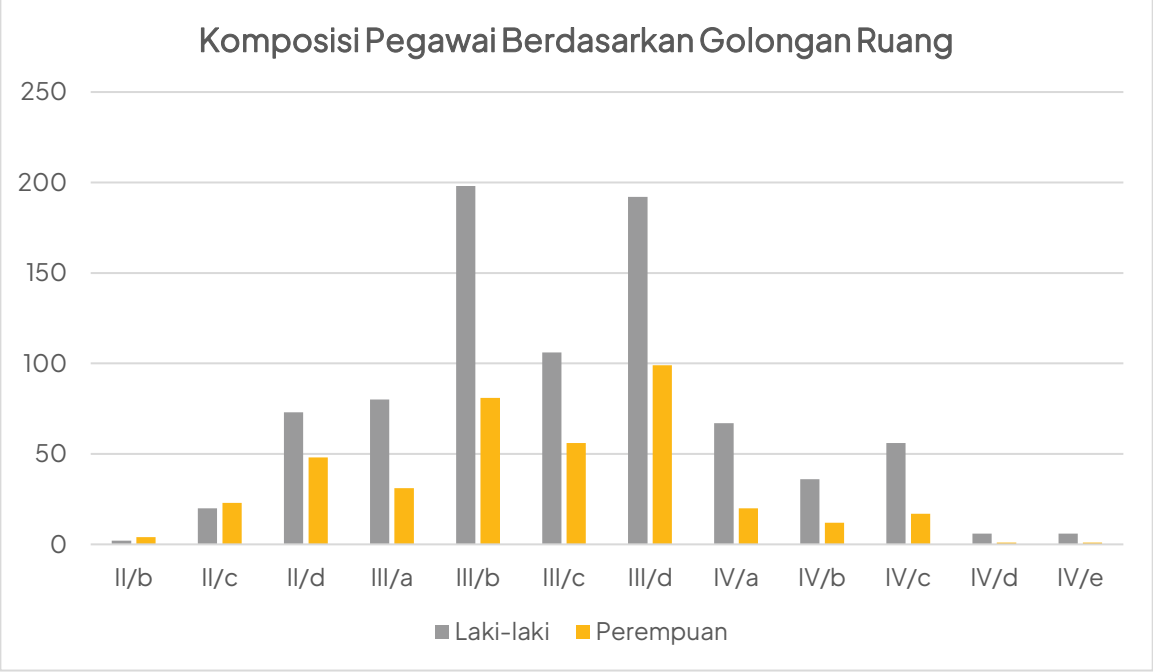
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
250
200
150
100
50
0
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
Laki-laki
Perempuan

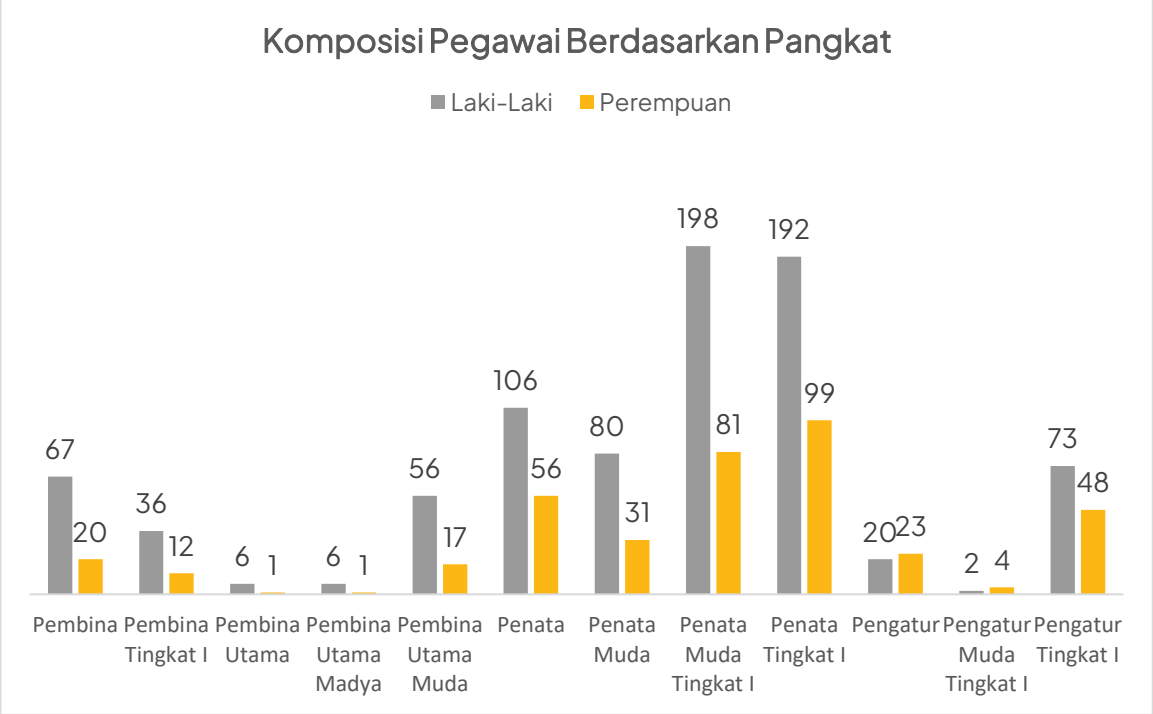

Melihat dari usia, pegawai di BPPK didominasi oleh pegawai berusia 30-39 tahun dengan jumlah 562 orang. Adapun untuk pegawai berusia 40-49 tahun terdapat 274 orang, diikuti oleh pegawai berusia 50-59 tahun dengan jumlah 269 orang sedangkan pegawai dengan usia 20-29 tahun terdapat 122 orang. Kelompok usia dengan jumlah paling sedikit adalah pegawai dengan usia diatas 60 tahun sebanyak 8 orang.

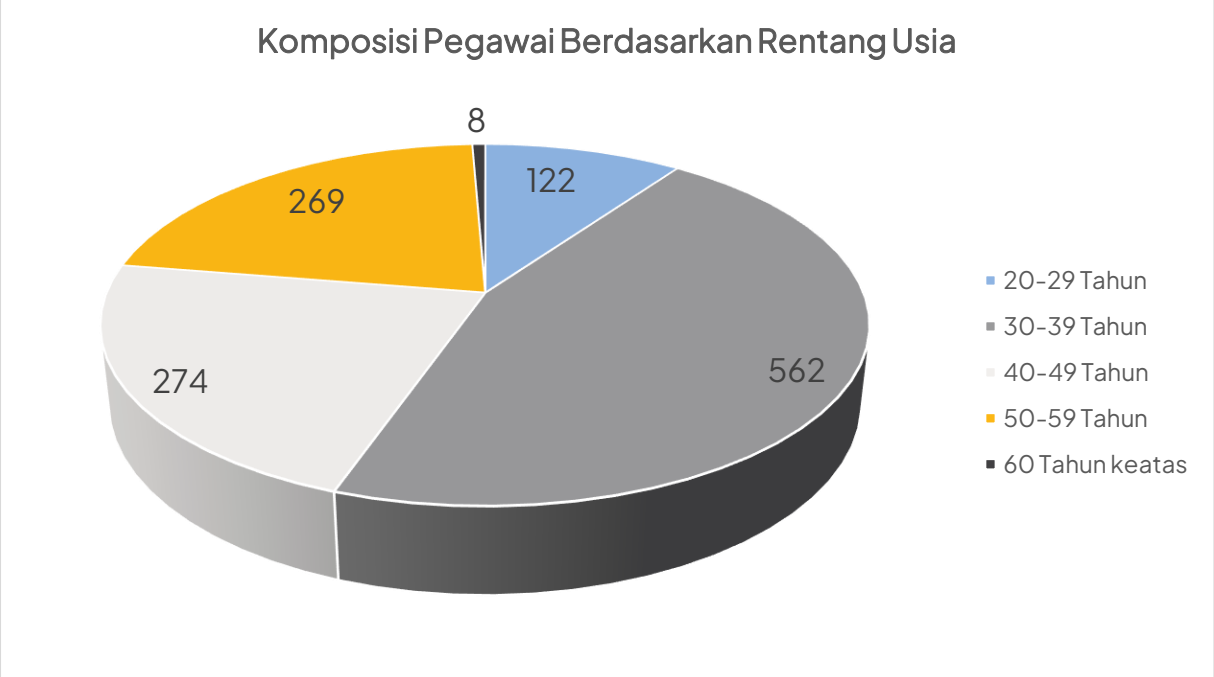

C. Peran Strategis

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara. Peranan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, akuntabel, dan andal. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas tersebut dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang *link and match* dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan *link and match* antara pengembangan kompetensi SDM dengan tujuan strategi organisasi, Kementerian Keuangan sejak tahun 2016 telah menerapkan strategi *corporate university*. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat strategis, jabatan, individual, maupun kebutuhan yang sifatnya insidental maka Kementerian Keuangan melakukan pendekatan yang sifatnya proaktif dan tidak lagi reaktif melalui mekanisme pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP).

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University*, BPPK memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi SDM dan menyusun kebijakan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Adapun dalam menjalankan peran tersebut, BPPK dihadapkan pada berbagai tantangan baik yang berasal dari internal atauapun eksternal. Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi BPPK.

1. Pelatihan
    a. Kemenkeu *Corporate University* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kemenkeu.
    b. Minimnya kontrol atas kesesuaian pengiriman peserta dengan pembelajaran.
    c. Belum terintegrasinya pembelajaran dengan *career path.*
    d. Pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya dikonsolidasikan melalui BPPK. Masih ada Unit Eselon I yang menyelenggarakan pelatihan secara mandiri tanpa koordinasi dengan BPPK.
    e. Belum optimalnya penjaminan mutu pembelajaran.
2. Manajemen Pengetahuan

a. Manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan belum sinergi dan efektif.
b. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal sebagai solusi penyelesaian pekerjaan.
c. Budaya belajar dan berbagi pengetahuan masih relatif rendah.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, telah ditetapkan 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017, 28 (dua puluh delapan) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak 2019, dan 7 (tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pendukung dan 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan penyesuaian arah Inisiatif Strategis, perlu ditetapkan kembali ketentuan mengenai implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2024 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang terdiri atas:

1. 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu yang mulai diimplementasikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
2. 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017; dan
3. 7 (tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pendukung dan 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.

Implementasi atas 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kemenkeu dan Unit Organisasi Non Eselon yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dari 28 IS RBTK tersebut, BPPK terlibat pada 2 (dua) IS, yaitu:

1. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui bagi *Learning Path* Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan SDM Pengelola Keuangan Negara yang semakin terstruktur dan efektif melalui penyusunan *learning path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Terobosan yang akan dilakukan adalah menyusun pola pengembangan SDM yang terstruktur dan efektif berbasis peran bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

Latar belakang ditetapkannya IS ini adalah sebagai berikut.

a. Perlunya pola pengembangan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara yang *link and match* dengan *career path*;
b. Telah ditetapkan PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
c. Belum tersedia *learning path* sebagai salah satu acuan dalam menghasilkan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang lebih akurat, khususnya untuk pengembangan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
d. Perlu adanya *learning path* dalam mendukung terwujudnya SDM yang *engage* dan berkinerja tinggi, terutama untuk Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
e. Penguatan peran BPPK ke depan terkait dengan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2024, *output* yang dicapai adalah telah tersedia Dokumen *Learning Path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, antara lain: *Learning Path* Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Pengawas Keuangan Negara, Penilai dan Pelelang dan pola pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara berbasis peran dan pola pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara berbasis peran.

2. *Data Analytics*: Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) pada *Platform Knowledge Management System* Kementerian Keuangan

Tujuan IS ini adalah Peningkatan *learning experience* pada p*latform knowledge management system* Kementerian Keuangan dengan pemanfaatan *artificial intelligence*. Terobosan yang akan dilakukan adalah menyediakan fitur AI pada KMS Kemenkeu, untuk memudahkan dan mempercepat pengguna dalam memahami pengetahuan yang ada dan memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap suatu tema, sekaligus mengarahkan aset intelektual yang tepat.

Latar belakang ditetapkannya IS ini adalah sebagai berikut.

a. Telah dilaksanakan pengembangan aplikasi *Knowledge Management System* (KMS) di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. Pergeseran budaya belajar menjadi *digital learning;*
c. Pemanfaatan aset intelektual di KMS yang belum optimal; dan
d. Antisipasi kebutuhan budaya belajar di masa depan yang semakin interaktif.

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, *Output* dari implementasi IS AI KMS yaitu tersedianya fitur AI pada *platform Knowledge Management System* yang interaktif khususnya dengan tema pengetahuan perpajakan. *Output* tersebut berupa "KMS *Chat*" dengan menggunakan data referensi sumber pengetahuan dari aset intelektual/ dokumen pengetahuan yang ada pada KMS Kementerian Keuangan. Pada tahap awal pengembangan, sumber referensi jawaban yang digunakan merupakan aset intelektual/ dokumen pengetahuan khusus dengan tema perpajakan sebagai *pilot project*. Adapun beberapa fitur yang ada pada KMS *Chat* adalah sebagai berikut:

a. Fitur *chat* digunakan untuk menyampaikan permintaan/pertanyaan. Fitur *chat* ini menggunakan algoritma *Retrieval Augmented Generation* (RAG) yaitu teknik untuk meningkatkan akurasi dan keandalan model AI generatif dengan menggabungkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dalam satu konteks.
b. Riwayat *chat* ditampilkan di sebelah kiri untuk melihat pertanyaan dan jawaban sampai dengan 30 hari sebelumnya.
c. Menambah konteks pertanyaan digunakan untuk memulai pertanyaan baru dengan konteks/tema yang berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
d. Fitur *copy* untuk menyalin hasil jawaban AI KMS ke media lain.
e. Fitur *feedback* untuk memberikan respon/umpan balik atas jawaban dari AI KMS.

f. Setiap jawaban yang tersedia aset intelektual di KMS, AI KMS menyertakan sumber referensinya dengan menyebutkan judul dan halaman. Pengguna dapat langsung mengunjungi sumber jawaban dengan klik nomor halaman/menit.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPPK; peran strategis, program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan; dan sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi rencana strategis BPPK; rencana kerja BPPK tahun 2024; penetapan perjanjian kinerja dan risiko Tahun 2024: dan penyusunan kinerja Tahun 2025

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja BPPK sepanjang tahun 2024; realisasi anggaran BPPK tahun 2024; realisasi capaian *output* BPPK tahun 2024; dan kinerja lain-lain;

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPPK sepanjang tahun 2024.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.

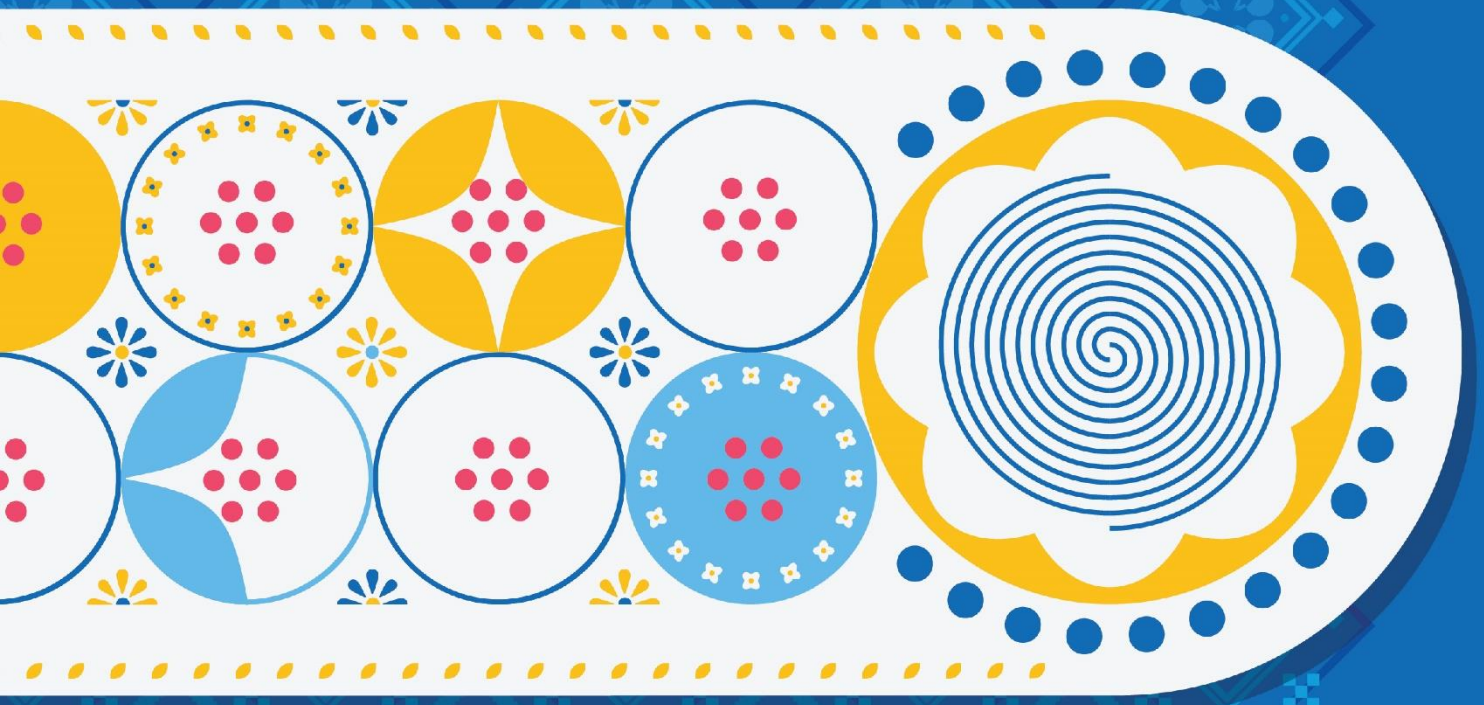

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, setiap organisasi Unit Eselon I, Unit organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan Unit Organisasi Eselon II yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, maka disusunlah Renstra BPPK Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024. Adapun di dalam Renstra tersebut terdapat visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta target kinerja BPPK selama periode 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2020 – 2024, visi BPPK adalah **Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".** Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan juga Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, BPPK juga memperbarui misinya selama periode 2020 – 2024 agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan kebih baik. Dalam mewujudkan visinya tersebut, BPPK mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 5 "Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengeolaan sumber daya

manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi". Adapun misi BPPK adalah sebagai berikut:

a. Mengelola Pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University;*
b. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University;*
c. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes;*
d. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University;* dan
e. Mengembangkan sistem tata Kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, BPPK menetapkan Tujuan BPPK Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 nomor 5, yaitu "Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien".

Sasaran strategis Kementerian Keuangan dalam tujuan tersebut yang didukung oleh BPPK adalah "Organisasi dan SDM yang optimal". Adapun indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah:

a. Tingkat implementasi *learning organization*;
b. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya;
c. Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik; dan
d. Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (*Competency Gap Index/CGI*)

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai Unit Eselon I yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan, BPPK berupaya mendukung tercapainya Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien dengan menjalankan misi kelima Kementerian Keuangan "Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai

kemajuan teknologi". Upaya tersebut diwujudkan melalui tujuh arah kebijakan dan delapan belas strategi yang akan BPPK implementasikan pada tahun 2020 – 2024.

Arah Kebijakan 1:

Penyelenggaraan Pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

a. Penguatan kurikulum Pendidikan terapan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*link and match*) dan berbasis nilai (*value-based education*).
b. Penguatan peran PKN STAN melalui Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.

Arah kebijakan 2:

Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal.

Strategi untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut.

a. Penyelerasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan manajemen *talent*; dan
b. Pengembangan program beasiswa afirmasi untuk pegawai yang berasal dari Indonesia Timur (Papua).

Arah kebijakan 3:

Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAIA (*Relevant, Applicable, Impactful, dan Accessible*) dan bermuatan etika dengan fokus pada tercapainya tujuan strategis Kemenkeu;
b. Optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara;
c. Optimalisasi pengelolaan pelatihan/pembelajaran bagi SDM keuangan negara pada KLID; dan
d. Implementasi sistem penjaminan kualitas pembelajaran.

Arah kebijakan 4:

Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Harmonisasi kebijakan pembinaan kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
b. Penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan.

Arah kebijakan 5:

Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan kerangka manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan negara; dan
b. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi sistem manajemen pengetahuan.

Arah kebiijakan 6:

Organisasi dan SDM yang agile dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Penataan organisasi dan pengembangan proses bisnis berbasis digital dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corpu;*
b. Pengembangan pola kerja dan pola pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi;
c. Penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi terbaik; dan
d. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang efektif dan efisien.

Arah kebiijakan 7:

Pemutakhiran sarana prasarana berwawasanlingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajran yang efektif dan efisien

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan infrastruktur dan oenguatan implementasi *g78* berbasis keunggulan komparatif; dan
b. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.

4. Matriks Target Kinerja

Dalam memastikan ketercapaian setiap sasaran strategis dan program yang telah dirumuskan, BPPK merumuskan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang merupakan matriks terukur sebagai panduan dan komitmen kinerjanya. Adapun indikator kinerja berikut target kinerja tertuang dalam **Tabel 2.1** berikut.

Tabel 2. 1 : Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase lulusan Pendidikan dengan predikat minimal baik	90%	93%	93%	93%	93%	PKN STAN
2	Indeks Kualitas Penelitian	90	148	193	238	283	PKN STAN
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	75%	80%	82%	85%	Pusdiklat KM
4	Tingkat Implementasi *Learning Organization**	75%	77%	80%	82%	85%	Setban, Seluruh Pusdiklat, dan PKN STAN
5	Persentase alumni pelatihan yang	90%	80%	82%	85%	87%	Seluruh Pusdiklat

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
	meningkat kinerjanya**						
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	77%	84%	85%	86%	87%	Seluruh Pusdiklat
7	Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	90%	93%	-	-	-	Seluruh Pusdiklat, Balai
8	Persentase pemenuhan *gap* kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	90%	92%	94%	Seluruh Pusdiklat
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	70%	70%	70%	80%	Seluruh Pusdiklat
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	Seluruh Pusdiklat
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	4	5	5	5	Pusdiklat, Balai
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	80%	80%	80%	80%	Pusdiklat

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
13	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC	100%	100%	100%	100%	100%	Pusdiklat
14	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	-	-	2	2	3	Pusdiklat
				BPPK	Kemenkeu		
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai***	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Seluruh Pusdiklat
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ****	93,67%	94%	94%	94%	94%	Seluruh Pusdiklat dan PKN STAN
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU****	80%	80%	80%	80%	80%	PKN STAN
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK****	85%	87%	90%	92%	95%	Setban

* Tahun 2020, Tingkat implementasi *learning organization* BPPK memiliki lingkup UE1 BPPK. Mulai tahun 2021 lingkup tingkat implementasi organization BPPK menjadi level Kemenkeu

** Tahun 2021 akan ada reformulasi, yang menyebabkan target turun.

*** 0,25% persentase jam pelatihan SDM keuangan KLID termasuk ke dalam 4,5% persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu

**** *mandatory* Kemenkeu

Reviu Renstra BPPK jika dibandingkan dengan realisasi IKU adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase lulusan Pendidikan dengan predikat minimal baik	93%	96,12%	93%	112,57%	93%	99,11%
2	Indeks Kualitas Penelitian	193	547	238	280	283	560
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	80%	99%	82%	96,49%	85%	110,35%
4	Tingkat Implementasi *Learning Organization**	80%	91,01%	82%	92,22%	85%	94,22%
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya**	82%	88,78%	85%	91%	87%	104,72%
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	85%	98,85%	86%	94,48%	87%	95,36%
7	Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	-	-	-	-	-
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	90%	N/A	92%	N/A	94%	N/A
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%	94,88%	70%	89,27%	80%	83,01%
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,50%	5,3017%	4,50%	11,2007%	4,50%	6,2697%

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	5	5	5	5	5	5
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80,00%	99,32%	80,00%	97,75%	80,00%	108,00%
13	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC	100,00%	115,29%	100,00%	113,64%	100,00%	109,67%
14	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	2	4	2	4	3	5
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai***	0,25%	1,7209%	0,25%	1,7432%	0,25%	1,6538%
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ****	94%	99,46%	94%	114,92%	94%	118,39%
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU****	80%	125,67%	80%	103,18%	80%	114,83%
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK****	90%	100,00%	92%	111%	95%	120%

5. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan lima tujuan dan strategi yang ada di renstra Kementerian Keuangan tahun 2020 – 2024, Kementerian Keuangan menetapkan dua belas program pada tahun 2020 menjadi lima program pada tahun 2021 – 2024.

Sebelum Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 BPPK menetapkan program “Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara”. Adapun sasaran program

(*outcome*)-nya adalah SDM yang Berkinerja Tinggi. Selain itu, ditetapkan sembilan kegiatan di lingkungan BPPK Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;
b. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
c. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai;
d. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
e. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
f. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan;
g. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan;
h. Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara; dan
i. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah.

Setelah Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2020)

Sementara itu, untuk tahun 2021–2024 dilakukan restrukturisasi program di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga program yang ditetapkan di BPPK adalah "Program Dukungan Manajemen". Adapun sasaran program berupa organisasi dan SDM yang optimal sedangkan indikator program yang ditetapkan adalah tingkat implementasi *learning organization*. Kegiatan-kegiatan pada program ini antara lain:

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM;
b. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum;
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
e. Legislasi dan Litigasi; dan
f. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal.

B. Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran

Rencana Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja diperinci menurut indikator keluaran, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja kemudian digunakan sebagai panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume, dan anggaran yang digunakan serta menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan kedalam Renstra.

Tabel berikut ini adalah perincian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 : Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2024

Kode	Kegiatan / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target 2024	Alokasi 2024
4678	**Legislasi dan Litigasi**		**45,048,000**
01	**Litigasi yang Optimal**		
01.01	Persentase Pelaksanaan Penanganan Perkara	100%	
4679	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**		**249.605.770.000**
01	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel**		
01.01	Tingkat pengguanaan aset bersama	45	
01.02	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	
4680	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)**		**159.417.319.000**
01	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel**		
01.01	Persentase kualitas pengelolaan keuangan BLU	100	
4681	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**		**621.974.000**

Kode	Kegiatan / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target 2024	Alokasi 2024
01	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan**		
01.01	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	
4682	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan (PKN STAN)**		**845.934.000**
01	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan**		
01.01	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	
4683	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**		**222.897.602.000**
01	**Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi**		
01.01	Persentase alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya	87	
01.02	Persentase alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya	87	
4684	**Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)**		**46.297.863.000**
01	**Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi**		
01.01	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93	
4685	**Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal**		**66,290,000**
01	**Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal yang Efektif**		
01.01	Indeks Efektivitas UKI	80	

Kode	Kegiatan / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target 2024	Alokasi 2024
01.02	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	97	
4686	**Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal (PKN STAN)**		88,205,000
01	**Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal yang Efektif**		
01.01	Indeks Integritas	91,1	
4687	**Pengelolaan Sistem Informasi dan teknologi**		499,250,000
01	**Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal**		
01.01	Tingkat penyelesaian *data analytic*	92%	
	Total		680.385.255.000

Dalam perjalanan tahun 2024, pagu anggaran BPPK telah mengalami perubahan dan pergeseran. Sepanjang periode Tahun 2024, BPPK melakukan 388 kali revisi yang terdiri darii 171 kali revisi DIPA dan 217 kali revisi KPA.

Tabel 2. 3 : Pagu Anggaran BPPK Periode Tahun 2024

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
4678	Legislasi dan Litigasi	45.048.000	21.488.000
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	267.583.322.000	287.498.296.000
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN)	148.473.260.000	150.197.687.000
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	621.974.000	1.043.056.000
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	845.934.000	545.934.000
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	236.757.025.000	242.111.587.000

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	48.427.509.000	46.503.082.000
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	190.558.000	190.558.000
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	88.205.000	88.205.000
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	499.250.000	561.442.000
TOTAL		690.454.373.000	728.761.335.000

C. Penetapan Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penetapan perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

1. Peta Strategi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi organisasi. BPPK telah menetapkan perjanjian kinerja Nomor PK-11/MK/2024 yang berisi dua belas sasaran strategi. Berikut adalah peta strategi BPPK tahun 2024.

Gambar 2. 1 : Peta Strategi BPPK Tahun 2024

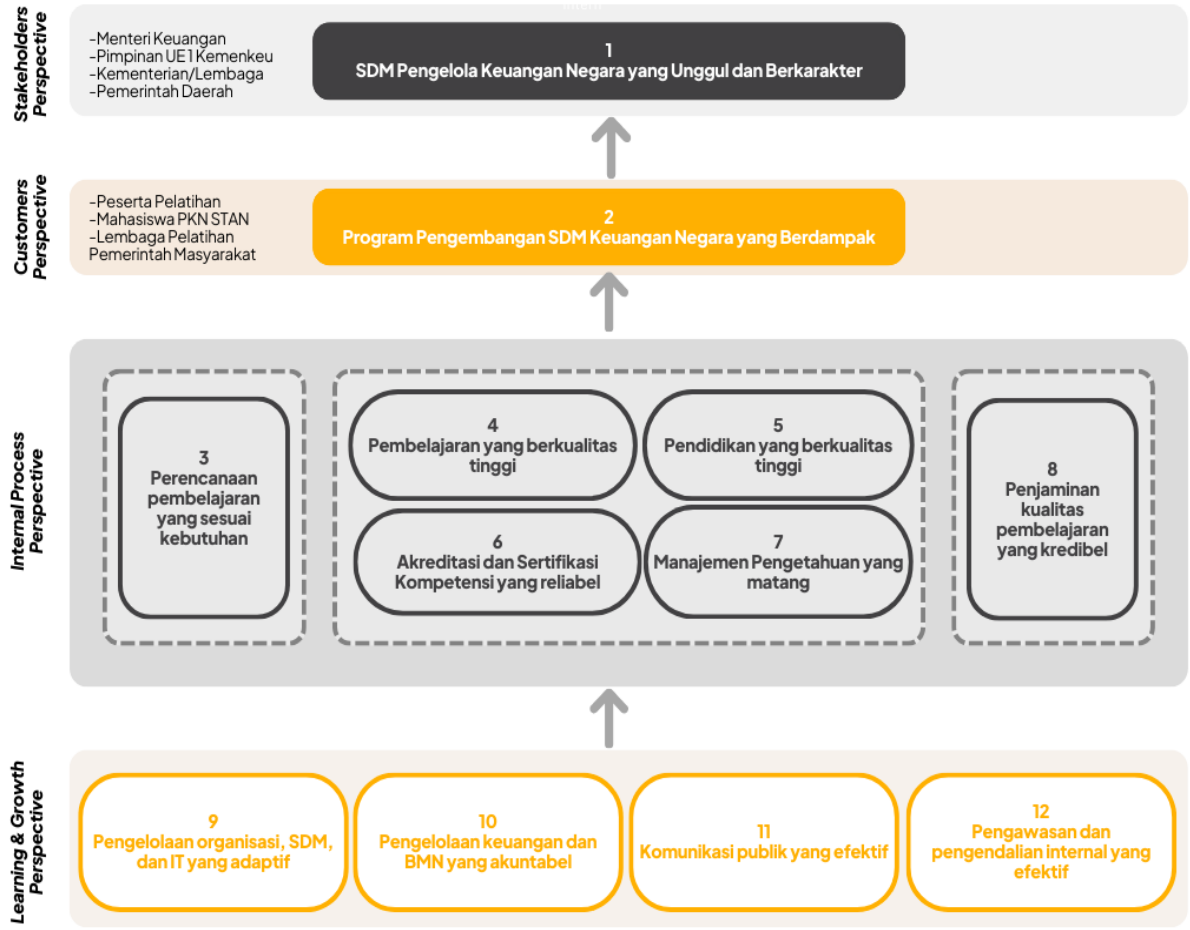

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja organisasi. Dalam dokumen Kontrak Kinerja, ditetapkan IKU untuk masing-masing Sasaran Kegiatan. Adapun jumlah keseluruhan IKU BPPK pada tahun 2024 adalah sebanyak 23 IKU.

Keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 : Daftar IKU Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	SDM Keuangan Negara yang Kompeten	1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	90,00%
		1b-CP	Indeks integritas organisasi	100,00
		1c-N	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100,00%
		1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90,00%
2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak	2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	365
		2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91,00%
3	Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan	3a-N	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85,00%
4	Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,35
5	Pendidikan yang berkualitas tinggi	5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100,00
		5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90,00%
		5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4,00
6	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel	6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	100,00
		6a1-N	*Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara*	*3,75*
		6a2-N	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	*90,00%*

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
7	Manajemen Pengetahuan yang Matang	7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	100,00
8	Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel	8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100,00%
9	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100,00%
		9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100,00
		9c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100,00%
		9d-N	*Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics*	94,00%
10	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00
		10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
11	Komunikasi publik yang efektif	11a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100,00
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100,00
		12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82,00

Sumber : Perjanjian Kinerja BPPK

Pada bulan Juni 2024 terdapat adendum Perjanjian Kinerja BPPK yang meliputi perubahan target/*trajectory* IKU. Adendum ini dilakukan sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyesuaian *trajectory* target seluruh IKU menjadi minimal triwulanan. Pada level BPPK terdapat tiga belas IKU yang mengalami perubahan *trajectory* target. Adapun detail adendum Perjanjian Kinerja BPPK adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 5 : Perubahan *Trajectory* IKU

No	IKU	Semula				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Tingkat implementasi *learning organization*	-	-	-	90%	9%	17%	25%	100%
2	Indeks integritas organisasi	-	-	-	100	100	100	100	100
3	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	-	-	-	365	310	320	330	365
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
6	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	90%	20%	40%	60%	90%
7	Tingkat kepuasan pengguna alumni	-	-	-	4	4	4	4	4
8	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	-	100	100	100	100	100	100	100
8a	*Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan*	-	*3,75*	*3,75*	*3,75*	*3,75*	*3,75*	*3,75*	*3,75*

No	IKU	Semula				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	bidang keuangan negara								
8b	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	-	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*
9	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	-	-	-	100	100	100	100	100
10	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	100	100	100	100	100
11	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	84,1	42,5	60	70	84,1
12	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	100	100	100	100	100
13	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	82	-	15	20	82

Sumber : Adendum Perjanjian Kinerja BPPK

3. Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di BPPK diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Kepala BPPK. Pada proses manajemen risiko BPPK tahun 2024, dari dua belas sasaran organisasi, dilakukan identifikasi dan analisis pada awal tahun. Dari hasil identifikasi dan analisis tersebut terdapat 11 (sebelas) risiko yang perlu dilakukan mitigasi

dari total 23 risiko yang teridentifikasi. Dari sebelas risiko tersebut 10 risiko bersifat *downside risk* dan 1 risiko bersifat *upside risk*. Rincian risiko pada awal tahun tersebut adalah sebagai berikut.

- 4 (empat) risiko yang berada pada level tinggi;
- 6 (enam) risiko berada pada level sedang dan
- 1 risiko *upside risk* berada pada level rendah yang perlu dimaksimalkan potensi keterjadiannya.

Tabel 2. 6 : Daftar Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
1	SDM keuangan negara yang kompeten	1.1	Tingkat pemahaman pegawai Kemenkeu terhadap *learning organization* belum memadai	11	11
		1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	17	11
		1.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	17	11
		1.4	Pengguna layanan tidak memperoleh layanan sesuai dengan standar pelayanan	10	10
		1.5	Pembelajaran yang diselenggarakan belum mendorong pencapaian kinerja organisasi	11	11

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak	2.1	Persentase alumni yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri	12	8
		2.2	Alumni pelatihan tidak dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran	11	11
3	Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan	3.1	Pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh *stakeholder*	13	11
4	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	4.1	Layanan pembelajaran dan pengajar tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran	8	8
5	Pendidikan yang berkualitas tinggi	5.1	Tidak tersusunnya standar pengelolaan keluhan pelanggan di PKN STAN	17	11
		5.2	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	17	11
6	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel	6.1	Layanan akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan sertifikasi tidak dinilai baik	11	11
7	Manajemen pengetahuan yang matang	7.1	Proses manajemen pengetahuan di Kemenkeu tidak berjalan secara efektif	14	11
8	Penjaminan kualitas	8.1	Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar penjaminan mutu	11	11

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
	pembelajaran yang kredibel				
9	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif	9.1	Perbedaan kontribusi pejabat/pegawai yang diusulkan dalam mutasi antar unit eselon I	9	9
		9.2	Kegagalan sistem TIK	11	11
		9.3	Pemanfaatan aplikasi/data *analytic* dalam pencapaian kinerja organisasi	9	12
		9.4	Penyelesaian IS RBTK tidak sesuai dengan rencana	17	11
10	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	10.1	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	6	8
		10.2	Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target	14	13
		10.3	Rendahnya pemanfaatan sistem aplikasi peminjaman/ pengelolaan dan pengadaan BMN di lingkup BPPK.	6	6
11	Komunikasi publik yang efektif	11.1	Persepsi negatif atas pemberitaan di media massa atau media sosial tentang layanan BPPK	12	8
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	12.1	Jumlah dan/atau kompetensi SDM UKI tidak memadai	11	11

Sumber : Piagam Manajemen Risiko BPPK

Pada Juni 2024, dilakukan penetapan adendum manajemen risiko yang meliputi penambahan dua risiko baru, yaitu Risiko Penyelenggaraan kearsipan tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan pada SS Dukungan Layanan Kesekretariatan dan BMN yang Andal dan Risiko kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia pada SS Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif. Adendum ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kementerian Keuangan Triwulan I Tahun 2024.

Setelah dilakukannya adendum, dari 12 Sasaran Organisasi di BPPK terdapat 12 (dua belas) risiko yang perlu dilakukan mitigasi. Dari keduabelas risiko tersebut 11 diantaranya merupakan risiko yang bersifat *downside* sedangkan 1 risiko bersifat *upside* dengan rincian risiko adalah sebagai berikut.

- 2 (dua) risiko yang berada pada level tinggi;
- 4 (empat) risiko berada pada level sedang dan
- 6 (enam) risiko berada pada rendah dengan rincian :
  - 5 (lima) risiko bersifat *downside*; dan
  - 1 (satu) risiko bersifat *upside* berada pada level rendah yang perlu dimaksimalkan potensi keterjadiannya.

Adapun daftar risiko yang dimitigasi pada BPPK sampai dengan berakhirnya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No. Risiko	Risiko yang dimitigasi	P24	Q4	Residual
	Downside Risk			
1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	17	11	11
1.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	17	18	11
2.1	Persentase alumni yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri	12	12	8
3.1	Pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh *stakeholder*	13	11	11

No. Risiko	Risiko yang dimitigasi	P24	Q4	Residual
5.1	Tidak tersusunnya standar pengelolaan kelihan pelanggan di PKN STAN	17	11	11
5.2	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	17	11	11
7.1	Proses Manejemen Pengetahuan di Kemenkeu tidak berjalan secara efektif	14	11	11
9.4	Penyelesaia IS RBTK tidak sesuai dengan rencana	17	11	11
10.2	Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target	14	11	13
10.4	Penyelesaian *transit office* dan hunian sementara Kemenkeu tidask sesuai jadwal	13	10	10
11.1	Persepsi negatif atas pemberitaan di media sosial tentang layanan BPPK	12	8	8
	Upside Risk			
6.2	Pemanfaatan aplikasi/data analytic dalam pencapaian kinerja organisasi	9	9	12

4. Inisiatif Strategi

Selain 23 IKU yang diukur, BPPK memiliki Inisiatif Strategis (IS). IS merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS. Tabel berikut menyandingkan IS BPPK tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 7 : Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK

Tahun	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output / Outcome*
2023	Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien dan	Pelaksanaan Penjaminan mutu pembelajaranmelalui akreditasi pelatihan	Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara terakreditasi pada KLID.

Tahun	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output / Outcome*
	Akuntabel / Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	teknis di bidang Keuangan Negara bagi KLID	
2024	SDM Keuangan Negara yang Kompeten	Perluasan dan pengembangan program edukasi bagi para pengelola dan/atau calan pengelola keuangan negara yang inklusif dan berdampak	1. Perluasan edukasi keuangan negara melalui *executive training* bagi pimpinan KLID 2. Perluasan edukasi keuangan negara bagi mahasiswa melalui Kemenkeu Corpu *Goes to Campus* (KC-GTC)

D. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja dan risiko BPPK diawali dengan pelaksanaan reviu atas Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025, yang biasa disebut *Refinement* Kontrak Kinerja dan Risiko. Proses *Refinement* Kontrak Kinerja dan Risiko ini telah dimulai sejak triwulan IV tahun 2024 ditandai dengan penyampaian Nota Dinas Sekretaris BPPK nomor ND-4146/PP.1/2024 perihal Penyampaian Kebijakan *Refinement* Kinerja dan Permintaan Masukan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One-Two-Three* BPPK 2024. Dalam rangka refinement kontrak kinerja dan risiko tersebut dilakukan pembahasan dengan unit-unit kerja di BPPK sebagaimana berikut.

a. *Refinement* K-*One* BPPK dilakukan tanggal 21 November 2024;
b. *Refinement* K-*Two* Setban dilakukan tanggal 25 November 2024;
c. *Refinement* K-*Two* Pusdiklat Tematik dilakukan tanggal 26 November 2024;
d. *Refinement* Kemenkeu-Three BDK dilaksanakan tanggal 2 Desember 2024;

e. *Refinement* Kemenkeu-Two PKN STAN dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja BPPK Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 8: Perjanjian Kinerja BPPK Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
1.	SDM Keuangan Negara yang kompeten berkarakter	1a-CP	Tingkat implementasi *Learning organization*
		1b-CP	Indeks Integritas organisasi
		1c-CP	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan
		1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya
2.	Program pendidikan SDM Keuangan negara yang berdampak	2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan pergurua tinggi vokasi
		2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak	3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya
		3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif	4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi
5.	Pendidikan yang bereputasi unggul	5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN
		5b-N	Indeks kualitas penelitian
6.	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	6a-N	Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
		10c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data *Analytics* Unit
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem
		12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13a-CP	Tingkat kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun telah mempertimbangkan arahan pimpinan, perubahan visi dan misi, reorganisasi, dan diselaraskan dengan peta proses bisnis sebagai berikut.

1. Arahan Presiden
    - Terdapat 2 IKU yang mendukung arahan Presiden
    - Arahan "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi" (Setjen, Itjen, BPPK) diakomodir dengan IKU Indeks integritas;
    - Arahan "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM" (Setjen, BPPK) diakomodir dengan IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM.

2. Arahan Kepala Badan
    - Telah diidentifikasi SS dan IKU pada *stakheolder* dan *customer perspective*.
    - Telah ditambahkan layanan yang akan disurvei pada level *stakeholder perspective*
    - Penambahan menjadi 3 SS pada *customer perspective*, dan penambahan menjadi 6 IKU.

3. Restrukturisasi Sasaran Strategis
    - Pada *customer perspective* dibagi menjadi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi;

- Pada internal proses, dibuat SS yang mendukung pendidikan (PKN STAN dan beasiswa), pelatihan, dan sertifikasi, yang didukung dengan Manajemen Pengetahuan.

Sasaran strategis yang disusun juga telah diselaraskan dengan visi dan misi yang ada pada konsep Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BPPK 2025-2029 sebagai berikut

Usulan Visi Menjadi *Knowledge Institution* berbasis teknologi digital untuk menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara kompeten dan berkarakter dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan	*Stakeholder Perspective* 1-SDM Keuangan Negara yang kompoten dan berkarakter
Usulan Misi: 1. Memperkuat implementasi Kemenkeu Corpu melalui pembelajaran terintegrasi yang berdampak tinggi, manajemen pengetahuan yang andal, dan penerapan teknologi digital yang tepat guna 2. Mewujudkan pendidikan bereputasi unggul dan bertaraf internasional serta pengelolaan tugas belajar yang efektif dan tepat sasaran 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pembangunan dan penguatan karakter, mental, budaya, serta kepemimpinan 4. Mewujudkan pendidikan, pembelajaran, dan sertifikasi	C*ustomer Perspective* 2-Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak 3-Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak 4-Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif *Internal Business Process Perspective* 5-Pendidikan yang bereputasi unggul 6-Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran 7-Pembelajaran yang berkualitas tinggi 8-Pelaksanaa uji kompetensi yang kredibel

kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif 5. Menyelenggarakan program pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang responsif terhadap isu strategis nasional dan internasional. 6. Mendukung fungsionalisasi SDM melalui pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang profesional dan adaptif	9–Manajemen pengetahuan yang andal
7. Mewujudkan **dukungan manajemen** yang andal dan **adaptif** untuk mendukung kinerja BPPK yang unggul.	*Learning and Growth Perspective* 10–Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif 11 –Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif 12–Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif 13–Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.

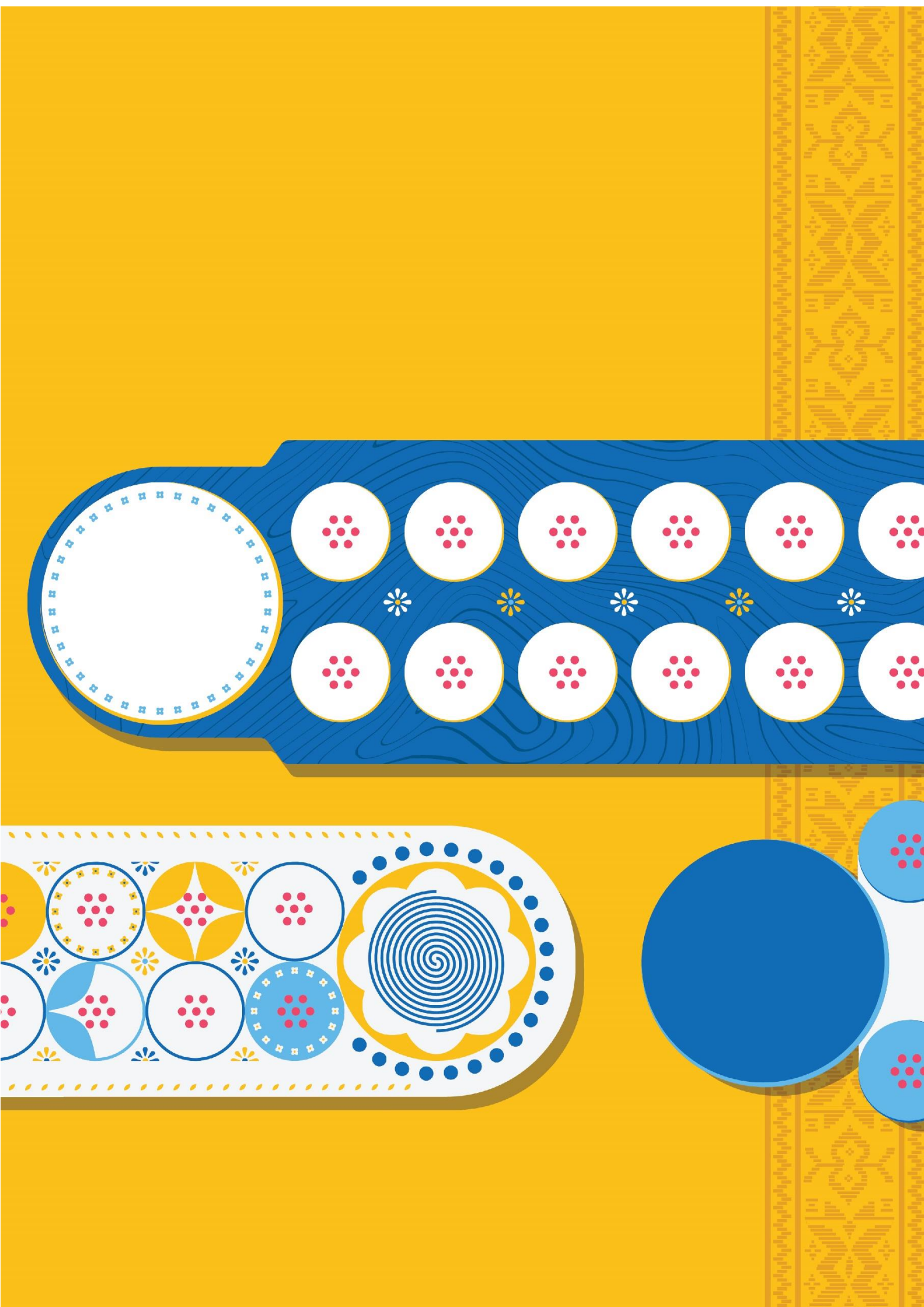

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsinya secara proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja BPPK tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada setiap perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh hasil bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK Tahun 2024 adalah sebesar **111,48**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja tiap Perspektif

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	112,74
Customer	20%	102,59
Internal Business Process	25%	114,21
Learning and Growth	25%	114,37
Nilai Kinerja Organisasi	**100%**	**111,48**

Perkembangan NKO BPPK dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam **Gambar 3.1** berikut.

Gambar 3. 1 : Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK

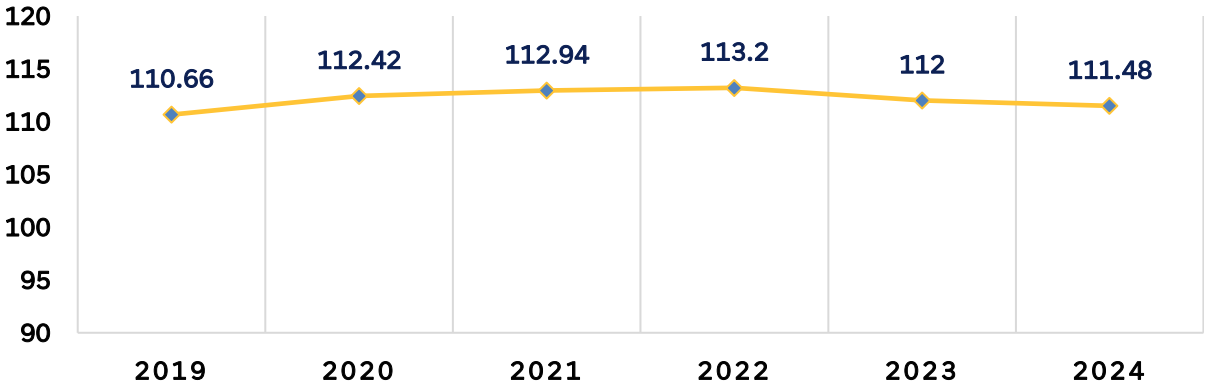

Meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NKO di tahun 2023 namun seluruh IKU yang dimiliki BPPK memiliki capaian berstatus hijau (memenuhi target) dan apabila diukur kualitas kontrak kinerja, NKO K3 BPPK bernilai 120. Adapun penyebab penurunan NKO pada tahun 2024 yang telah diidentifikasi sebagai berikut.

1. Target IKU BPPK 2024 dirancang menantang, agar K3 berkualitas. Sehingga walaupun realisasi meningkat, karena target yang ditetapkan juga meningkat maka capaiannya menurun
2. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan *trajectory* secara triwulanan.

Capaian dari keseluruhan 23 IKU tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 : Target, Realisasi dan Capaian IKU BPPK Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	STAKEHOLDER PERSPECTIVE			**112,74**
1	**SDM keuangan negara yang kompeten**			**112,74**
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	100%	108,52%	108,52
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	110,25	110,25
1c-N	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100%	115,83%	115,83
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	104,72%	116,36

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	CUSTOMER PERSPECTIVE			**102,59**
2	**Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak**			**102,59**
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	365	366,40	100,38
2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%	95,36%	104,79
	INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE			**114,21**
3	**Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan**			**120,00**
3a-N	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85%	116,27%	120,00
4	**Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi**			**109,89**
4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,35	4,78	109,89
5	**Pendidikan yang berkualitas tinggi**			**115,78**
5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100	114,83	114,83
5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%	110,35%	120,00
5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4	4,5	112,50
6	**Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel**			**117,60**
6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	100	100	117,60
6a1-N	*Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara*	*3,75*	*4,32*	*115,20*
6a2-N	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	*90%*	*120%*	*120*
7	**Manajemen Pengetahuan yang Matang**			**103,33**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	100	103,33	103,33
8	**Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel**			**118,67**
8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	118,67%	118,67
	LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			**114,37**
9	**Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif**			**111,38**
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	118,92%	118,92
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	104,48	104,48
9c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120,00%	120,00
9d-N	*Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics*	94%	100,00%	106,38
10	**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel**			**112,89**
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	117,16	117,16
10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	90,06	107,09
11	**Komunikasi publik yang efektif**			**120,00**
11a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120,00	120,00
12	**Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif**			**113,19**
12a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	100	110
12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95,19	116,09
	Nilai Kinerja Organisasi			111,48

Penjelasan capaian IKU BPPK selama tahun 2024 untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut.

SS-1. SDM Keuangan Negara yang Kompeten

SDM keuangan negara yang kompeten adalah SDM keuangan negara yang memiliki perilaku, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan strategis organisasi.

Selain itu, juga memiliki nilai-nilai Kemenkeu, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3 : SS SDM Keuangan Negara yang Kompeten

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	**SDM keuangan negara yang kompeten**			112,74
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	100%	108,52%	108,52
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	110,25	110,25
1c-N	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100%	115,83%	115,83
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	104,72%	116,36

Indeks capaian untuk SS ini adalah **112,74.** Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "SDM Keuangan Negara yang Kompeten" adalah sebagai berikut.

1a-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu *Corporate University* berdasarkan

KMK-924/KMK.011/2018, dan KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organisation*. *Learning organisation* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran.
Tingkat implementasi *Learning Organization* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University*.

Tingkat implementasi *learning organization* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University*. Tingkat implementasi *learning organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment;*
2. *Learning function organization;*
3. *Learners;*
4. *Knowledge management Implementation;*
5. *Learning value chain;*

6. *Learning solutions;*
7. *Learning spaces;*
8. *Learners' performance;*
9. *Leaders' participation in learning process;* dan
10. *Feedback.*

Lingkup penilaian BPPK adalah *Learning Organization* pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu). Pengukuran dilakukan dengan berpedoman pada KMK-2/KM.11/2022 tentang Perubahan Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* atau ketentuan perubahannya (KMK-2/KM.11/2023).

2. Formula IKU

Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* di BPPK dihitung berdasarkan realisasi dua komponen

$$\boldsymbol{Realisasi\ IKU} = (\mathbf{25\%}\ \boldsymbol{x\ Komponen\ A}) + (\mathbf{75\%}\ \boldsymbol{x\ Komponen\ B})$$

Komponen A : Progres implementasi *Learning Organization*

Nilai komponen A =

1. Tersedianya hasil identifikasi rekomendasi sebagai bahan rencana kerja *Learning Organization* unit sudah dilakukan:
   a. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia sebelum tanggal 31 Maret 2024: nilai 40
   b. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 31 Maret 2024: nilai 36
   c. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 1 s.d. 5 April: nilai 30
   d. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia setelah tanggal 5 April 2024: nilai 20

2. Tersedianya unit sampel yang disampaikan kepada komite *Learning Organization* BPPK:
   a. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite *Learning Organization* sebelum tanggal 30 Juni 2024: nilai 40

b. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite *Learning Organization* pada tanggal 30 Juni 2024: nilai 36
c. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite *Learning Organization* pada 1 s.d. 5 Juli 2024: nilai 30
d. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite *Learning Organization* setelah tanggal 5 Juli 2024: nilai 20

3. Terselenggaranya pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya:
   Nilai dihitung oleh masing-masing Unit Eselon I
   a. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan sebelum tanggal 30 September 2024: nilai 40
   b. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 30 September 2024: nilai 36
   c. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 1 s.d. 5 Oktober 2024: nilai 30
   d. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan setelah tanggal 5 Oktober 2024: nilai 20

Komponen B: Nilai tingkat implementasi *Learning Organization*

Nilai berasal dari laporan tingkat implementasi *Learning Organization* oleh Komite *Learning Organization* BPPK

Dimana tingkat implementasi *Learning Organization* diukur menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei.

1. Penilaian (bobot 30%): dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
2. *Self Assesment* (bobot 30%): dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK
3. Survei (bobot 40%):
   a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.

b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel.

3. Perhitungan Capaian IKU

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* di BPPK pada Tahun 2024

BPPK	SS: SDM Keuangan Negara yang Kompeten 1a-CP: Tingkat Implementasi *Learning Organization*							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	9%	17%	17%	25%	25%	100%	100%	
Realisasi	10%	20%	20%	30%	30%	108,52%	108,52%	Max/TLKV
Capaian	**111,11**	**117,65**	**117,65**	**120**	**120**	**108,52**	**108,52**	

Berikut ini adalah rincian perhitungan realisasi IKU tingkat implementasi *learning organization* di BPPK.

Komponen A = Progres implementasi *Learning Organization*

- Hasil identifikasi rekomendasi tersedia sebelum tanggal 31 Maret 2024
- Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite *Learning Organization* sebelum tanggal 30 Juni 2024: nilai 40
- Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan sebelum tanggal 30 September 2024: nilai 40

Realisasi komponen A = (40 + 40 +40) = 120

Komponen B = Nilai implementasi *Learning Organization* Kementerian Keuangan

Berikut ini adalah nilai implementasi *Learning Organization* di unit-unit Kemenkeu pada tahun 2024.

No	Unit Organisasi	Survei (40%)	Self Assessment (30%)	Penilaian Komite (30%)	Nilai Akhir
1	Setjen	92,15	100	95,00	95,36
2	Itjen	90,86	100	96,19	95,20
3	DJA	86,05	99,05	93,45	92,17
4	DJP	89,20	99,33	94,84	93,93
5	DJBC	94,29	99,19	97,35	96,68
6	DJPB	96,00	100,00	95,18	96,95
7	DJKN	93,41	98,24	95,52	95,49
8	DJPK	91,82	95,16	95,88	94,04
9	DJPPR	88,86	97,11	93,65	92,77
10	BKF	84,16	99,39	94,66	91,88
11	BPPK	94,25	100	95,36	96,31
12	LNSW	89,05	98,39	84,31	90,43
	Kemenkeu	**90,84**	**98,82**	**94,12**	**94,22**

$$Nilai\ Implementasi\ Learning\ Organization = (30\%\ x\ komite\ penilaian) + (30\%\ x\ self\ assessment) + (40\%\ x\ survei)$$

$$Nilai\ Implementasi\ Learning\ Organization = (30\%\ x\ 94{,}12) + (30\%\ x\ 98{,}82) + (40\%\ x\ 90{,}84) = 94{,}22$$

Realisasi Komponen B = 94,22

Realisasi IKU = (25% x 120) + (75% x 94,22) = 108,52%

IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* sudah dimiliki oleh BPPK sejak tahun anggaran 2020, dan masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2025. Namun terdapat reformulasi IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Perkembangan target dan capaian IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* dapat dilihat pada grafik berikut.

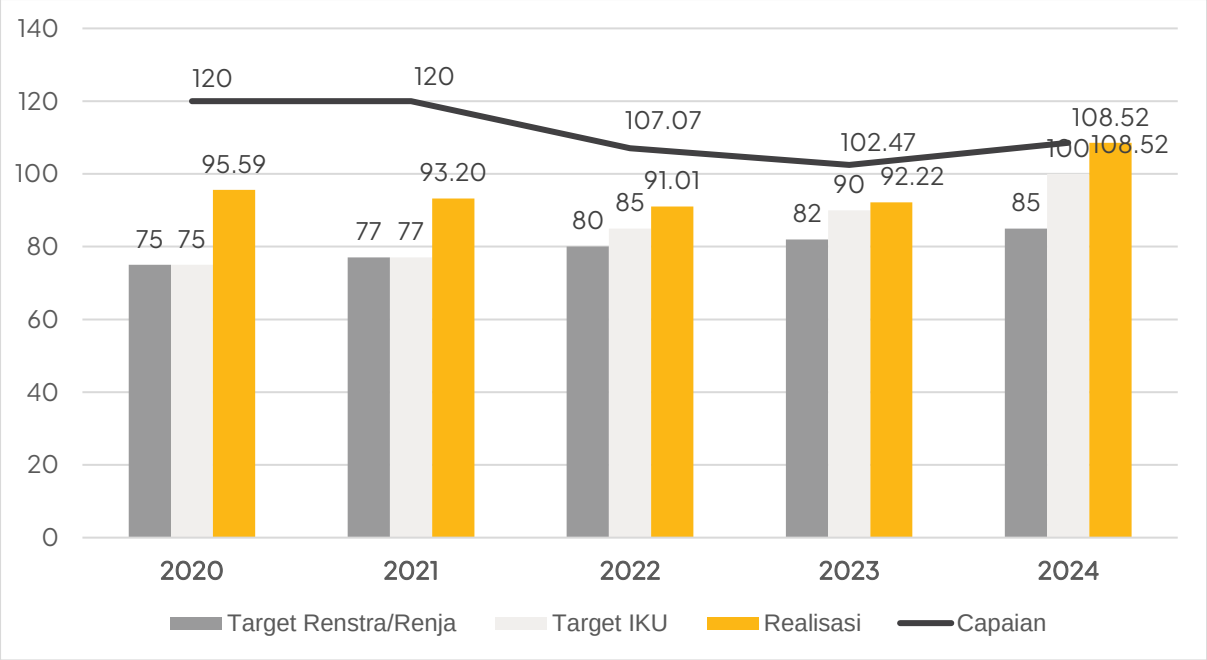

Capaian IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2024 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan 2023. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya IKU ini terus mengalami reformulasi sehingga capaiannya tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Apabila melihat salah satu komponen dari IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* di BPPK pada tahun 2024 ini terdapat komponen yang sama dengan tahun 2023 yaitu komponen nilai implementasi *Learning Organization*. Pada tahun 2023 realisasi komponen ini adalah sebesar 92,22 sedangkan realisasi pada tahun 2024 naik menjadi 94,22. Beberapa hal yang meningkatkan komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Unit Eselon I telah mendukung proses ADDIE sesuai dengan porsinya sebagai unit pengguna. Unit Eselon I juga telah terbiasa melakukan pembelajaran terintegrasi menggunakan RAP dan IDP meskipun masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyunan RAP.
2. Unit Eselon I telah rutin melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* pada berbagai level. Selain itu, nilai structured learning juga meningkat, Unit Eselon I semakin patuh mengirimkan peserta pelatihan yang sesuai persyaratan, salah satu faktor pendorongnya adalah dengan diberikannya IKU *mandatory* terkait pemenuhan kebutuhan pembelajaran ini kepada seluruh Sekretaris Unit Eselon I.

Tabel 3. 4 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi LO

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	75%	75%	75%	-	75%	95,99%
2021	77%	77%	77%	-	77%	93,2%
2022	80%	80%	80%	-	85%	91,01%
2023	82%	82%	82%	-	90%	92,22%
2024	85%	85%	85%	-	100%	108,52%

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* di tahun 2024 pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	100%	110,26%	110,26
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	100%	110,13%	110,13
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	109,60%	109,60
Pusdiklat Pajak	100%	109,73%	109,73
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	109,88%	109,88
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	100%	113,33%	113,33
Pusdiklat Keuangan Umum	100%	102,23%	102,23
PKN STAN	100%	102,77%	102,77

4. Upaya Pencapaian IKU

Ketercapaian target IKU ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPPK. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dalam pencapaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya pemahaman pengelola dan pegawai terhadap 10 komponen LO;
2. Belum meratanya pemahaman pengelola dan pegawai terhadap KMK 350 tentang Pembelajaran Terintegrasi;
3. Belum meratanya pemahaman pengelola dan pegawai terhadap Manajemen Pengetahuan.

Berikut ini adalah beberapa upaya yang telah dilakukan BPPK untuk mendukung ketercapaian IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization*.

1. Persiapan pembentukan komite *Learning Organization* tahun 2024;
2. *After Action Review* Komite *Learning Organization* tahun 2023;
3. Penyusunan konspe rencana kerja komite *Learning Organization* tahun 2024;
4. Pelaksanaan *kick-off* Komite *Learning Organization* tahun 2024;
5. Penentuan unit sampel *Learning Organization* tahun 2024;
6. Pelaksanaan *kick-off* penilaian *Learning Organization* tahun 2024 yang dilanjutan dengan *one-on-one* asistensi Unit Eselon I dengan Pusdiklat mitra pada tanggal 19 Juni 2024;
7. Pelaksanaan FGD Tim Penilai *Learning Organization* pada tanggal 21 Agustus 2024;
8. Pelaksanaan kegiatan *self-assessment* dan pengisian Survei *Learning Organization* pada 1 s.d. 22 September 2024;
9. Pelaksanaan proses validasi *self assessment* dan penilaian Komite *Learning Organization*; dan
10. Pelaksanaan *one on one* pembahasan rekomendasi *Learning Organization* 2024, dan penyusunan Laporan *Learning Organization*.

5. Analisis atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap sasaran organisasi SDM Keuanga Negara yang kompeten adalah Tingkat pemahaman pegawai terhadap *learning organization* belum memadai. Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 risiko ini masih sama (tetap) dengan proyeksi di awal tahun yang berada pada level risiko rendah dengan besaran risiko 11.

Dasar perhitungan risiko ini adalah histori nilai *Learning Organization* UE1 dan unit non-eselon di lingkungan Kemenkeu yang memperoleh nilai melebihi target selama 3 (tiga) tahun terakhir termasuk tahun 2024.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun dalam rangka mitigasi risiko guna menjaga level risiko tetap pada batas toleransi penerimaan organisasi.

1. Proses penyusunan rencana kerja *Learning Organization* tahun 2024
2. Kegiatan AAR (*After Action Review*) yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan tindak lanjut AAR Komite *Learning Organization* tahun 2023 dalam rangka continuous improvement pelaksanaan *Learning Organization* tahun 2024.
3. Pembentukan Komite *Learning Organization* yang di dalamnya terdapat Tim Pengelola Mitra yang salah satu tugasnya melaksanakan rencana aksi, di antaranya sosialisasi, FGD, fasilitasi dan asistensi dalam rangka meningkatkan komitmen mitra dalam mengimplementasikan *Learning Organization*.
4. Melakukan asistensi implementasi *Learning Organization* kepada unit di lingkungan Kemenkeu (mitra).

Tren Risiko Tingkat pemahaman pegawai terhadap *learning organization* belum memadai sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

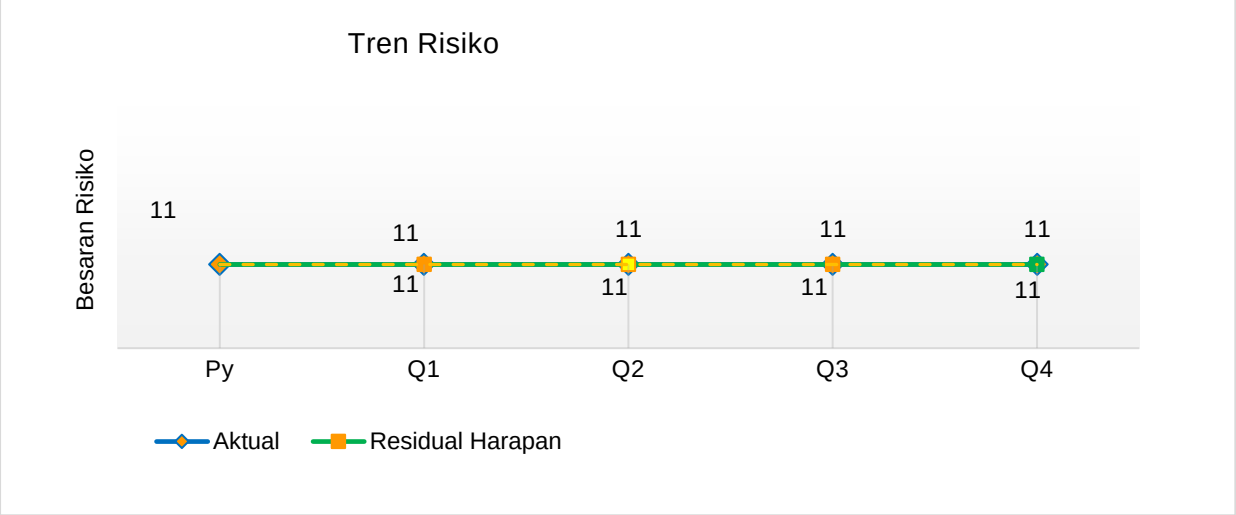

Pada tahun 2025 risiko ini diperkirakan **tetap** pada level **rendah** (dengan besaran risiko 6 s.d 11).

6. Rencana Aksi

IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* masih akan diterapkan di Tahun 2025. Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang terkait dengan IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Implementasi *Learning Organization* tahun 2025	Seluruh UE 1	2025
2.	Asistensi Implementasi *Learning Organization* seluruh UE1 tahun 2025	Pusdiklat dan BDK	
3.	Pengukuran dan pelaporan tingkat implementasi *Learning Organization* tahun 2025	Komite LO	

1b-CP Indeks Integritas Organisasi

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas organisasi di lingkungan Kemenkeu berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal) dan menjadikan *pilot project* perwujudan *good governance* pada unit kerja di lingkungan Kemenkeu dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari 2 komponen yang diukur, yaitu:

1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh Itjen)
   Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi integritas selama 12 bulan sebelum pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari:

- Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN dengan Masa Kerja Minimal 12 bulan pada unit sampel.
- Eskternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria menggunakan layanan pada unit sampel dalam kurun waktu 12 bulan ke belakang.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

a. Internal
   - Perdagangan Pengaruh;
   - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
   - Pengelolaan SDM;
   - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
   - Sosialisasi Antikorupsi; dan
   - Transparansi.

b. Eksternal
   - Upaya Pencegahan Korupsi;
   - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
   - Integritas Pegawai.

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

   Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kemenkeu yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, Kemenkeu mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut yakni dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

2. Formula IKU

$$\boldsymbol{Capaian\ IKU\ = Rata - Rata\ Capaian\ Komponen\ 1\ dan\ 2}$$

3. Perhitungan Capaian IKU

Pada tahun 2024, IKU Indeks Integritas organisasi memiliki target 100. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU Indeks Integritas organisasi.

BPPK	SDM Keuangan Negara yang Kompeten 1b-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	106,67	106,67	107,20	107,20	110,25	110,25	
Capaian	120	106,67	106,67	107,20	107,20	110,25	110,25	

Seperti yang sudah disampaikan pada deskripsi IKU diatas, IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari dua komponen, berikut ini adalah perhitungan untuk masing-masing komponen

Komponen 1 yaitu Survei penilaian integritas.

Realisasi dari komponen ini diperoleh dari pelaksanaan SPI yang dilaksanakan oleh KPK pada 591 unit kerja di Kementerian Keuangan melalui *platform* survei milik KPK. Berdasarkan nota dinas Inspektorat Jenderal nomor ND-5/IJ/2025 perihal Penyampaian Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2024, berikut ini adalah rincian realisasi komponen SPI pada tiap unit di Kementerian Keuangan.

Unit	Integritas	Apresiasi			Capaian
	Kemenkeu 2024	TL SPI	Kegiatan Pencegahan	Total Apresiasi	
Setjen	87,84	100	100	5	92,84
DJA	87,60	98,08	100	5	92,60
DJP	79,86	96,21	92,81	4,82	84,68
DJBC	76,28	89,37	85,72	4,64	80,93
DJPB	90,52	100	95,92	4,90	95,42
DJKN	87,49	100	98,01	4,95	92,44
DJPK	88,39	95,56	91,67	4,79	93,18
DJPPR	89,32	100	100	5	94,32
Itjen	88,74	96,35	100	5	93,74
BKF	86,28	100	100	5	91,28
BPPK	87,14	99,67	96,07	4,90	92,05
LNSW	88,03	100	100	5	93,03

Dari tabel diketahui bahwa realisasi untuk komponen SPI di BPPK adalah sebesar **92,05**. Dengan target SPI sebesar 91,6 maka capaian komponen 1 pada BPPK adalah **100,49**

Komponen 2 , yaitu keberlanjutan dan pemenuhan unit dengan predikat ZI WBK/WBBM. Realisasi komponen ini diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.

No	Komponen IKU	Formula	Bobot	Nilai	
1	Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM	Ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian	10%	116%	11,6%
2	Tingkat Kelulusan WBBM di TPN	Target kelulusan 45%	54%	222%	120%
3	Keberlanjutan ZI WBK WBBM	Jumlah unit yang tidak dicabut predikat ZI WBK/WBBM	36%	100%	36%
		Total			167,60%

Realisasi untuk komponen 2 adalah 167,6% sedangkan targetnya adalah 100% sehingga capaian untuk komponen 2 adalah 167,6 namun dikonversi menjadi **120** (yang merupakan capaian maksimal).

$$Capaian\ IKU\ Indeks\ Integritas\ Organisasi\ = \frac{100{,}49 + 120}{2} = \ 110{,}25$$

IKU Indeks integritas organisasi terus mengalami formulasi sehingga target dan realisasi dari tahun ke tahun tidak bisa diperbandingkan langsung, namun perkembangan target dan realisasi IKU Indeks Integritas organsiasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

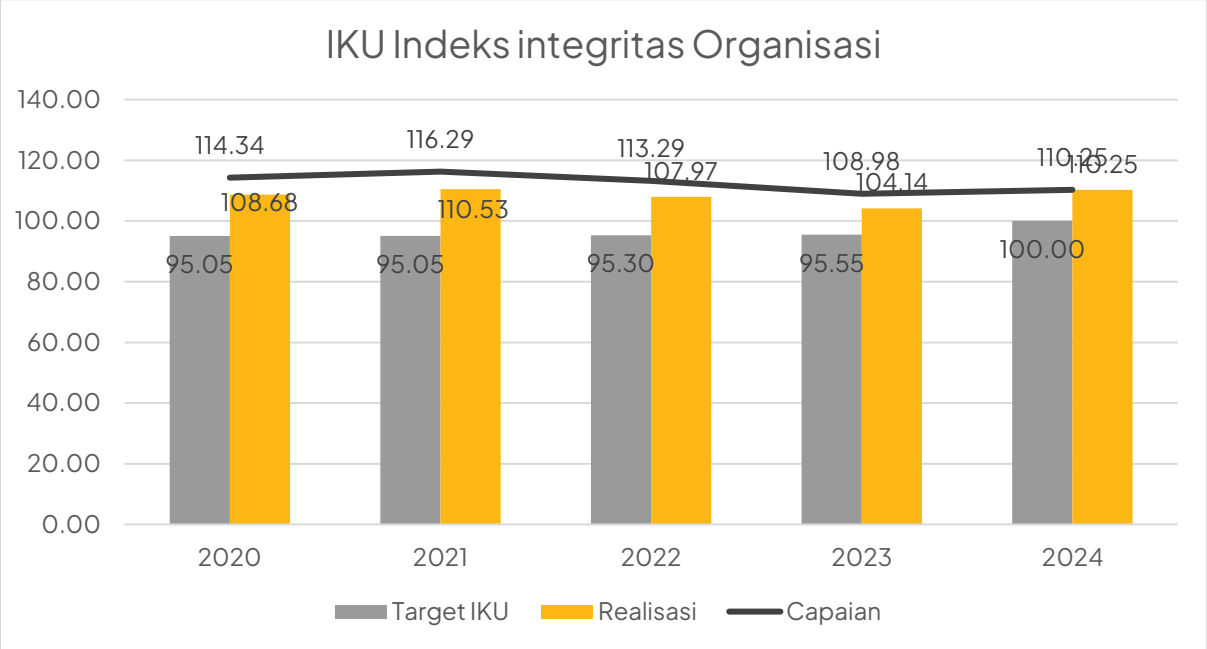

IKU Indeks integritas organisasi mengalami reformulasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Target, realisasi dan capaian IKU sejak tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	95,1	108,68
2021	-	-	-	-	95,05	110,53
2022	-	-	-	-	95,3	107,97
2023	-	-	-	-	95,5	108,98
2024	-	-	-	-	100	107,2

Namum salah satu komponen IKU Indeks Integritas Organisasi yaitu Nilai Survei Penilaian Integritas (yang menjadi indeks integritas) adalah komponen yang juga menjadi

komponen di tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan indikator Nilai Survei Penilaian Integritas (indek integritas) dari tahun ke tahun.

Tabel 3. 6 : Perbandingan Indikator indeks Integritas

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	90,0	-	90,00	-	95,1	108,68
2021	90,5	-	90,50	-	95,05	110,53
2022	91,00	-	91,00	-	95,3	107,97
2023	91,50	-	91,50	-	95,5	108,98
2024	92,00	-	92,00	-	100	107,2

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi di tahun 2024 pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	100	110,25	110,25
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	100	101,99	101,99
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100	101,99	101,99
Pusdiklat Pajak	100	101,99	101,99
Pusdiklat Bea dan Cukai	100	110,25	110,25
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	100	101,99	101,99
Pusdiklat Keuangan Umum	100	101,99	101,99
PKN STAN	100	101,99	101,99

Untuk unit eselon II di BPPK selain Sekretariat BPPK dan Pusdiklat BC tidak memiliki nilai Tingkat Kelulusan WBBM di TPN sehingga realisasi untuk komponen ZI WBK WBBM hanya

berasal dari Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM dan Keberlanjutan ZI WBK WBBM sehingga realisasi komponen 2 adalah sebesar 103,48% dengan target sebesar 100% maka capaian komponen 2 adalah 103,48 sehingga realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi pada unit eselon II selain Sekretariat BPPK dan Pusdiklat BC adalah (100,49 + 103,48) : 2 = 101,99.

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks integritas organisasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPPK, yaitu :

1. Upaya mempertahankan dan meningkatkan indeks SPI (indeks 2023 < indeks 2022)
2. Adanya perubahan dalam tata kelola WBK/WBBM yang ditetapkan dalam KMK 395/2024

Berikut ini adalah beberapa kegiatan/*extra effort* yang dilaksanakan oleh BPPK dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Indeks Integritas Organisasi

- Terkait hasil Survei Penilaian Integritas
  a. Penyusunan Matriks *Action Plan* SPI 2023;
  b. Pelaksanaan sosialisasi antikorupsi internal Sekretariat Badan pada tanggal 29 Mei 2024 dan sosialisasi eksternal pada 25 Juni 2024. Pelaksanaan sosialisasi telah memenuhi standar pedoman pelaksanaan sosialisasi antikorupsi;
  c. Penyusunan daftar responden internal dan eksternal untuk SPI 2024.
  d. Pelaksanaan survei *self-assesment* integritas;
  e. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut rekomendasi SPI 2023 dengan seluruh unit.
- Terkait pelaksanaan monev WBK dan progress WBBM
  a. Pendampingan Pelaksanaan survei mandiri oleh unit peserta penilaian WBBM dan Monev WBK;
  b. Pelaksanaan asistensi dan *Desk Evaluation* Penilaian WBBM Pusdiklat BC oleh Tim Penilai Unit Eselon I (s.d. 17 Maret) serta *submit* ke Tim Penilai Kementerian;
  c. Pengisian Lembar Kerja Pemantauan dan Evaluasi (LKPE) oleh unit peserta Monev WBK;
  d. Pelaksanaan *desk evaluation* unit peserta monev WBK oleh TPUE1;
  e. Pelaksanaan simulasi wawancara dalam rangka persiapan WBBM Pusdiklat BC;

f. Pendampingan proses penilaian WBBM Pusdiklat BC oleh Bidang SDMKI selama proses *field evaluation*.

5. Analisis atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Terdapat dua kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Indeks Integritas Organisasi. *Risk Event* yang pertama adalah adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, level risiko ini turun ke level rendah dengan besaran risiko 11 dan sesuai dengan besaran risiko residual yang diproyeksikan pada awal tahun. Penurunan besaran dan level risiko dengan mempertimbangkan upaya preventif dalam rangka mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Penurunan besaran dan level risiko juga dengan melihat tidak terdapatnya pengaduan berindikasi *fraud* sampai dengan periode triwulan IV yang menjadi IRU di dalam risiko ini.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyampaian program pengendalian gratifikasi dan pedoman kegiatan sosialisasi antikorupsi;
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi antikorupsi dan *integrity sharing* di lingkungan BPPK;
3. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi pencegahan/anti korupsi yang dilakukan setiap unit di BPPK;
4. Penyampaian imbauan dalam menghadapi hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya sepanjang tahun;
5. Program *know your employee.*

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan tren risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum sepanjang tahun 2024.

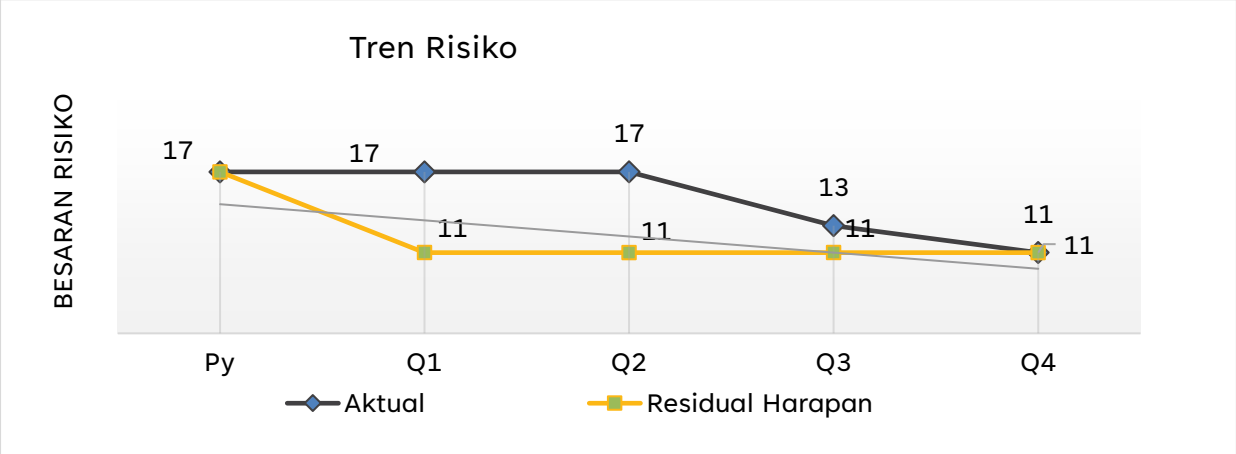

Pada tahun 2025, risiko diproyeksikan akan kembali pada **level risiko tinggi** (besaran risiko 16 s.d. 19). Hal ini dikarenakan sesuai amanat dari SE-2/2023, meskipun data historis menunjukkan bahwa frekuensi kejadian risiko rendah, namun potensi dampak dari risiko tersebut berada pada level signifikan. Mengingat risiko *fraud* memiliki dampak yang berakibat pada *multiplier effect,* tidak hanya meruntuhkan kepercayaan masyarakat, namun juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan bernegara. Rekomendasi pada tahun 2025 dalam rangka memitigasi risiko ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pelaksanaan kegiatan pencegahan fraud yang melibatkan seluruh unit dan masyarakat pengguna serta mitra.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan sosialisasi pencegahan yang dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua.
3. Melaksanakan penanganan pengaduan melalui investigasi dan *spot check* ke lokasi kejadian, bila ada.

Risk Event yang kedua adalah risiko Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Sampai dengan triwulan IV, level dan besaran risiko loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi **tetap** pada level **tinggi** dengan **besaran risiko 18** (sama dengan besaran risiko di Q2 dan Q3). Besaran risiko pada akhir tahun ini **lebih tinggi** dibandingkan besaran risiko residual yang diharapkan pada awal tahun 2024 (besaran risiko **11**). Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2024, terdapat total 13 (tiga belas) pelanggaran disiplin *non-fraud* dari ringan sampai dengan berat, dan 23 (dua puluh tiga) pelanggaran kode etik dan perilaku. IRU pada triwulan IV 2024 berada pada status awas. Jumlah dugaan pelanggaran disiplin pada akhir tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kasus.

Berikut ini adalah mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental (bintal) dan penguatan budaya oleh para pejabat secara berjenjang;
2. Program *know your employee;*
3. Penyampaian program pengendalian gratifikasi dan pedoman kegiatan sosialisasi antikorupsi 2024;
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi antikorupsi dan *integrity sharing* masing-masing unit di lingkungan BPPK;
5. *Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi pencegahan/anti korupsi yang dilakukan setiap unit di BPPK;
6. Penyampaian imbauan dalam menghadapi hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya sepanjang tahun 2024;
7. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Penguatan Disiplin PNS serta kode etik dan kode perilaku pegawai;
8. Pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai;
9. Pemantauan Tindak Lanjut Satuan Pengawas Internal (SPI).

Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren risiko Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi sepanjang tahun 2024.

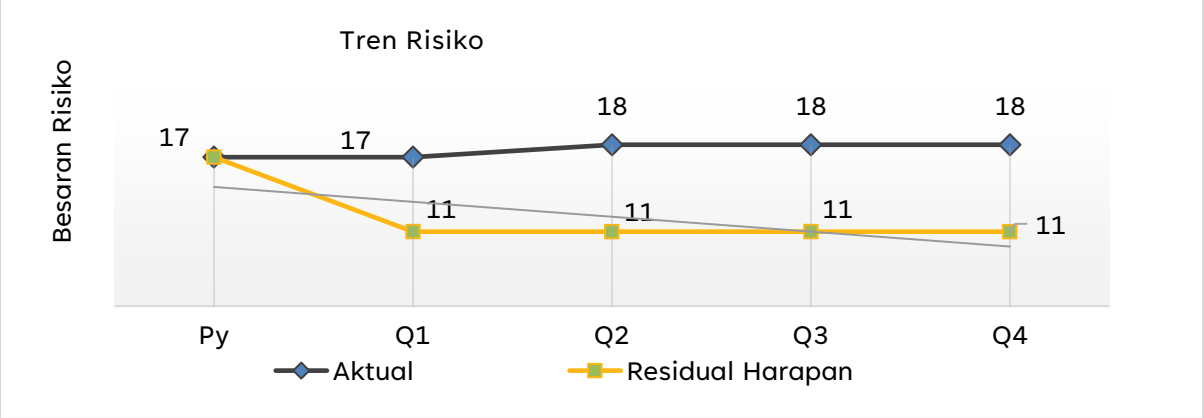

Dikarenakan tingginya jumlah kasus pelanggaran pada tahun 2024, dan masih ada kasus yang belum diselesaikan pada akhir tahun 2024, risiko ini diproyeksikan akan tetap pada level **tinggi** (besaran risiko antara 16 s.d 19) di tahun 2025. Adapun rekomendasi yang disusun untuk periode tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penyebarluasan **pengumuman atas pelanggara**n disiplin serta kode etik dan perilaku untuk diketahui oleh setiap pegawai, agar menjadi perhatian bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mitigasi risiko di tahun mendatang perlu difokuskan pada sosialisasi mengenai hukuman disiplin serta pemantauan kode etik dan prilaku serta disiplin pegawai.

6. Rencana Aksi

Adapun rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Sosialisasi kepada para pegawai terkait SPI 2024 pada pekan terakhir September s.d. Oktober 2024	Sekretariat BPPK	2025
2.	Pendampingan persiapan unit di BPPK yang mengusulkan WBK/WBBM		

1c-N Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

1. Definisi IKU

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW

berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

Pada BPPK layanan yang diukur adalah layanan SPMB PKN STAN dan layanan Pelatihan Klasikal.

2. Formula IKU

Triwulan I, II dan III

$$\frac{\dot{x}: \text{Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas}}{\dot{y}: \text{Seluruh saldo rekomendasi SKPL yang belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan}}$$

Triwulan IV

Bobot Komponen I + Komponen II + Komponen III

Komponen I : IKPL (Bobot 85%)

	Condition	IKPL - Bobot 85% (Target 4,36)
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.36)	(α : 4,36)*100%
Layer 2	IKPL (>4.36 s.d. 4.46)	((α - 4,36)/0,1)*5% + 100%
Layer 3	IKPL (>4.46 s.d. 4.56)	((α - 4,46)/0,1)*5% + 105%
Layer 4	IKPL (>4.56 s.d. 4.61)	((α - 4,56)/0,05)*5% + 110%
Layer 5	IKPL (>4.61 s.d. 5.00)	((α - 4,61)/0,4)*5% + 115%

Komponen II : Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Bobot 5%)

$$SKPK = \frac{IKPK}{4{,}00}\ x\ 100\%$$

Target 4,00

Komponen III : Penyelesaian Tindak Lanjut (Bobot 10%)

$$Tindak\ Lanjut = \frac{Capaian\ Tindak\ Lanjut}{85\%}\ x\ 100\%$$

Target 85%

3. Perhitungan Capaian IKU

Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SDM Keuangan Negara yang Kompeten 1c-N Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	40%	100%	100%	100%	100%	115,83	115,83	Max/TLKV
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**115,83**	**115,83**	

Survei kepuasan pengguna layanan BPPK tahun 2024 diikuti oleh 378 responden dimana 278 responden merupakan pengguna Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sedangkan 100 responden merupakan pengguna Layanan Pembelajaran Klasikal.
Realisasi IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.

Unit	Layanan	IKPL (85%)		IKPK (5%)		Tinjut (10%)		Realisasi s.d. Q4
		Hasil Indeks	Nilai	Hasil Indeks	Nilai	Hasil Persentase	Nilai	
Pusdiklat, BDK	**Klasikal**	4,86	118,21	4,18	104,50	100%	117,65	117,46
PKN STAN	**SPMB**	4,66	115,64	4,18	104,50	100%	117,65	115,28
BPPK		**4,71**	**116,28**	**4,18**	**104,50**	**100%**	**117,65**	**115,83**

Adapun perbandingan indeks kepuasan pada unit-unit eselon I di Kemenkeu adalah sebagai berikut.

Unit	Indeks	Permen	Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Setjen	4,43	3,575	89,37	A	Sangat Baik
DJA	4,45	3,590	89,74	A	Sangat Baik
DJP	4,28	3,462	86,55	B	Baik
DJBC	4,50	3,622	90,55	A	Sangat Baik
DJPB	4,69	3,766	94,14	A	Sangat Baik
DJKN	4,58	3,687	92,16	A	Sangat Baik
DJPK	4,39	3,545	88,63	A	Sangat Baik
DJPPR	4,54	3,657	91,43	A	Sangat Baik
Itjen	4,76	3,822	95,54	A	Sangat Baik
BPPK	4,71	3,786	94,65	A	Sangat Baik
LNSW	4,43	3,569	89,22	A	Sangat Baik
BKF	4,61	3,704	92,60	A	Sangat Baik

IKU SKPL dan Pemangku Kepentingan merupakan IKU baru dimana IKU ini mengalami reformulasi dari IKU Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2023 sehingga untuk target dan realisasi tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Namun salah satu komponen penghitungan IKU ini yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan IKU yang telah diterapkan sebelumnya di BPPK sehingga dapat dilihat perbandingannya. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan pengguna layanan.

Tabel 3. 7 : Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	4,00	-	4,00	-	4,00	4.41

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2021	4,05	-	4,05	-	4,41	4,63
2022	4,10	-	4,10	-	4,57	4,58
2023	4,15	-	4,15	-	4,35	4,67
2024	4,20	-	4,20	-	4,36	4,71

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	-	-	-
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	100%	117,46%	117,46
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	117,46%	117,46
Pusdiklat Pajak	100%	117,46%	117,46
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	117,46%	117,46
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	100%	117,46%	117,46
Pusdiklat Keuangan Umum	100%	117,46%	117,46
PKN STAN	100%	115,28%	115,28

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan tidak terdapat pada Sekretariat BPPK. Realisasi IKU tersebut di PKN STAN berbeda dengan unit eselon II lainnya karena layanan yang dinilai di PKN STAN juga berbeda dengan unit eselon II lainnya dimana pada unit eselon II lainnya layanan yang dinilai adalah layanan pelatihan klasikal sedangkan pada PKN STAN adalah layanan SMPB PKN STAN.

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan (seperti penentuan responden, instrumen, *draft* temuan) ditentukan oleh Tim Peneliti UGM.

Adapun dalam rangka pencapaian IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, BPPK telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Penyampaian layanan dan *Liasion Officers* (Subbagian PKR-Bagian OTL) dalam rangka pelaksanaan SKPLPK 2024;
2. Pembahasan tindak lanjut hasil SKPL Tahun 2023 dengan Biro Organta dan Unit Terkait;
3. Pelaksanaan sosialisasi pedoman pelayanan publik;
4. Pengiriman *longlist* responden survei;
5. Permintaan *shortlist* responden survei Pengguna Layanan (PL) dan PK (Pemangku Kepentingan) dari Tim Peneliti UGM;
6. Pelaksanaan koordinasi terkait penggalian data layanan SPMB dengan PKN STAN pada tanggal 16 Juli 2024
7. Pendampingan proses penggalian data layanan SPMB PKN STAN pada tanggal 19 Juli 2024
8. Pemantauan proses penggalian data layanan pelatihan klasikal yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti UGM
9. Pendampingan pelaksanaan penggalian data melalui survei pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada bulan September 2024
10. Hasil pendampingan penggalian data menghasilkan response rate yang relatif tinggi yakni lebih dari 90% untuk layanan BPPK.

5. Rencana Aksi

IKU ini akan diterapkan kembali di tahun 2025. Berikut ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pelaksanaan layanan BPPK tahun 2025	Seluruh unit	2025
2.	Pengukuran SKPLK tahun 2025	BPPK dan Setjen	

1d-N Persentase alumni yang meningkat kinerjanya

1. Definisi IKU

IKU ini merupakan bentuk evaluasi untuk mengukur dampak pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu dan mengukur kuantitaf program yang dilakukan epaspem s.d. dampak pembelajaran

Pengukuran dampak pembelajaran dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian *leading indicator, desired result*, isolasi/group *control, trend lines* dan penilaian dari atasan.
Evaluasi dilakukan 3-5 bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan.

Objek Evaluasi

- Pemilihan objek pelatihan dikaitkan dengan tujuan organisasi dalam konsep Renstra masing-masing unit eselon I yang menjadi mitra utama.
- Alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran.
- Alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran.
- Alumni pelatihan yang diukur harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Alat Evaluasi

- Indikator keberhasilan dampak pembelajaran adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.

- Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.

Lain-lain

- Penetapan pelatihan yang akan dievaluasi dan indikator yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran).
- Dalam hal data awal tidak tersedia, dapat menggunakan alternatif:
  a. Menggunakan data standar yang telah tersedia (contoh: SKTJ untuk jabatan tsb, IKU, dan sebagainya.)
  b. Menggunakan nilai rata-rata kinerja peer yang sejenis pada lokasi kantor yang sama
  c. Menggunakan nilai standar yang ditentukan oleh unit teknis terkait.
- Program yang dievaluasi pascapembelajaran s.d. dampak pembelajaran pada tahun 2024 adalah Program AKP Strategis dan/atau seluruh program yang pada KAP nya tercantum evaluasi sampai dengan dampak pembelajaran (sesuai dengan kesepakatan dengan Unit Eselon I, dilakukan revisi KAP jika dibutuhkan).

Program yang dievaluasi pascapembelajaran s.d. dampak pembelajaran pada tahun 2024 adalah Program AKP Strategis dan/atau seluruh program yang pada KAP nya tercantum evaluasi sampai dengan dampak pembelajaran (sesuai dengan kesepakatan dengan Unit Eselon I, dilakukan revisi KAP jika dibutuhkan).

2. Formula IKU

Realisasi Q1:
Jika telah dilakukan persiapan pengukuran Epaspem level 4 (penyusunan instrumen penilaian dan/atau persiapan kegiatan Epaspem lainnya), realisasi = 90%

Realisasi Q2 dan Q3
(100% x Komponen A)

Realisasi Q4
(50% x Komponen A) + (50% x Komponen B)

Komponen A: Peserta yang meningkat kinerjanya / Peserta yang lulus pembelajaran x 100%

Peserta yang dihitung sebagai lulus pembelajaran adalah seluruh peserta pelatihan yang lulus pembelajaran dikurangi peserta yang mendapatkan pengecualian dari perhitungan, yaitu peserta yang Tugas Belajar, Mutasi, CTLN, dan CB.

Komponen B: Jumlah Program yang dievaluasi s.d dampak pembelajaran/ Target Jumlah Program Evaluasi Dampak Pembelajaran x 100%

-Target Program Epaspem Dampak Pembelajaran tahun 2024 adalah 3 Program untuk masing-masing Pusdiklat, total BPPK 15 Program.

-Jumlah program yang dievaluasi s.d. dampak pembelajaran adalah jumlah program pembelajaran yang dilakukan kegiatan epaspemnya pada tahun 2024, baik di Semester I ataupun Semester II, baik berasal dari pelatihan yang diselenggarakan tahun 2023, maupun tahun 2024.

3. Perhitungan Capaian IKU

Target dan Realisasi IKU Persentase alumni yang meningkat kinerjanya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SDM Keuangan Negara yang Kompeten 1d-N Persentase alumni yang meningkat kinerjanya							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	90%	96,19%	96,19%	96,28%	96,28%	104,72%	104,72%	Max/TLKV
Capaian	100	106,88	106,88	106,98	106,98	116,36	116,36	

Terdapat 788 alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya dari 881 peserta yang lulus pembelajaran dan diukur evaluasi pasca-pembelajarannya, sehingga realisasi komponen A bernilai 89,44%.

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
1	Pusdiklat KM	PKA Angkatan X	54	54	100.00%
	Pusdiklat KM	PKA Angkatan XI	32	28	87.50%
	Pusdiklat KM	PKP Angkatan XVI s.d. XVIII	85	81	95.29%
	Pusdiklat KM	PKP Angkatan XIX	29	29	100.00%
	Pusdiklat KM	ToT Effective Communication and negotiation skill	72	68	94.44%
2	Pusdiklat AP	Pelatihan Jarak Jauh Public Expenditure Review	7	7	100.00%
	Pusdiklat AP	PJJ Penilaian pengendalian Intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	43	36	83.72%
	Pusdiklat AP	PJJ Perencanaan penganggaran bagi Kasubbag Umum	56	46	82.14%
	Pusdiklat AP	Training of Trainers Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	39	21	53.85%
3	Pusdiklat Pajak	PJJ Sistem Informasi Geografis Angkatan I s.d. IV	68	62	91.18%
	Pusdiklat Pajak	PJJ Penugasan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet	48	42	87.50%
	Pusdiklat Pajak	PJJ Jurusita Pajak II	23	23	100.00%
4	Pusdiklat BC	Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Mutu dan Keselamatan Kerja Laboratorium Pengujian Bea dan Cukai Standar ISO/EIC 17025:2017	30	29	96.67%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat BC	Pelatihan teknis intelijen analisis	27	20	74.07%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Jarak jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	23	15	65.22%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Mirror Analysis di Bidang Kepabeanan dan Cukai	27	20	74.07%
5	Pusdiklat KNPK	Pelatihan kemampuan menulis tingkat dasar untuk Jabfung AKPD	5	5	100.00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan peningkatan kompetensi Jabfung Pelelang Ahli Muda	28	28	100.00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan peningkatan kompetensi Jabfung Pelelang Ahli Madya	20	20	100.00%
	Pusdiklat KNPK	PJJ Penilaian dalam rangka sewa	16	16	100.00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan penguatan kompetensi pejabat fungsional penilai pemerintah ahli pertama (blended learning)	12	12	100.00%
6	Pusdiklat KU	Pelatihan Event Management (Evaluasi Dampak)	8	8	100.00%
	Pusdiklat KU	PJJ Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data Tingkat Lanjutan	26	23	88.46%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KU	PJJ Implementasi *Learning Organization* dan *Knowledge Management*	17	16	94.12%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan *Assessment Framework* Penerbitan *Sustainablity Linked* Sukuk	27	26	96.30%
	Pusdiklat KU	Pelatihan penguatan strategi komunikasi (evaluasi dampak)	26	22	84.62%
	Pusdiklat KU	Pelatihan penyusunan pengukuran kompetensi *tools* teknis	21	19	90.48%
	Pusdiklat KU	Pelatihan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan berbasis ESG	12	12	100.00%
	BPPK	**TOTAL**	**881**	**788**	**89.44%**

Sepanjang tahun 2024 terdapat 26 (dua puluh enam) program pembelajaran yang telah diukur Epaspemnya s.d. level 4, dengan pelatihan berasal dari Pusdiklat KM (3 program), Pusdiklat AP (4 program), Pusdiklat BC (4 program),Pusdiklat Pajak (3 program), Pusdiklat KNPK (5 program) dan Pusdiklat KU (7 program)sehingga komponen B bernilai 120%.

No	Unit	Jumlah Program	Target Program	Nilai Komponen B	Nilai Komponen B (konversi)
1	Pusdiklat KM	3	3	100,00%	100.00%
2	Pusdiklat AP	4	3	133,33%	120.00%
3	Pusdiklat Pajak	3	3	100,00%	100.00%
4	Pusdiklat BC	4	3	133,33%	120.00%

No	Unit	Jumlah Program	Target Program	Nilai Komponen B	Nilai Komponen B (konversi)
5	Pusdiklat KNPK	5	3	166,67%	120.00%
6	Pusdiklat KU	7	3	233,33%	120.00%
	BPPK	**26**	**18**	**144,44%**	**120.00%**

Realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah sebagai berikut.

(50% x Komponen A) + (50% x Komponen B)

(50% x 89,44%) + (50% x 120%) = 104,72%

IKU ini mengalami reformulasi di Tahun 2024 sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi IKU Persentase alumni yang meningkat kinerjanya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3. 8 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase alumni yang meningkat kinerjanya

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	75%	90%	90%	-	90%	99,36%
2021	77%	80%	80%	-	80%	89,34%
2022	80%	82%	82%	-	82%	88,78%
2023	82%	85%	85%	-	85%	91,49%
2024	85%	90%	87%	-	90%	104,72%

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Persentase alumni yang meningkat kinerjanya pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	-	-	-
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	-	97,79%	108,66
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	90%	97,93%	108,81
Pusdiklat Pajak	90%	95,68%	106,31
Pusdiklat Bea dan Cukai	90%	99,25%	110,28
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	90%	110,00%	122,22 (konversi:120)
Pusdiklat Keuangan Umum	90%	105,99%	117,76
PKN STAN	-	-	-

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Persentase alumni yang meningkat kinerjanya terdapat kendala yang dihadapi oleh BPPK, yaitu:

1. Reformulasi IKU memiliki tantangan tersendiri karena pengiriman peserta dan pemanfaatan alumni merupakan kebijakan dari masing-masing Unit Eselon I;
2. Proses pengumpulan data Epaspem juga menjadi tantangan tersendiri terutama pasca *piloting* mekanisme kerja baru dengan pemindahan tusi kepada tim kerja pengelola pembelajaran.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU ini sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Epaspem level 4 periode Semester I dan II tahun 2024;
2. Penyelenggaran pelatihan untuk dilakukan Epaspem level 4 Semester II tahun 2024; dan
3. Pemantauan pelaksanaan Epaspem hingga level 4 ke masing-masing Pusdiklat pemilik program.

5. Rencana Aksi

IKU ini akan kembali diterapkan di BPPK pada tahun 2025. Berikut ini adalah rekomendasi Rencana Aksi yang disusun untuk periode berikutnya.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pelaksanaan AKP, Penyusunan Program dan Desain Pembelajaran	Pusdiklat	Sepanjang Tahun 2025
2.	Penyelenggaraan pelatihan	Pusdiklat dan BDK	
3.	Pengukuran dampak pembelajaran (Level 1 s.d. 4)	Pusdiklat	

SS-2. Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak

Program pengembangan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pengembangan kompetensi SDM pegawai yang selaras dengan kriteria pembelajaran Corpu yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (*impactfull*) sehingga tercipta *link and match* antara pembelajaran dengan kinerja organisasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut

Tabel 3. 9 : SS Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	**Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak**			**102,59**
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	365	366,40	100,38
2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%	95,36%	104,79

Indeks capaian pada SS ini pada tahun 2024 adalah **102,59**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS Program Pengembangan Keuangan Negara yang Berdampak adalah sebagai berikut.

2a-CP Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi

1. Deskripsi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kesiapan PKN STAN untuk akreditasi instansi. Hasil *Self Assessment* penilaian akreditasi Instansi PKN STAN sesuai dengan Standar Akreditasi. Nilai hasil akreditasi berdasarkan peraturan BANPT nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Skala penilaian:

1) Nilai 361 s.d. 400 → Unggul
2) Nilai 301 s.d. 360 → Baik Sekali
3) Nilai 200 s.d. 300 → Baik
4) Nilai <200 → Tidak terakreditasi

2. Formula IKU

Nilai hasil akreditasi berdasarkan peraturan BANPT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Skala penilaian:

1) Nilai 361 s.d. 400 → Unggul
2) Nilai 301 s.d. 360 → Baik Sekali
3) Nilai 200 s.d. 300 → Baik
4) Nilai <200 → Tidak terakreditasi

3. Perhitungan Capaian IKU

Target dan realisasi IKU Indels Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Vokasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak 2a-CP Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	310	320	320	330	330	365	365 (skala 400)	Max/TLKV
Realisasi	323	331,45	331,45	350,68	350,68	366,40	366,40	
Capaian	104,19	103,58	103,58	106,27	106,27	100,38	100,38	

Berikut ini adalah rincian realisasi IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi

No.	Bab/Kriteria	Skor Maks	Hasil Assessment
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	24	24
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	63	60,68
3	Mahasiswa	16	16
4	Sumber Daya Manusia	28	15,23
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	16	16
6	Pendidikan	40	40
7	Penelitian	20	20
8	Pengabdian kepada Masyarakat	20	20
9	Luaran Capaian Tridharma	173	154,49
	Total	400	366,40

IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi adalah IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan target dan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 10 : Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Vokasi

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	365	366,40

Pada unit eselon II BPPK, IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi hanya terdapat pada PKN STAN dimana target, realisasi dan capaiannya sama dengan level K-*One* (BPPK).

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi adalah sebagai berikut.

1. Belum terdapat dokumen pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) serta monev kemitraan yang komprehensif, rinci, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
2. Indikator terkait SDM/dosen merupakan *issue* yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu dekat (terkait Guru Besar dan/atau komposisi dosen);
3. Pembiayaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat masih sangat didominasi oleh pembiayaan oleh PKN STAN atau mandiri;
4. Sertifikasi kompetensi mahasiswa 2 tahun sebelumnya belum optimal.

Extra effort yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan tim akreditasi;

2. Pelaksanaan SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), Penelitian dan Pengmas (Pengabdian Masyarakat) sesuai dengan ketentuan;
3. Percepatan proses sertifikasi dosen;
4. Pelaksanaan *workshop* Akreditasi AACSB (*Association to Advance Collegiate School of Business*) dalam rangka persiapan pendaftaran member AACSB;
5. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Transformasi Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga dan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul dan Berintegritas;
6. Percepatan survei pengguna lulusan;
7. Pendampingan mahasiswa untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional; dan
8. Pelaksanaan sertifikasi untuk mahasiswa semester akhir.

5. Analisis Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu yang berpotensi berpengaruh terhadap sasaran organisasi Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak adalah Persentase alumni yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri. Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 risiko ini tetap berada pada level sedang dengan besaran risiko 12. Level kemungkinan tetap pada level 5 karena meskipun seluruh prodi telah melakukan sertifikasi kompetensi, tetapi total persentase mahasiswa yang pernah mengikuti sertifikasi dari seluruh prodi tersebut hanya di bawah 50% (terdapat beberapa sertifikasi di tahun 2025), sedangkan level Dampak tetap pada level 2.

Mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 agar risiko tetap berada pada level yang bisa diterima oleh organisasi adalah sebagai berikut.

1. Sertifikasi *Certified Government Accounting Associate* (US-CGAA) pada tanggal 26-27 Februari 2024
2. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran oleh Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara pada tanggal 18-22 Maret 2024
3. Sertifikasi lainnya seperti PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) bagi Mahasiswa Program Studi Diploma Manajemen Aset Publik (MAP).

Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren risiko Persentase alumni yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri.

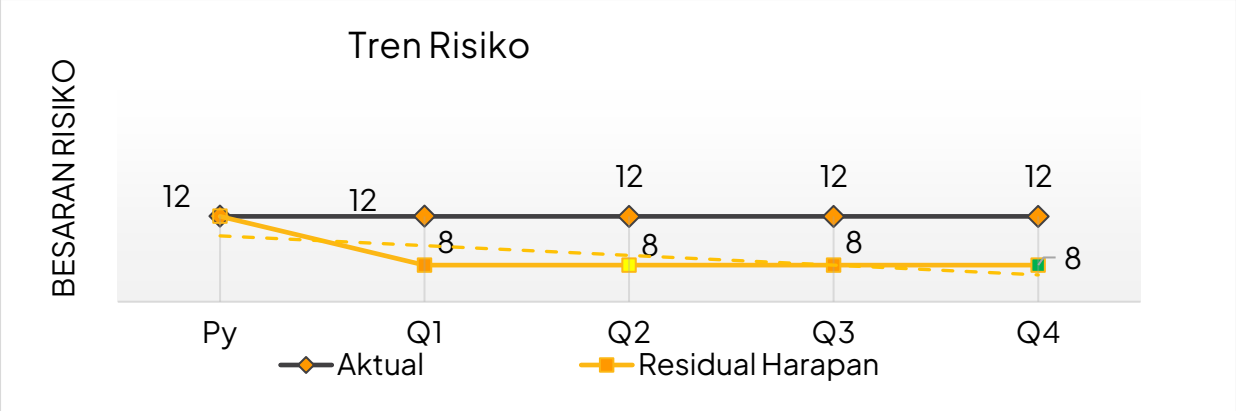

Adapun rekomendasi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan tambahan sertifikasi kompetensi/profesi/industri kepada mahasiswa di tahun mendatang;
2. Dapat mencari IRU baru yang lebih bisa memberikan sinyal awal terhadap besar atau turunnya tingkat keterjadian risiko.

6. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa mendatang adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Penataan dosen (*updating* formasi dan pemenuhan *gap*)	PKN STAN	2025
2.	Penetapan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan		
3.	Memperluas akses dosen untuk mendapat pembiayaan penelitian dan pengmas dari pihak eksternal		

2b-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. IKU ini merupakan hasil dari Evaluasi Perilaku Hasil Pembelajaran. Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat serta disepakati dengan unit pengguna. Pelatihan yang diukur dalam IKU ini adalah seluruh pelatihan yang dalam KAP-nya mencantumkan minimal evaluasi pembelajaran s.d. perilaku hasil pembelajaran.

Pelatihan yang diselenggarakan di BDK juga dihitung sebagai capaian Pusdiklat (klasikal dan PJJ). Responden dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran adalah alumni pelatihan, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°. Responden yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360° adalah apabila jumlah tanggapan responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei. Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilakukan pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta;
b. berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi pembelajaran; dan
c. melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diikuti.

Alumni yang memenuhi standar kompetensi pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta adalah apabila alumni tersebut berhasil lulus ujian atau berhasil mendapat peningkatan nilai dalam *pre-test* dan *post-test*. Alumni yang berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri adalah apabila alumni tersebut mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,40 (dengan skala interval 1-5) atas seluruh pertanyaan yang menggunakan skala berdasarkan *form* Asesmen Mandiri (Kepercayaan Diri, Komitmen, dan Perilaku) sesuai dengan PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Alumni yang melaksanakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran dibuktikan berdasarkan hasil rekapitulasi dari jawaban responden atas alumni tersebut atau berdasarkan data tugas dan fungsi dari unit kerja alumni.

Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan.

2. Formula IKU

Realisasi Q1 : Jika telah dilakukan persiapan pengukuran epaspem level 4 (penyusunan instrument penilaian dan/atau persiapan kegiatan epaspem lainnya), realisasi = 90%

Realisasi Q2, Q3, Q4 : Jumlah alumni pelatihan yang lulus Epaspem s.d. perilaku hasil pembelajaran / Jumlah alumni pelatihan yang lulus pembelajaran x 100%

3. Perhitungan Capaian IKU

Sepanjang tahun 2024, realisasi dan target dari IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Perilaku Kerjanya adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak 2b-N Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	
Realisasi	91%	95,92%	95,92%	95,55%	95,55%	95,36%	95,36%	Max/TLKV
Capaian	100	105,41	105,41	105,00	105,00	104,79	104,79	

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 telah dilakukan pengukuran Epaspem s.d. level 3 pada 93 program, pada program milik Pusdiklat KM (17 program), Pusdiklat AP (9 program), Pusdiklat BC (12 program), Pusdiklat Pajak (6 Program), Pusdiklat KNPK (16 program) dan Pusdiklat KU (33 program).

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
1	Pusdiklat KM	Pelatihan *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills* Tingkat Menengah	33	27	81,82%
	Pusdiklat KM	Pelatihan Jarak Jauh *Excellent Frontliners*	114	102	89,47%
	Pusdiklat KM	Pelatihan Jarak Jauh *Service Excellence* bagi *Frontliners* di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	22	21	95,45%
	Pusdiklat KM	Orientasi Pembentukan Karakter bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	727	704	96,84%
	Pusdiklat KM	Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Kerja dalam Implementasi *Flexible Working Space*	134	124	92,54%
	Pusdiklat KM	PKA Ak IX (BDPIM)	54	54	100,00%
	Pusdiklat KM	Pelatihan Peningkatan Kompetensi *Public Speaking* Tingkat Dasar (BDPIM)	76	60	78,95%
	Pusdiklat KM	Pelatihan Peningkatan Kompetensi *Interpersonal Skill for Professional Leader* (BDPIM)	78	70	89,74%
	Pusdiklat KM	PKP XVI s.d. XVIII (BDPIM)	85	83	97,65%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KM	Pelatihan Penguatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pasca Delayering	142	140	98,59%
	Pusdiklat KM	*Training of Trainers Contact Center*	15	15	100,00%
	Pusdiklat KM	*Training of Trainers Effective Communication and Negotiation Skills*	72	68	94,44%
	Pusdiklat KM	PJJ PS (BDK)	82	77	93,90%
	Pusdiklat KM	PKA XI (BDPIM)	32	30	93,75%
	Pusdiklat KM	PKP XIX (BDPIM)	29	29	100,00%
	Pusdiklat KM	PJJ PS (BDPIM)	101	76	75,25%
	Pusdiklat KM	PJJ IS (BDPIM)	58	50	86,21%
2	Pusdiklat AP	Pelatihan Jarak Jauh Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	43	41	95,35%
	Pusdiklat AP	Pelatihan Jarak Jauh *Public Expenditure Review*	7	7	100,00%
	Pusdiklat AP	Training of Facilitator Program Standardisasi Kompetensi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	55	52	94,55%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat AP	*Training of Facilitator* Program Standardisasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen	26	23	88,46%
	Pusdiklat AP	PJJ Perencanaan penganggaran bagi Kasubbag Umum	56	48	85,71%
	Pusdiklat AP	*Training of Trainers* Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran	39	35	89,74%
	Pusdiklat AP	Pelatihan Asistensi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	33	30	90,91%
	Pusdiklat AP	Pelatihan *Local Economic Empowerment*	36	33	91,67%
	Pusdiklat AP	Pelatihan *Corporate Governance* (SPI) BLU	15	14	93,33%
3	Pusdiklat Pajak	Pelatihan teknik beracara di pengadilan pajak angkatan I dan II	47	44	93,62%
	Pusdiklat Pajak	PJJ Penggalian Potensi Pajak Sektor Asuransi Jiwa dan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Angkatan I dan II	46	46	100,00%
	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Perdagangan Otomotif Angkatan I dan II	47	44	93,62%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis Angkatan I s.d. IV	71	68	95,77%
	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet	52	52	100,00%
	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak II	25	23	92,00%
4	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut	21	21	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Mutu dan Keselamatan Kerja Laboratorium Pengujian Bea dan Cukai Standar ISO/EIC 17025:2017	30	30	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan *Teknis Analysis & Targeting Drugs Enforcement* Angkatan II	28	28	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Jarak Jauh Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai	44	44	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak DJBC	10	10	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Ekspor	44	42	95,45%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Penguatan Karakter Pegawai Kementerian Keuangan	453	453	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Pengolahan Data Audit Kepabeanan dan Cukai	5	5	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Pengembangan Aplikasi Berbasis Platform CEISA 4.0 (Blended Learning)	27	27	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Intelijen Analis	27	27	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Jarak jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	23	23	100,00%
	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis *Mirror Analysis* di Bidang Kepabeanan dan Cukai	27	27	100,00%
5	Pusdiklat KNPK	Pelatihan kemampuan menulis tingkat dasar untuk Jabfung AKPD	11	10	90,91%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 2023 di BDK Medan	17	17	100,00%
	Pusdiklat KNPK	*E Learning* Dasar Pemeriksaan lelang	25	25	100,00%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KNPK	Lokakarya RUU Pelelangan	29	29	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Peningkatan Komp Jabfung Pelelang Ahli Muda	28	28	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Peningkatan Komp Jabfung Pelelang Ahli Madya	20	20	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Penilaian Properti Khusus Benda Muatan Kapal Tenggelam Tahun 2024	25	25	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Lokakarya Pengetahuan Dasar *Liquified Natural Gas* (LNG) Tahun 2024	15	15	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Lokakarya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Tahun 2024	25	25	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Jarak Jauh Metodologi Survei dan Riset Pasar Properti Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Angkatan I	25	25	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Pengukuran Dampak Sosial dan Ekonomi dengan Metode *Computable General Equilibrium* (CGE)	9	9	100,00%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Jarak Jauh Penilaian dalam rangka Sewa	23	23	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Penguatan Kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama (*Blended Learning*)	27	27	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Evaluasi Dampak atas Implementasi Kebijakan di Bidang HKPD *Regulatory Impact Analysis* Tahun 2024	7	7	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pegawai DJPB Angkatan I Tahun 2024	33	33	100,00%
	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pegawai DJPB Angkatan II 2024	25	25	100,00%
6	Pusdiklat KU	Pelatihan Event Management (Evaluasi Dampak)	8	8	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data Tingkat Lanjutan	26	23	88,46%
	Pusdiklat KU	PJJ Implementasi *Learning Organization* dan *Knowledge Management*	17	16	94,12%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan *Assessment Framework* Penerbitan *Sustainability Linked* Sukuk	27	26	96,30%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penguatan Strategi Komunikasi (Evaluasi Dampak)	26	24	92,31%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan *Tools* Pengukuran Kompetensi Teknis	21	19	90,48%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan Pedoman Pengawasan Kegiatan Berbasis ESG	12	12	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ Implementasi *Learning Organization* dan *Knowledge Management*	17	16	94,12%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan *Assessment Framework* Penerbitan *Sustainability Linked* Sukuk	27	26	96,30%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penguatan Strategi Komunikasi (Evaluasi Dampak)	26	24	92,31%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan *Tools* Pengukuran Kompetensi Teknis	21	19	90,48%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan Pedoman Pengawasan Kegiatan Berbasis ESG	12	12	100,00%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KU	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif di *Learning Management System* (LMS)	15	15	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ Pengelolaan SIstem Kerja Pasca-delayering (untuk DJPK)	19	19	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ Penguatan Media Sosial	47	43	91,49%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan IT Masterplan dengan Pendekatan *Enterprise Architecture*	14	13	92,86%
	Pusdiklat KU	PJJ Penyusunan Proposal Inovasi	47	42	89,36%
	Pusdiklat KU	PJJ Manajemen Pengetahuan	27	26	96,30%
	Pusdiklat KU	PJJ Ekonometrika Tingkat Lanjutan	35	34	97,14%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Advokasi Hukum	10	10	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ *Employee Advocacy* Melalui Media Social	48	45	93,75%
	Pusdiklat KU	PJJ Evaluasi Regulasi	11	10	90,91%
	Pusdiklat KU	Pelatihan *Treasury Data Analysis (Machine Learning)*	12	12	100,00%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Data *Engineer*	20	19	95,00%

No	Unit	Nama Pelatihan	Peserta Lulus	Peserta Meningkat	Persentase
	Pusdiklat KU	Pelatihan Manajemen Stratejik Kehumasan	27	26	96,30%
	Pusdiklat KU	PJJ Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI) Kelas Reguler	30	30	100,00%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Penguatan Kompetensi *Scrum Fundamental*	22	20	90,91%
	Pusdiklat KU	Pelatihan Pengendalian Keamanan Informasi dan *Database*	20	20	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ Manajemen Stratejik (Evaluasi Level 3)	23	22	95,65%
	Pusdiklat KU	PJJ Tata Naskah Dinas	75	73	97,33%
	Pusdiklat KU	PJJ Manajemen Kinerja	96	96	100,00%
	Pusdiklat KU	PJJ Desain Presentasi	59	54	91,53%
	Pusdiklat KU	PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan	70	69	98,57%
	BPPK	TOTAL	4502	4293	95,36%

No	Unit	Lulus Pembelajaran (lv.2)	Meningkat Kualitas perilaku kerjanya (lv.3)	Realisasi
1	Pusdiklat KM	1854	1730	93,31%
2	Pusdiklat AP	310	283	91,29%
3	Pusdiklat Pajak	288	277	96,18%
4	Pusdiklat BC	739	737	99,73%
5	Pusdiklat KNPK	344	343	99,71%

No	Unit	Lulus Pembelajaran (lv.2)	Meningkat Kualitas perilaku kerjanya (lv.3)	Realisasi
6	Pusdiklat KU	967	923	95,45%
	BPPK	**4502**	**4293**	**95,36%**

Terdapat 4.293 alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya, dari 4.502 lulusan pembelajaran yang diukur. sehingga realisasi IKU ini adalah 95,36%.

IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Perilaku Kerjanya mengalami reformulasi pada Tahun 2024 sehingga target dan realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya secara langsung. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi IKU ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Perilaku Kerjanya

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja BPPK	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	77%	77%	-	85%	99,51%
2021	-	84%	84%	-	84%	98,37%
2022	-	85%	82%	-	85%	98,85%
2023	-	86%	86%	-	87%	94,48%
2024	-	87%	87%	-	91%	95,36%

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Perilaku Kerjanya pada unit Eselon II di BPPK. IKU ini tidak terdapat pada Sekretariat BPPK dan PKN STAN.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	-	-	-
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	91%	93,31%	102,54
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	91%	91,29%	100,32
Pusdiklat Pajak	91%	96,18%	105,69
Pusdiklat Bea dan Cukai	91%	99,73%	109,59
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	91%	99,71%	109,57
Pusdiklat Keuangan Umum	91%	95,45%	104,89
PKN STAN	-	-	-

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi BPPK dalam pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Terdapat reformulasi IKU sehingga terdapat tantangan tersendiri karena pengiriman peserta dan pemanfaatan alumni merupakan kebijakan dari masing-masing Unit Eselon I;
2. Proses pengumpulan data Epaspem juga menjadi tantangan tersendiri terutama pasca *piloting* mekanisme kerja baru dengan pemindahan tusi kepada tim kerja pengelola pembelajaran.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPPK dalam rangka pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Epaspem level 3 periode Semester I dan II tahun 2024;
2. Penyelenggaran pelatihan yang akan dilakukan Epaspem level 3 Semester II tahun 2024; dan
3. Berkoordinasi dengan PIC Kepegawaian dari unit responden untuk dapat melakukan *updating* responden yang telah mengisi kuisioner dan mengingatkan responden yang belum mengisi kuesioner.

5. Rencana Aksi

IKU ini masih akan dimiliki oleh BPPK ditahun 2025, adapun rencana aksi disusun untuk dilaksanakan di masa mendatang adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pelaksanaan AKP, Penyusunan Program dan Desain Pembelajaran	Pusdiklat	Sepanjang Tahun 2025
2.	Penyelenggaraan pelatihan yang akan dilakukan evaluasi sampai dengan level 3	Pusdiklat dan BDK	
3.	Pelaksanaan evaluasi pembelajaran (Level 1 s.d. 3)	Pusdiklat	

SS-3. Perencanaan Pembelajaran yang Sesuai Kebutuhan

Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan adalah perencanaan pembelajaran yang mengedepankan prinsip *link and match* antara kebutuhan pengembangan pegawai dengan sasaran organisasi. Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan akan menghasilkan desain dan materi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan pengembangan dimaksud

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut sebagai berikut.

Tabel 3. 12: SS Perencanaan Pembelajaran yang Sesuai Kebutuhan

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	**Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan**			**120**
3a-N	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85%	116,27%	120* (setelah konversi)

* Capaian tersebut merupakan capaian setelah dikonversi maksimal 120. Capaian asli adalah 136,79

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120**. Adapun perincian dan IKU adalah sebagai berikut.

.

3a-N Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran

1. Definisi IKU

Tujuan dari IKU Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran adalah untuk mengukur ketepatan pemenuhan peserta, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kesesuaian kualifikasi. Selain itu IKU ini juga mengukur ketepatan waktu analisis kebutuhan pembelajaran (AKP), yakni pada proses verifikasi data AKP yang dilakukan oleh masing-masing Pusdiklat. AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU diturunkan ke Sekretariat BPPK dan Pusdiklat. Sekretariat BPPK dari sisi sebagai pengguna (pengumpulan data AKP dan realisasi peserta pelatihan dari BPPK) dan Pusdiklat dari sisi sebagai pengelola (verifikasi data AKP dan realisasi program dari UE 1 Mitra masing-masing Pusdiklat)

Sebagai Pengelola pengukuran dilakukan terhadap: ketepatan pemenuhan program pembelajaran baik jumlah ataupun jadwal pelaksanaannya untuk hasil AKP Reguler tahun 2024; Sebagai pengguna pengukuran dilakukan terhadap ketepatan pemenuhan peserta dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi data AKP.

2. Formula IKU

Realisasi Q1 dan Q2 = 100% Nilai ketepatan pemenuhan program pembelajaran

Realisasi Q3, Q4 = 80% Nilai ketepatan pemenuhan program dan peserta pembelajaran + 20% Nilai ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi data AKP

Nilai ketepatan waktu pelaskanaan kegiatan verifikasi data AKP = Sesuai lini masa pada PMK-45/PMK.011/2018, batas waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi data AKP diselesaikan adalah sampai dengan bulan Juli tahun n-1.

Nilai: kegiatan verifikasi data AKP dilakukan pada:
a. > 7 hari kalender sebelum 31 Juli: 120
b. <= 7 hari kalender sebelum 31 Juli: 110
c. diselesaikan pada 31 Juli : 100
d. >= 7 hari kalender setelah 31 Juli: 90
e. > 7 hari kalender setelah 31 Juli: 80
Kegiatan verifikasi data AKP yang dinilai adalah kegiatan verifikasi data AKP yang terakhir diselenggarakan dengan bukti berupa undangan, daftar hadir, notula, dan/atau rekaman kegiatan verifikasi.

3. Perhitungan Capaian IKU

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran pada tahun 2024.

BPPK	SS: Perencanaan Pembelajaran yang sesuai dengan Kebutuhan 3a-N Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Realisasi	100,64%	106,35%	106,35%	114,70%	114,70%	116,27%	116,27%	Max/TLKV
Capaian	118,40	120	120	120	120	120	120*	

* capaian ini merupakan hasil konversi capaian maksimal 120. Capaian IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran = 116,27% : 85% = 136,79

Realisasi dihitung berdasarkan komponen dari sisi pengelolaa dan dari sisi pengguna

Sebagai Pengguna

Realiasi = ketepatan pemenuhan program pembelajaran.

Dari target 963 program pembelajaran, telah terselenggara 963 program pembelajaran sepanjang 2024 sehingga realisasinya adalah 100% dan target 85%, sehingga capaian pada BPPK sebagai pengguna adalah **117,65**

Adapun untuk BPPK sebagai pengelola maka realisasi dihitung berdasarkan ketepatan pemenuhan peserta dan penyampaian hasil data verifikasi AKP. Realisasi BPPK adalah sebagai berikut.

No	Unit	Ketepatan Pemenuhan Peserta			Ketepatan Waktu Pengumpulan Data AKP		Realisasi IKU	Capaian
		Target Peserta	Realisasi Peserta	Nilai Realisasi Peserta	Tanggal Penyampaian	Nilai Ketepatan Waktu		
1	Setjen	852	1.553	120,00	27 Maret 2024	120	120,00	120,00
2	DJA	772	963	120,00	28 Mei 2024	100	116,00	120,00
3	DJP	41.272	86.116	120,00	30 Mei 2024	100	116,00	120,00
4	DJBC	15.174	17.209	113,41	30 April 2024	110	112,73	120,00
5	DJPB	4.575	5.631	120,00	29 Mei 2024	100	116,00	120,00
6	DJKN	7.251	5.619	77,49	29 April 2024	110	83,99	98,82
7	DJPK	167	267	120,00	30 April 2024	110	118,00	120,00
8	DJPPR	149	137	91,95	29 Mei 2024	100	93,56	110,07
9	Itjen	520	1.290	120,00	31 Mei 2024	100	116,00	120,00
10	BKF	255	256	100,39	20 Mei 2024	100	100,31	118,02
11	BPPK	2.079	2.018	97,07	27 Mei 2024	100	97,65	114,89
12	LNSW	189	201	106,35	31 Mei 2024	100	105,08	120,00

Capaian BPPK sebagai pengguna adalah sebesar **114,89**.

Realisasi untuk IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada BPPK adalah = (117,65 + 114,89) : 2 = **116,27%**

Target IKU Tingkat ketepatan pemenuhan pembelajaran adalah 85% maka capaian = (116,27% : 85%) x 100 = 136,79 namun capaian ini dikonversi menjadi 120 (nilai capaian maksimal)

IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran merupakan IKU yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dilihat perbandingan target dan realisasinya dari tahun ke tahun. IKU ini juga tidak terdapat dalam Renstra Kemenkeu ataupun BPPK dan juga tidak tercantum dalam Renja.

Tabel 3. 13 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	85%	116,27%

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	85%	97,65%	114,88
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	85%	104,00%	120
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	85%	102,00%	120

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Pusdiklat Pajak	85%	116,00%	120
Pusdiklat Bea dan Cukai	85%	104,00%	120
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	85%	104,00%	120
Pusdiklat Keuangan Umum	85%	104,00%	120
PKN STAN	-	-	-

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi oleh BPPK dalam pencapaian IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan organisasi yang dinamis, sehingga tidak dapat dihindari adanya perubahan jadwal pembelajaran dan perubahan program pembelajaran;
2. Calon peserta mundur/batal mengikuti pelatihan karena jadwal pelatihan beririsan dengan pelaksanaan tugas di unit kerja;
3. Waktu pengumpulan data AKP lebih singkat dari yang seharusnya karena pelaksanaan *Learning Council Meeting* (LCM) mundur dibandingkan *timeline* pada PMK-45/2018; dan
4. Penyesuaian *tools* pengumpulan data AKP Jabatan/Individu dengan struktur organisasi BPPK yang baru berdasarkan PMK-135/2023.

Upaya yang telah dilakukan BPPK dalam rangka pemenuhan target IKU sampai dengan berakhirnya tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dari target 963 program pembelajaran, telah terselenggara 963 program pembelajaran (100% dari target 85%, capaian **117,65**);
2. Dari 2.079 target peserta BPPK, telah terealisasi 2018 peserta yang sesuai dengan persyaratan (97,07%), dan ketepatan waktu penyampaian AKP bernilai 100 (tepat waktu). Total nilai menjadi 97,65 dari target 85, capaian **114,89**;
3. Realisasi IKU = rata-rata poin 1 dan 2, yaitu **116,27**;

4. Melaksanakan pertemuan dengan PIC Kepegawaian seluruh unit dalam rangka konfirmasi rencana penugasan pelatihan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran tahun 2024. Dalam pertemuan ini ditekankan pentingnya keikutsertaan para pegawai dalam pelatihan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran Reguler; dan
5. Laporan Pengumpulan Data AKP 2025 BPPK telah dilakukan melalui nota dinas ke Pusdiklat KU nomor (ND-1798/PP.1/2024 tanggal 27 Mei 2024) hal Realisasi ketepatan waktu penyampaian hasil pengumpulan data AKP sebesar 100%.

5. Analisis Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran adalah Pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh *stakeholder*. Sampai dengan triwulan IV level risiko turun pada level rendah dengan besaran risiko 11. Secara keseluruhan rata-rata kesesuaian pengiriman peserta pembelajaran unit organisasi Kemenkeu terhadap program pembelajaran hasil AKP sebesar 116,82%. Penurunan level dan besaran risiko juga mempertimbangkan semakin tingginya komitmen setiap unit organisasi di Kementerian Keuangan dalam pengiriman peserta sehingga program pembelajaran tetap berjala sesuai dengan hasil AKP.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan kesepakatan pengukuran kinerja ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran dengan seluruh UE1 dan LNSW sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan pegawai sesuai dengan hasil AKP.
2. *Mirorring* IKU dengan Sekretariat di masing-masing UE1/LNSW Mitra Pusdiklat
3. Verifikasi peserta sesuai dengan persyaratan di dalam pembelajaran
4. Koordinasi dengan PIC SDM UE1 dan LNSW terkait dengan permintaan peserta dengan melampirkan persyaratan peserta pada dokumen kurikulum (contoh: KAP, Kerangka Acuan Pembelajaran) dalam rangka menjaga komunikasi yang efektif dengan *stakeholder*.

Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren risiko pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh *stakeholder* sepanjang tahun 2024.

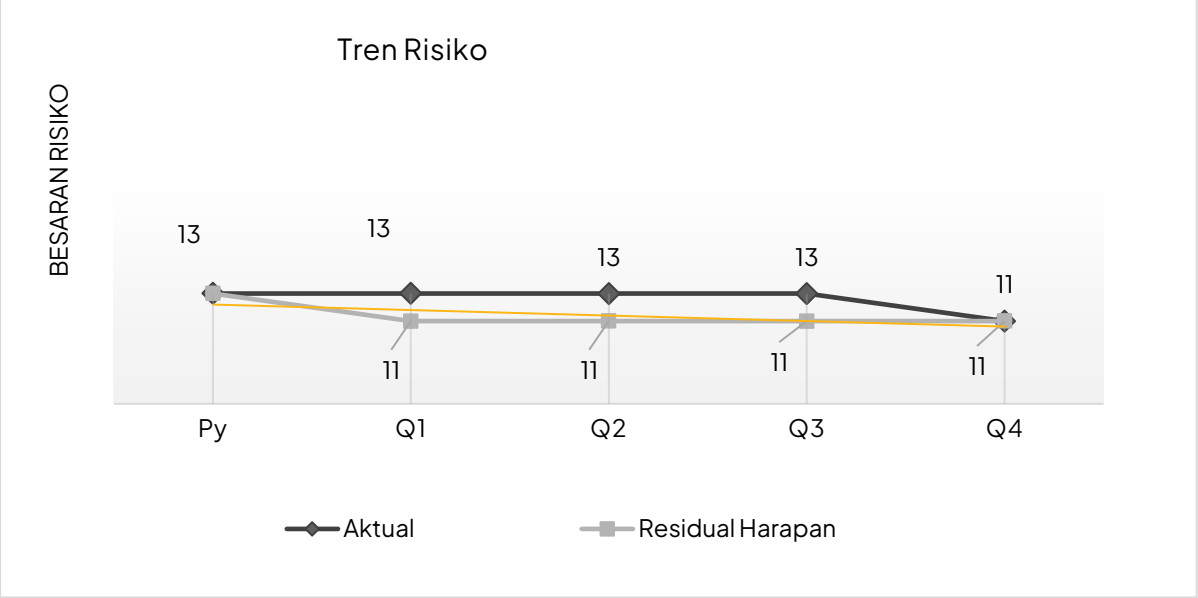

Pada tahun depan, risiko pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh *stakeholder* akan tetap ada selama sasaran organisasinya masih ada, namun diproyeksikan berada pada level rendah. Hal ini mempertimbangkan histori capaian pada tahun 2024. Rekomendasi untuk risiko ini adalah sebagai berikut.

1. Perlu di identifikasi kembali terkait dengan risiko lainnya utamanya jika sasaran organisasi dan iku masih ada untuk tahun berikutnya.
2. Mulai dilakukan identifikasi risiko yang bersifat *upside* atau risiko yang dapat menambah pencapaian kinerja organisasi

6. Rencana Aksi

Berikut ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Verifikasi usulan peserta pelatihan	Pusdiklat	Sepanjang Tahun 2025
2.	Penyelenggaraan pembelajaran tahun 2025	Pusdiklat, BDK	
3.	Re-konfirmasi calon peserta pelatihan secara periodik	Setban	
4.	Mengingatkan kembali ke unit terkait rencana penugasan pelatihan	Setban	

SS-4. Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Pembelajaran yang berkualitas tinggi adalah pengelolaan program pembelajaran yang relevan, *applicable*, *impactful*, dan *accessible*, sehingga memungkinkan peserta pembelajaran untuk memahami, menguasai dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan dengan baik.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 14: SS Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	**Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi**			**109,89**
4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,35	4,78	109,89

Indeks capaian untuk SS ini adalah **109,89**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

4a-N Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pembelajaran PPJ, E-*learning*, dan klasikal menggunakan survei persepsi kepuasan peserta sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran di lingkungan BPPK.

Pengukuran menggunakan indeks persepsi peserta sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran yang berlaku di BPPK.

1. Evaluasi penyelenggaraan PJJ dilakukan sesuai PER-6/PP/2021 tentang Pedoman PJJ, atau ketentuan penggantinya
2. Evaluasi penyelenggaraan *E-learning* dilakukan sesuai dengan PER-2/PP/2019 tentang Pedoman *E-learning*, atau ketentuan penggantinya

2. Formula IKU

Realisasi = Rata-rata indeks perspesi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan dan pengajar

3. Perhitungan Capaian IKU

Realisasi dan capaian IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi 4a-N Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	
Realisasi	4,78	4,78	4,78	4,77	4,77	4,78	4,78	Max/TLKV
Capaian	109,89	109,89	109,89	109,66	109,66	109,89	109,89	

Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei seluruh Pusdiklat dan Balai Diklat sebagai berikut.

No	Unit	Target	s.d. Desember	
			Realisasi	Capaian
1	Pusdiklat KM	4,35	4,82	110,80
2	Pusdiklat AP	4,35	4,71	108,28
3	Pusdiklat Pajak	4,35	4,69	107,82
4	Pusdiklat BC	4,35	4,77	109,66
5	Pusdiklat KNPK	4,35	4,78	109,89
6	Pusdiklat KU	4,35	4,74	108,97
7	BDK Medan	4,35	4,78	109,89
8	BDK Pekanbaru	4,35	4,77	109,66
9	BDK Palembang	4,35	4,83	111,03

No	Unit	Target	s.d. Desember	
			Realisasi	Capaian
10	BDK Cimahi	4,35	4,77	109,66
11	BDK Yogyakarta	4,35	4,81	110,57
12	BDK Malang	4,35	4,79	110,11
13	BDK Denpasar	4,35	4,80	110,34
14	BDK Pontianak	4,35	4,73	108,74
15	BDK Balikpapan	4,35	4,76	109,43
16	BDK Makassar	4,35	4,79	110,11
17	BDK Manado	4,35	4,78	109,89
18	BDPim Magelang	4,35	4,83	111,03
	BPPK	4,35	4,78	109,89

IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi merupakan reformulasi dari IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif di tahun 2023 sehingga target dan realisasinya pada tahun ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	4	4,76
2024	-	-	-	-	4,35	4,78

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	-	-	-
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	4,35	4,82	110,80
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	4,35	4,71	108,28
Pusdiklat Pajak	4,35	4,69	107,28
Pusdiklat Bea dan Cukai	4,35	4,77	109,66
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	4,35	4,78	109,89
Pusdiklat Keuangan Umum	4,35	4,74	108,97
PKN STAN	-	-	-

4. Usaha Pencapaian IKU

Sepanjang tahun 2024 belum terdapat kendala dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi Pembelajaran yang berkualitas tinggi.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi Pembelajaran yang berkualitas tinggi .

1. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan ketentuan s.d. periode Q4 tahun 2024;
2. Pembentukan *WhatsApp Group* pada setiap pembelajaran;
3. Penyusunan panduan pembelajaran.

5. Rencana Aksi

IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi masih akan berlanjut di tahun 2025. Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun terkait IKU Tingkat implementasi pembelajaran yangberkualitas tinggi.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Me laksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya	Pusdiklat dan BDK	Sepanjang Tahun 2025
2.	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan ketentuan		

SS-5. Pendidikan yang Berkualitas Tinggi

Pendidikan yang berkualitas tinggi adalah sistem pembelajaran yang menyediakan lingkungan yang mendukung, sarana yang memadai dan pendekatan kurikulum yang menitikberatkan pada pelaksanaan sintesis keilmuan dan praktik pengelolaan keuangan negara yang komprehensif. Pendidikan yang berkualitas tinggi didukung juga dengan pengelolaan beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 16 : SS Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5	**Pendidikan yang Berkualitas Tinggi**			**115,78**
5a-CP	Tingkat kualitas tata Kelola BLU PKN STAN	100	114,83	114,83
5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%	110,35%	120,00*
5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4	4,5	112,50

*merupakan nilai konversi maksimal capaian 120. Nilai capaian sesungguhnya adalah 122,61

Indeks capaian untuk SS ini adalah **115,78**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

5a-CP Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN

1. Definisi IKU

IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN bertujuan untuk Untuk memastikan tata kelola dan penerapan manajemen risiko di SMV lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan baik.

IKU ini mengukur:

a. Tingkat maturitas Badan Layanan Umum (BLU)
   Tingkat maturitas BLU merupakan tingkat kedewasaan/kematangan manajemen dalam mengelola BLU untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik pada BLU. Tingkat Maturitas BLU diukur dari nilai hasil penilaian tingkat kematangan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (PPKBLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) BLU
   Risk maturity level atau Tingkat Pengukuran Maturitas Risiko (TPMR) menggambarkan level kematangan manajemen risiko. Penerapan risk maturity level/TPMR secara sistematis dan konsisten dapat menjadi indikator untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan memadai dalam setiap unit/lini di dalam institusi.

   Khusus pada BLU, pengukuran Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) berpedoman pada pada skala TKPMR yang diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kemenkeu nomor PER-14/IJ/2022 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan.

2. Formula IKU

Triwulan II

Indeks Maturitas Tata Kelola SMV

= (Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian *Maturity Rating* * 60%) + (Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelaporan Dokumen Manajemen Risiko * 40%)

Triwulan III

Indeks Maturitas Tata Kelola SMV

= (Indeks *Maturity Rating* * 60%) + (Indeks Kematangan Manajemen Risiko * 40%)

1. Indeks *Maturity Rating*

Indeks	Deskripsi
5	Melakukan validasi atas indikator *maturity rating* BLU dengan pembina teknis dan pembina keuangan serta mempersiapkan dokumen *maturity rating* BLU tahun selanjutnya
4	Pembina Teknis, dan Pembina Keuangan melakukan validasi *self-assessment* BLU atas indikator *maturity rating*
3	Pembina Teknis melakukan validasi *self-assessment* BLU atas indikator *maturity rating*
2	Berkoordinasi dengan BLU telah melakukan pengunggahan seluruh dokumen *maturity rating*
1	Berkoordinasi dengan BLU telah melakukan pengunggahan sebagian dokumen *maturity rating*

2. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (skala 1-5)

UKI UE I melakukan penilaian atas TKPMR yang sebelumnya telah dilakukan self-assessment dengan berpedoman dengan PER-14/IJ/2022, dengan skala sebagai berikut:

Indeks 5 : 4,50 ≤ Skor ≤ 5

Indeks 4 : 4,00 ≤ Skor ≤ 4,50

Indeks 3 : 3,00 ≤ Skor ≤ 4,00

Indeks 2 : 2,00 ≤ Skor ≤ 3,00

Indeks 1 : 1,00 ≤ Skor ≤ 2,00

Triwulan IV

Indeks Maturitas Tata Kelola SMV

= (Indeks *Maturity Rating* * 60%) + (Indeks Kematangan Manajemen Risiko* 40%)

rincian indeks sebagai berikut:

1. *Maturity Rating* (skala 1-5) berpedoman dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/2021 kemudian penetapan nilai *maturity rating* secara final melalui Keputusan Direktur PKBLU.
2. Nilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (skala 1-5) oleh Unit Kepatuhan Internal UE-I yang sudah dilakukan *Quality Assurance* oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dengan berpedoman pada PER-14/IJ/2022, dengan skala berikut:
   Indeks 5 : 4,50 ≤ Skor ≤ 5
   Indeks 4 : 4,00 ≤ Skor ≤ 4,50
   Indeks 3 : 3,00 ≤ Skor ≤ 4,00
   Indeks 2 : 2,00 ≤ Skor ≤ 3,00
   Indeks 1 : 1,00 ≤ Skor ≤ 2,00

3. Perhitungan Capaian IKU

Pada tahun 2024, IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN ditargetkan sebesar 100. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN.

BPPK	SS: Pendidikan yang berkualitas tinggi 5a-CP Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	115,48	115,48	114,92	114,92	114,83	114,83	Max/TLKV
Capaian	**100**	**115,48**	**115,48**	**114,92**	**114,92**	**114,83**	**114,83**	

Nilai *maturity rating* BLU PKN STAN diperoleh dari perhitungan berikut.

No	Komponen Penilaian Maturitas BLU	Bobot	Nilai
1	Keuangan	20%	1,25
2	Pelayanan	25%	4,40
3	Kapabilitas Internal	20%	3,50

No	Komponen Penilaian Maturitas BLU	Bobot	Nilai
4	Tata Kelola dan Kepemimpinan	20%	3,80
5	Inovasi	10%	2,75
6	Lingkungan	5%	2,00
	Total	100%	3,18 (Target 3,25 skala 5)

No	Komponen Keuangan	Nilai
1	Likuiditas	1,50
2	Efisiensi	1,50
3	Efektivitas	1,00
4	Tingkat kemandirian	1,00
Rata-Rata		1,25

No	Komponen Pelayanan	Nilai
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	4,00
2	Efisiensi Waktu Pelayanan	5,00
3	Sistem Pengaduan Layanan	5,00
4	Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan	3,58
Rata-Rata		4,40

No	Komponen Kapabilitas Internal	Nilai
1	Sumber Daya Manusia	4,00
2	Proses Bisnis	4,00
3	Teknologi	3,00
4	*Customer Focus*	3,00
Rata-Rata		3,50

No	Komponen Tata Kelola dan Kepemimpinan	Nilai
1	Perencanaan Strategis	5,00
2	Etika Bisnis	4,00

No	Komponen Tata Kelola dan Kepemimpinan	Nilai
3	*Stakeholder Relationship*	3,00
4	Manajemen Risiko	4,00
5	Pengawasan dan Pengendalian	3,00
Rata-Rata		3,80

No	Komponen Inovasi	Nilai
1	Keterlibatan pengguna jasa	2,00
2	Proses inovasi	3,00
3	Manajemen pengetahuan	3,00
4	Manajemen perubahan	3,00
Rata-Rata		2,75

No	Komponen Lingkungan	Nilai
1	*Environtmental Footprint Management*	1,00
2	Penggunaan sumber daya	3,00
Rata-Rata		2,00

Sampai dengan Desember 2024, hasil *self-assessment maturity rating* BLU PKN STAN telah diverifikasi oleh Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan Dit. PPK-BLU setelah sebelumnya juga telah dilakukan koordinasi/pendampingan *assessment*. Hasil verifikasi tersebut, nilai *maturity rating* BLU PKN STAN adalah **3,18 dari target 3,25**, sehingga capaian *Maturity rating* BLU PKN STAN adalah **97,85**.

Nilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan penilaian TKPMR oleh UKI BPPK, nilai TKPMR tahun 2024 PKN STAN adalah **4,56 dari target 3,25** (skala 5), sehingga capaian TKPMR (bobot 40%) adalah **140,31.**

Realisasi IKU ini = 40% x 140,31 + 60% x 97,85 = **114,83**

s.d. Des	Target	Realisasi	Capaian
Maturity Rating (60%)	3.25	3.18	97.85
TKPMR (40%)	3.25	4.56	140.31

	114.83

IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN adalah IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan target dan realisasi nya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 17 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	100	114,83

Untuk unit Eselon II di BPPK, IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN hanya terdapat pada PKN STAN.

4. Upaya Pencapaian IKU

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut.

TKPMR

1. Pemantauan risiko secara berkala belum didukung dengan dokumentasi yang memadai.
2. Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan secara optimal.
3. Kesadaran dan pengembangan kompetensi SDM terkait manajemen risiko perlu ditingkatkan.

4. Pemantauan risiko sepanjang Semester I dilakukan melalui rapat berkala (contoh: Ramen – Rapat Manajemen), namun tidak menjadi agenda khusus sehingga pembahasan risiko dinilai kurang komprehensif.
5. Dari 99 (sembilan puluh sembilan) orang pegawai yang mengikuti survei pemahaman strategi dan kebijakan manajemen risiko, hanya 55 (lima puluh lima) orang pegawai yang memperoleh nilai di atas 60 (55,56%).
6. Belum semua pengelola risiko mendapatkan pengembangan kompetensi terkait pengelolaan risiko (baru 86,21%) dan terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan manajemen risiko.

Maturity Rating BLU

1. Terdapat komponen BLU *maturity rating* yang masih di bawah level 3 (keuangan dan *environmental footprint management;*
2. Aspek pengelolaan keuangan: Belanja RM (Rupiah Murni) PKN STAN jauh lebih besar dari realisasi belanja PNBP.
3. Aspek *environmental, footprint management* PKN STAN belum memiliki prosedur baku dalam mengelola *environmental footprint* (identifikasi isu, penyusunan kebutuhan, kebijakan/SOP pengelolaan, evaluasi pengelolaan)

Berikut ini adalah *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini.

TKPMR

1. Implementasi Perdir 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan PKN STAN.
2. Penyusunan pedoman dan pemilihan pengelola risiko terbaik.

Maturity Rating BLU

1. Penetapan Perdir 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Investasi Jangka Pendek sebagai upaya peningkatan Optimalisasi Pengelolaan Kas.
2. Penetapan Perdir 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan BLU
3. *Pilot project* penerapan *eco-office.*

5. Analisis atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap sasaran organisasi Pendidikan yang berkualitas tinggi adalah Tidak tersusunnya standar

pengelolaan keluhan pelanggan di PKN STAN sampai dengan akhir tahun 2024 risiko ini tetap berada pad alevel rendah dengan besaran risiko 11 dimana Level kemungkinan tetap pada level 2 karena SOP reviu efisiensi dan efektivitas kegiatan di PKN STAN telah selesai disusun dan ditetapkan serta di-*upload* ke apikasi Orbus dan aplikasi BIOS *maturity rating* BLU. Sedangkan level dampak tetap pada level 3.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan tren risiko Tidak tersusunnya standar pengelolaan keluhan pelanggan di PKN STAN sepanjang tahun 2024.

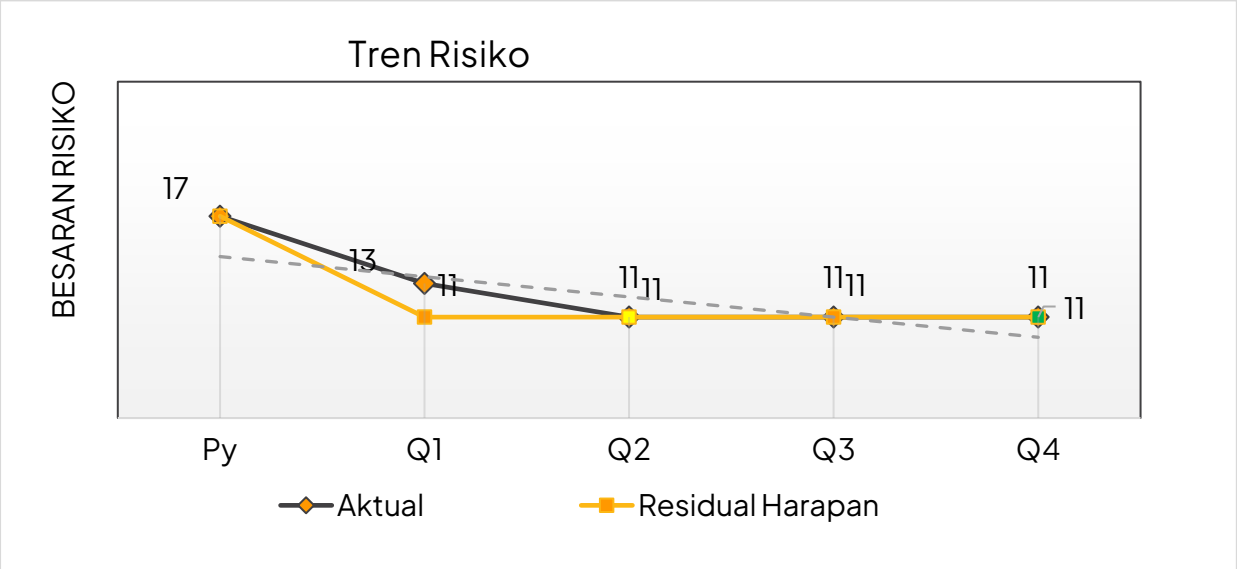

Untuk menjaga risiko tetap berada pada level riendah berikut ini adalah mitigasi yang dilakukan oleh BPPK sepanjang tahun 2024.

1. Menyusun dan menetapkan SOP Reviu Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan
2. Mengunggah SOP tersebut ke aplikasi Orbus agar dapat diakses berbagai pihak
3. Mengunggah SOP tersebut ke dalam BIOS BLU PKN STAN sebagai dasar penilaian *maturity rating*.

Pada triwulan I tahun 2025, risiko ini diproyeksikan untuk tetap pada level rendah dengan besaran risiko 11.

6. Rencana Aksi

IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN masih akan dimiliki oleh BPPK di tahun 2025. Adapun rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pelaksanaan IHT (*in-house training*)/sosialisasi terkait manajemen risiko bagi seluruh pegawai PKN STAN	PKN STAN	2025

5b-N Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan

1. Definisi IKU

Tujuan dari IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan adalah penyelerasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi. Pengukuran IKU didasarkan pada aspek survei kepuasan pemilik SDM terhadap perencanaan pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM melalui beasiswa, tingkat penempatan karyasiswa, dan pemanfaatan pegawai selesai tugas belajar (*re-entry*).

Tingkat efektivitas beasiswa merupakan tolak ukur atas efektivitas pengelolaan Beasiswa kementerian Keuangan dalam memenuhi kebutuhan kompetensi melalui program pendidikan sesuai dengan arah kebijakan SDM Kementerian Keuangan.

IKU diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu:

1. Tingkat penempatan *awardee* (30%)
   Dihitung dari Persentase karyasiswa Beasiswa Kementerian Keuangan yang mendapatkan LoA dalam periode 12 bulan pada tahun berjalan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman dan ketentuan terkait yang berlaku pada saat penawaran beasiswa.
2. Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program *Re-Entry* (30%)

Diukur dari nilai yang diberikan oleh mentor Pegawai Selesai Tugas Belajar penerimai Beasiswa Kementerian Keuangan pada program pemberdayaan yang dikoordinasikan oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial c.q. Bidang Manajemen Beasiswa.

3. Indeks Pemenuhan Penyusunan Program Beasiswa Kementerian Keuangan (40%) diukur melalui persentase pelaksanaan kegiatan diseminasi beasiswa dan *one-on-one* dengan bobot 60% dan rata-rata realisasi indeks tingkat kepuasan Unit Eselon I dan LNSW terhadap pelayanan Beasiswa Kementerian Keuangan dengan bobot 40%.

2. Formula IKU

Tingkat efektivitas beasiswa	=	[(40% x Indeks Pemenuhan Penyusunan Program Beasiswa Kementerian Keuangan) + (30% x Tingkat Penempatan *Awardee)* + (30% x Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program *Re-Entry*)]

1. Indeks Pemenuhan Penyusunan Program Beasiswa Kementerian Keuangan (40%)

Realisasi IKU

Q1: Penyampaian informasi kegiatan pelaksanaan penyebarluasan informasi pengelolaan beasiswa ke seluruh UE I Kemenkeu dan LNSW

Q2: Persentase penyelesaian Daftar Program Studi berdasarkan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) yang berlaku

Q3: penyelesaian persiapan dan disampaikannya undangan kegiatan diseminasi beasiswa dan diskusi *one-on-one* dengan seluruh UE I di Kemenkeu dan LNSW

Q4: (terselenggaranya kegiatan diseminasi beasiswa dan diskusi *one-on-one* serta penyusunan rekapitulasi dokumen program prioritas UE1 dan LNSW: bobot 40%) + (survei tingkat kepuasan UE I dan LNSW terhadap pelayanan beasiswa Kemenkeu: bobot 60%)

Target hasil survei yaitu 3 dari skala 5

2. Tingkat Penempatan Awardee (30%)

Persentase karyasiswa yang mendapatkan LoA dalam periode 12 bulan pada tahun berjalan.
(Jumlah *Awardee* yang memperoleh LoA/Total Seluruh *Awardee* Beasiswa Kementerian Keuangan) x 100%

3. Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Re-Entry (30%)

TW I, II, dan III: Hanya mengukur ketepatan waktu penyusunan konsep Naskah Dinas terkait pelaksanaan pemantauan re-entry program (target 85% - bobot 30%)
120%: (lebih dari empat hari kerja) >4 hari kerja sebelum triwulan berakhir
110%: 1-4 (satu sampai empat) hari kerja sebelum triwulan berakhir
100%: 1-2 (satu sampai dua) hari kerja setelah triwulan berakhir
90%: 3-5 hari kerja setelah triwulan berakhir
80%: 5-10 hari kerja setelah triwulan berakhir
70%: >10 hari kerja setelah triwulan berakhir
TW IV:Rata-rata ketepatan waktu pelaksanaan pemantauan re-entry Q1-Q4 (target 85% - bobot 30%) + Indeks Kepuasan Unit Pemilik *Re-entry* Program (target 90% - bobot 70%)

Nilai yang diberikan oleh Mentor pegawai *re-entry*:
120%: >90
110%: 85-90
100%: 80-85
90%: 75-80
80%: <75

3. Perhitungan Capaian IKU

Realisasi dan capaian IKU Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Pendidikan yang berkualitas tinggi 5b-N Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%	
Realisasi	33%	98%	98%	84,67%	84,67%	110,35%	110,35%	Max/TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120*	

* capaian ini merupakan hasil konversi capaian maksimal 120. Capaian IKU Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan = 110,35% : 90% = 122,61

Realisasi Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Indeks Pemenuhan Penyusunan Program Beasiswa Kementerian Keuangan (40%)	Tingkat Penempatan *Awardee* (30%)			Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program *Re-entry* (30%)	Realisasi
	Jumlah *Awardee* yang memperoleh LOA	Total Awardee MINTS 4	Persentase	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Konsep Naskah Dinas Pemantauan *Re-Entry* Program	
112%	54	54	100%	118,50%	**110,35%**

Indeks pemenuhan penyusunan program beasiswa Kementerian Keuangan (40%)

- Persentase pelaksanaan kegiatan diseminasi Beasiswa dan 1-*on*-1 (40%) : 100%
- Rata-rata realisasi indeks Kepuasan UE1/LNSW (60%) : 120%

Indeks pemenuhan penyusunan program beasiswa Kementerian Keuangan = (40% x 100%) + (60% x120) = 112%

Realisasi = (40% x 112%) + (30% x 100%) + (30% x 118,50%) = **110,35%**

IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan sudah ada pada tahun sebelumnya namun terdapat reformulasi IKU sehingga target dan capaian IKU pada tahun ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahhun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini terdapat dalam Renstra BPPK. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan.

Tabel 3. 18 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	75%	77%	-	75%	81,47%
2022	-	80%	80%	-	80%	99,41
2023	-	82%	82%	-	85%	96,49
2024	-	85%	85%	-	90%	110,35%

Untuk unit Eselon II di BPPK, IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan hanya terdapat pada Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial.

4. Upaya Pencapaian IKU

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. *Monitoring* dan pemberian informasi kepada karyasiswa MINTS 4 terkait pemilihan tujuan studi dan super prodi;
2. Pemetaan Pegawai selesai tugas belajar berdasarkan kompetensi dan usulan program pemberdayaan dari Unit Eselon I/Non-Eselon/SMV, koordinasi dengan

UPK, dan diseminasi rencana pelaksanaan program pemberdayaan kepada mentor dan UPK.

3. *One on One* terkait kebutuhan program studi prioritas dengan UE1 dan Biro SDM telah selesai dilaksanakan pada bulan November. Nilai Survei Kepuasan Layanan Pengelolaan Beasiswa Kemenkeu adalah 4,89.
4. Pada Desember 2024, seluruh awardee MINTS 3 (54 orang) telah mendapatkan LoA.
5. Pada 2024 terdapat 21 awardee FETA dan MINTS yang telah menyelesaiakan *reentry* program, dengan rata-rata hasil penilaian mentor: 96,64.

5. Analisis atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh pencapaian IKU Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan adalah tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa. Risiko ini muncul dikarenakan fluktuasi nilai rupiah, kenaikan standar biaya hidup, kenaikan *tuition fee* yang melebihi estimasi, dan penyelenggaraan dua program beasiswa dalam negeri.

Sampai dengan Desember 2024 untuk risiko ini turun ke level rendah dengan besaran risiko 11, mengingat:

1. Penambahan alokasi anggaran masih parsial dan belum menutup seluruh kekurangan anggaran.
2. Dari 8,5 Milyar, penambahan anggaran sampai saat ini baru diberikan sebesar 5,3 Milyar. Kekurangan sebesar 3,2 Milyar dimitigasi dengan permohonan penundaan pembayaran kepada kampus dan karyasiswa ke tahun 2025

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan manajemen anggaran melalui perencanaan proyeksi kebutuhan bulanan dan triwulanan dan reviu realisaasi anggaran/kegiatan;
2. Perencanaan proyeksi kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing menggunakan kurs jual yang relatif lebih tinggi dibandingkan kurs saat transaksi;
3. Pembuatan *dashboard* keuangan serta koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Badan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan kampus/universitas terkait batas waktu pembayaran *tuition fee.*

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan tren risiko tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa sepanjang tahun 2024.

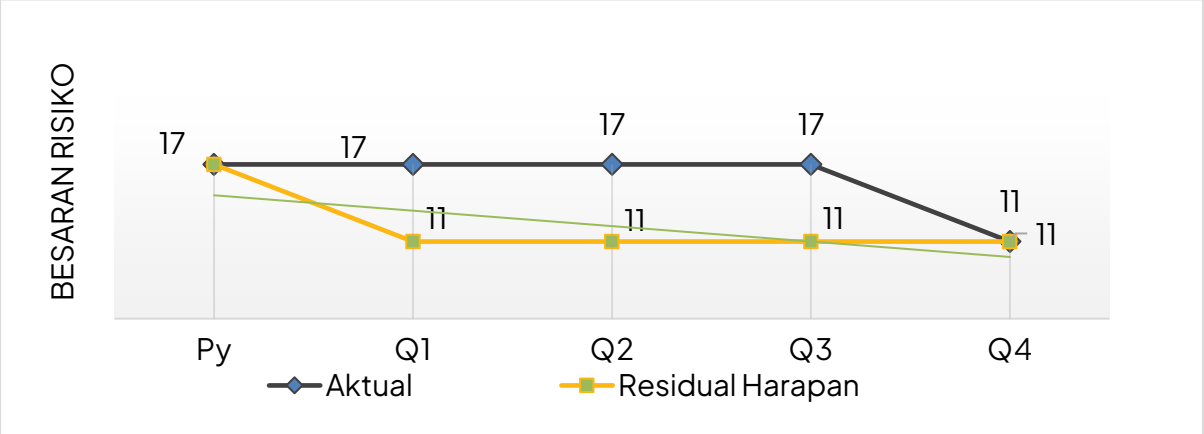

Tahun 2025 risiko tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa diproyeksikan tetap ada namun dengan level risiko rendah (besaran risiko 6 s.d 11) sebagaimana level risiko aktual di akhir tahun 2024, namun keberhasilan kegiatan mitigasi sepanjang 2024 tetap dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Rekomendasi terkait risiko ini adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 2025, diidentifikasi risiko lainnya yaitu "Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu" dengan level risiko rendah (8).
2. Mengidentifikasi risiko yang bersifat *upside risk*.

6. Rencana Aksi

IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan masih akan diterapkan di 2025. Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Upaya mendatangkan perwakilan kampus potensial kepada *awardee* MINTS selama *pre-dept* dan melaksanakan monitoring berkala	Pusdiklat KM (Bidang Manajemen Beasisiwa)	2025

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
	pasca *pre-dept* terkait perolehan LoA sesuai target		
2.	Koordinasi dengan biro SDM terkait rencana kebutuhan TB dan hasil penilaain *re-entry*		

5c-N Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni

1. Definisi IKU

IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan alumni PKN STAN melalui survei kepuasan pengguna alumni PKN STAN (*tracer study*).

2. Formula IKU

Berikut ini adalah formula perhitungan realisasi IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni.

Triwulan 1 Penyiapan kuesioner layanan (target 28 Maret 2024)

5 = Lebih cepat dari *timeline* (Selesai sebelum tanggal 28 Maret 2024)

4 = Selesai Tepat Waktu (tanggal 28 Maret 2024)

3 = Terlambat s.d. 2 minggu (10 hari kerja) dari *timeline*

2 = Terlambat s.d. 1 Bulan (22 hari kerja) dari *timeline*

1 = Terlambat lebih dari 1 Bulan (22 hari kerja) dari *timeline*

Triwulan 2 Penyebaran kuesioner Target (28 Juni 2024)

5 = Lebih cepat dari *timeline* (Selesai sebelum tanggal 28 Juni 2024)

4 = Selesai Tepat Waktu (tanggal 28 Juni 2024)

3 = Terlambat s.d. 2 minggu (10 hari kerja) dari *timeline*

2 = Terlambat s.d. 1 Bulan (22 hari kerja) dari *timeline*

1 = Terlambat lebih dari 1 Bulan (22 hari kerja) dari *timeline*

Triwulan 3 Pengolahan data sesuai target (30 September 2024)

5 = Lebih cepat dari *timeline* (Selesai sebelum tanggal 30 September 2024)

4 = Selesai Tepat Waktu (tanggal 30 September 2024)

3 = Terlambat s.d. 2 minggu (10 hari kerja) dari *timeline*

2 = Terlambat s.d. 1 Bulan (22 hari kerja) dari *timeline*

1 = Terlambat lebih dari 1 Bulan (22 hari kerja) dari *timeline*

Triwulan = 4

Hasil Survei memiliki target 4 dari skala 5

3. Perhitungan Capaian IKU

Realisasi dan capaian IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Pendidikan yang berkualitas tinggi 5c-N Tingkat kepuasan pengguna alumni							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	
Realisasi	5	5	5	5	5	4,5	4,5	Max/TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	112,50	112,50	

Skor total tingkat kepuasan pengguna lulusan PKN STAN tahun 2024 yaitu sebesar 3.6 (skala 4) dan berada pada kategori sangat memuaskan. Nilai ini kemudian dikonversi ke skala 5 sehingga realisasi IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni menjadi 4,5.

Nilai tersebut berasal dari hasil skor survei kepuasan pengguna alumni sebagai berikut.

No	Pernyataan	Rata-rata (Skala 4)	Konversi Skala 5
1	Pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu lulusan sesuai bidang tugas saat ini	3,71	4,64
2	Pengetahuan di luar bidang atau disiplin ilmu lulusan sesuai dengan bidang tugas saat ini	3,53	4,41

No	Pernyataan	Rata-rata (Skala 4)	Konversi Skala 5
3	Pengetahuan umum	3,63	4,54
4	Kemampuan berbahasa asing	3,31	4,14
5	Keterampilan menggunakan teknologi informasi	3,77	4,71
6	Keterampilan olah data dan *word processing* menggunakan komputer	3,78	4,73
7	Keterampilan olah data dan *word processing* menggunakan komputer	3,56	4,45
8	Keterampilan riset	3,44	4,30
9	Kemampuan belajar	3,72	4,65
10	Kemampuan berkomunikasi	3,61	4,51
11	Bekerja dibawah tekanan	3,55	4,44
12	Manajemen waktu	3,55	4,44
13	Bekerja secara mandiri	3,64	4,55
14	Bekerja dalam tim/bekerja sama dengan orang lain	3,70	4,63
15	Kemampuan dalam memecahkan masalah	3,51	4,39
16	Negosiasi	3,42	4,28
17	Kemampuan analisis	3,54	4,43
18	Toleransi	3,71	4,64
19	Kemampuan adaptasi	3,69	4,61
20	Loyalitas	3,75	4,69
21	Integritas	3,76	4,70
22	Bekerja dengan orang yang berbeda budaya maupun latar belakang	3,71	4,64
23	Kepemimpinan	3,27	4,09
24	Kemampuan dalam memegang tanggung jawab	3,64	4,55
25	Inisiatif	3,5	4,38
26	Manajemen proyek/program	3,46	4,33
27	Kemampuan untuk mempresentasikan ide/produk/laporan	3,53	4,41

No	Pernyataan	Rata-rata (Skala 4)	Konversi Skala 5
28	Kemampuan dalam menulis laporan, memo, dan dokumen	3,52	4,40
29	Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat	3,66	4,58
30	Etika	3,69	4,61
31	Pengembangan diri	3,68	4,60
	Rata-Rata	3,60	4,50

Skor tertinggi:

1. Keterampilan Olah Data dan *Word Processing* Menggunakan Komputer yaitu sebesar 3,78,
2. Keterampilan Menggunakan Teknologi Informasi (3,77),
3. Integritas (3.76),
4. Loyalitas (3,75).

Sedangkan skor terendah berupa Kemampuan Berbahasa Asing (3,31) dan Kepemimpinan (3,27)

IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni merupakan IKU baru di tahun 2024. Indikator kinerja ini juga tidak terdapat dalam Renstra ataupun Renja.

Tabel 3. 19 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	4	4,5

Pada level unit eselon II, IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni hanya terdapat pada unit PKN STAN.

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni sampai adalah surveyor kesulitan dalam menjangkau seluruh responden (hal ini dikarenakan penempatan alumni yang cukup beragam).

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU Tingkat kepuasan pengguna alumni adalah sebagai berikut.

1. Penyebarluasan kuisioner pada tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyebaran kuesioner ke seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Satu Kemenkeu;
3. Penyebaran kuesioner ke Instansi Mitra Kementerian Keuangan (NonKemenkeu) melalui email dan *hard copy*;
4. Penyampaian nomor WA Layanan Alumni apabila terdapat pertanyaan terkait survei layanan kepuasan pemanfaatan alumni;
5. Penyelenggaraan kelas/mata kuliah khusus dengan pengantar bahasa inggris pada Program Studi Manajemen Kekayaan Negara STr, Manajemen Aset Publik STr, dan DIII Bea dan Cukai;
6. Penyelenggaraan mata kuliah kepemimpinan;
7. FGD berkelanjutan, penyempuranaan kurikukulum, bahan ajar terkini dengan memasukan Studi Kasus dan Praktik;
8. Pelaksanaan laboratorium hidup, kunjungan studi, magang guna memberikan pengalaman praktis saat bekerja di lapangan
9. Pelaksanaan sertifikasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi.

5. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan dengan melibatkan *stakeholder* dalam setiap proses mulai penyusunan kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, magang, dan kegiatan-kegiatan praktik	PKN STAN	2025
2.	Peningkatan studi kasus, lab nyata dan praktik aplikasi perpajakan terkini		

SS-6. Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Reliabel

Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program pelatihan dibidang keuangan negara setelah dinilai bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan sertifikasi dari proses pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian, koreksi dan pengumuman sampai dengan penyerahan sertifikat.

Akreditasi dan Sertifikasi kompetensi yang reliabel adalah pengelolaan akreditasi dan sertifikasi yang andal, terpercaya dan selaras dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara baik di Kementerian Keuangan, KLID, dan masyarakat sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 20 : SS Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Reliabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Akreditasi dan Sertifikasi kompetensi yang reliabel			117,6

6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	100,00	117,6	117,6

Indeks capaian untuk SS ini adalah **117,6**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

6a-N Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan akreditasi pada program pelatihan di bidang keuangan negara dan memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi diselenggarakan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku.

IKU ini memiliki dua sub-IKU, yaitu::

1. Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara.
   Diukur atas kepuasan peserta yang terlibat dalam layanan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara. Kepuasan peserta akreditasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 5.
2. Persentase kualitas implementasi program sertifikasi.
   Diukur melalui kepuasan peserta sertifikasi atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi.
   Program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran, JFPP, AKPD, dan PPJK. Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4, yang dilakukan ketika ujian berlangsung/ melalui website sebagai bentuk konfirmasi mengambil sertifikat.
   Aspek layanan yang dinilai meliputi:
   a. penyampaian informasi terkait penyelenggaraan ujian (waktu dan tempat);
   b. alokasi waktu ujian
   c. kelayakan tempat dan sarpras ujian;
   d. informasi terkait hasil ujian;

   Aspek kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi meliputi:
   a. penyiapan sarana dan prasarana;
   b. penyiapan naskah soal ;

c. penyiapan administrasi ujian;
d. ketersediaan tim penguji sebelum ujian;
e. kesesuaian pelaksanaan ujian dengan jadwal;
f. ketersediaan dokumentasi ujian.

2. Formula IKU

Realisasi = (kualitas pengelolaan akreditasi x 50%) + (implementasi sertifikasi x 50%)

Akreditasi

Formula Triwulan I:

1. Identifikasi kegiatan monev yang akan dilakukan, jika telah dilakukan, realisasi 3,75
2. Jika belum dilakukan identifikasi kegiatan monev, realisasi 3,5

Formula Triwulan II, III, IV:

Rata-rata hasil survei (skala 5) / 3,75 x 100%

Sertifikasi

Formula Triwulan I:

1. Identifikasi dan perencanaan jadwal kegiatan sertifikasi tahun 2024, jika telah dilaksanakan, realisasi 90%.
2. Jika belum dilakukan identifikasi dan perencanaan jadwal kegiatan sertifikasi tahun 2024, maka realisasi 80%

Formula Triwulan II, III, IV = (40% x Persentase kepuasan peserta atas penyelenggaraan sertifikasi/kesesuaian janji layanan) + (60% x Persentase kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi)

3. Perhitungan Capaian IKU

Target dan Realisasi IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Reliabel 6a-N Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	105,56	105,56	105,56	105,56	117,60	117,60	
Capaian	**100**	**105,56**	**105,56**	**105,56**	**105,56**	**117,60**	**117,60**	

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi terdiri dari dua sub IKU. Berikut ini adalah perhitungan capaian untuk masing-masing sub IKU

Sub IKU Persentase kualitas implementasi program sertifikasi.

BPPK	SS: Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Reliabel 6a1-N Persentase kualitas implementasi program sertifikasi.							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Max/TLKV
Realisasi	9()%	100%	100%	100%	100%	108%	108%	
Capaian	**100**	**111,11**	**111,11**	**111,11**	**111,11**	**120**	**120**	

Sampai dengan Desember 2024, telah selesai dilaksanakan kegiatan sertifikasi pada Pusdiklat BC, Pusdiklat AP, dan Pusdiklat KNPK.

Unit	Keterangan	Jumlah Responden	Peserta Puas	Kepuasan Peserta (40%)	Kesesuaian tahapan (60%)	Nilai Sertifikasi
Pusdiklat AP	Sertifikasi JFAA	59	59	120.00%	100.00%	108%
Pusdiklat BC	Sertifikasi Ahli Kepabeanan (periode Feb 2024)	433	433	120.00%	100.00%	108%

Unit	Keterangan	Jumlah Responden	Peserta Puas	Kepuasan Peserta (40%)	Kesesuaian tahapan (60%)	Nilai Sertifikasi
Pusdiklat BC	Sertifikasi Ahli Kepabeanan (periode Juni 2024)	547	547	120.00%	100.00%	108%
KNPK	Penilai Ahli pertama yang perpindahan dari Jabatan lain (Kementerian ESDM)	1	1	120.00%	100.00%	108%
KNPK	JF Penilai Pemerintah kenaikan jenjang ahli pertama ke ahli muda	1	1	120.00%	100.00%	108%
KNPK	Ujikom Penilai Properti dan Bisnis	1	1	120.00%	100.00%	108%
KNPK	Ujikom JF Penata Laskana Barang Penyelia 2024	1	1	120.00%	100.00%	108%
KNPK	Ujikom JF Penata Laksana Barang Mahir-Terampil 2024	1	1	120.00%	100.00%	108%
KNPK	Ujikom JF AKPD	1	1	120.00%	100.00%	108%
KNPK	Ujikom JF kenaikan ke ahli muda (mengulang)	1	1	120.00%	100.00%	108%

Nilai sertifikasi diperoleh dari kesesuaian tahapan dan kepuasan peserta. Dari tabel diatas diketahui nilai sertifikasi adalah 108%, dengan target nilai sertifikasi sebesar 90% maka capaian untuk komponen sertifikasi adalah 120.

Sub IKU Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara

BPPK	SS: Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Reliabel 6a2-N Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	Max/TLKV
Realisasi	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,32	4,32	
Capaian	100	100	100	100	100	115,2	115,2	

Untuk Sub IKU Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara diperoleh dari pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan konsultasi Pra Akreditasi Program di Bidang Keuangan Negara. Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah 4 orang responden yang berasal dari BPSDM Jawa Barat.

No	Indikator	Rata-Rata Indeks
1	Akses informasi tentang tata cara pelaksanaan akreditasi mudah diperoleh	4,00
2	Informasi tentang standar layanan/tata cara pelaksanaan akreditasu disampaikan dengan jelas dan lengkap	4,75
3	Tim BPPK responsif dalam memberikan layanan	4,50
4	Prosedur layanan dilaksanakan sesuai standar layanan	4,75
5	Tim BPPK responsif memberikan tanggapan atas kendala yang ditemui dalam layanan akreditasi	4,25
6	Tim BPPK menyediakan media baik formal maupun informal untuk menyampaikan masukan dan/atau keluhan terkait pelaksanaan layanan akreditasi (surt, rapat, telepon, email, Grup WA, PIC)	3,75
7	Media penymapaian masukan berjalan dan berfungsi dengan baik	4,25
	Rata-rata indeks	4,32

Hasil survei adalah 4,32 (skala 5) dari target 3,75 (maka capaian komponen akreditasi adaah sebesar 4,32 : 3,75 = **115,20**).

Nilai Realisasi IKU ini adalah rata-rata nilai komponen akreditasi dan sertifikasi, yaitu (120 + 115,20) : 2 = **117,60**.

IKU Persentase Kualitas Implementasi Program Akreditasi dan Sertifikasi mengalami reformulasi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga target dan realisasi IKU pada tahun ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya. Namun salah satu komponen penghitungan IKU ini yaitu Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi merupakan indikator yang juga diukur pada tahun sebelumnya di BPPK sehingga dapat dilihat perbandingannya. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi dari Komponen Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi dari tahun 2020-2024.

Tabel 3. 21 : Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	75%	70%	75%	-	80%	99,74%
2021	77%	80%	77%	-	80%	98,8%
2022	80%	80%	80%	-	85%	99,32%
2023	82%	80%	82%	-	86%	97,75%
2024	85%	85%	85%	-	90%	108,00%

Tabel 3. 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Akreditasi Program Pelatihan Bidang Keuangan Negara

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	3,75	4,32

Pada level K-*Two*, IKU Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi diturunkan pada unit eselon II yang menjalankan tusi akreditasi dan sertifikasi. Adapun untuk indikator terkait akreditasi diturunkan kepada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaraan dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan sedangkan terkait sertifikasi diturunkan kepada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaraan, Pusdiklat Bea da Cukai dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

IKU Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	3,75	4,32	115,20
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	3,75	4,32	115,20

IKU Persentase kualitas implementasi program sertifikasi

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	90%	108%	120,00
Pusdiklat Bea dan Cukai	90%	108%	120,00

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	90%	108%	120,00

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi adalah survei layanan akreditasi belum dapat dilakukan karena proses akreditasi yang masih berjalan. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan instrumen survei kepuasan layanan akreditasi;
2. Pelaksanaan sertifikasi pada Pusdiklat BC (Sertifikasi Ahli Kepabeanan) dan Pusdiklat KNPK (Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, Jabatan Fungsional Penilai Properti Bisnis).

5. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang disusun terkait IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pelaksanaan layanan akreditasi dan pengukuran kepuasannya	Setban, Pusdiklat AP, Pusdiklat KNPK	Sepanjang Tahun 2025
2.	Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sesuai dengan ketentuan dan pengukuran kepuasannya	Pusdiklat AP, Pusdiklat BC, Pusdiklat KNPK	

SS-7. Manajemen Pengetahuan yang Matang

Manajemen pengetahuan merupakan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam

penyelesaian pekerjaan. Manajemen pengetahuan yang andal adalah pengelolaan pengetahuan yang sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan mampu menghasilkan manfaat untuk organisasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 23 : SS Manajemen Pengetahuan yang Matang

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Manajemen Pengetahuan yang Matang			103,33
7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	100,00	103,33	103,33

Indeks capaian untuk SS ini adalah **103,33.** Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

7a-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kecepatan waktu penyelesaian infrastruktur pendukung manajemen pengetahuan.
Penyelesaian infrastruktur Manajemen Pengetahuan terdiri dari:

1. *Software* KMS;
2. Cetak Biru; dan
3. Pedoman Penghargaan.

Penyelesaian *software* KMS adalah proses pengembangan KLC 2.4.1 yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2024, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. hasil pengembangan iterasi 1: triwulan I
2. hasil pengembagnan iterasi 2: triwulan II
3. hasil pengembangan iterasi 3: triwulan III
4. hasil pengembangan iterasi 4: triwulan IV

Cetak Biru Manajemen pengetahuan ditargetkan diselesaikan pada 30 Juni 2024.

2. Formula IKU

Realisasi	=	Rata-rata nilai ketepatan waktu penyelesaian seluruh komponen

Nilai kecepatan waktu penyelesaian komponen

Lebih cepat >30 hari dari *deadline*: Nilai 120

Lebih cepat s.d. 30 hari dari *deadline*: Nilai 110

Diselesaikan sesuai dengan *deadline*: Nilai 100

Terlambat s.d. 30 hari dari *deadline*: Nilai 90

Terlambat > 30 hari dari *deadline*/tidak dapat diselesaikan sampai periode pelaporan: Nilai 80

3. Perhitungan Capaian IKU

Realisasi dan capaian IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management* pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Manajemen Pengetahuan yang Matang 7a-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	103,33	103,33	102,50	102,50	103,33	103,33	Max/TLKV
Capaian	**100**	**103,33**	**103,33**	**102,50**	**102,50**	**103,33**	**103,33**	

Realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan berikut.

Kegiatan	Waktu penyelesaian	*Deadline*	Selisih dari *Deadline*	Nilai Kecepatan waktu
Software KMS triwulan I	31/03/2024	31/03/2024	0	100
Software KMS triwulan II	30/06/2024	30/06/2024	0	100
Software KMS triwulan III	30/09/2024	30/09/2024	0	100
Software KMS triwulan IV	31/12/2024	31/12/2024	0	100
Cetak Biru	18/04/2024	30/04/2024	-12	110
Pedoman Penghargaan	28/11/2024	30/11/2024	-2	110
RATA-RATA				**103,33**

IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management* adalah IKU yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak terdapat dalam dokumen Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun Renstra BPPK.

Tabel 3. 24 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Ketepatan Waktu Penyelesaian Infrastruktur Knowledge Management

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	100	103,33

Adapun IKU Ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management* tidak di *cascade* kepada unit-unit eselon II di BPPK.

4. Upaya Pencapaian IKU

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 kendala yang harus menjadi perhatian adalah proses penyelesaian ranangan KMK terkait pedoman penghargaan. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management* adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan konsep pedoman penghargaan, saat ini sedang dalam pembahasan;
2. Penetapan cetak biru Manajemen Pengetahuan pada tanggal 18 April 2024;
3. Pengembangan KMS iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 dan iterasi 4 pada Q1-Q2 2024; dan
4. Penetapan pedoman penghargaan pada 28 November 2024.

5. Analisis atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh pencapaian IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management* adalah Proses Manajemen Pengetahuan di Kemenkeu tidak berjalan secara efektif. Sampai dengan triwulan IV, risiko proses manajemen pengetahuan di Kemenkeu berada pada level risiko rendah dengan nilai risiko sebesar 11. Level dan nilai risiko ini diperoleh berdasarkan progres penyelesaian mitigasi, mulai dari kesiapan infrastruktur manajemen pengetahuan, kegiatan sosialisasi, pendampingan UE1 Mitra Pusdiklat dan internal BPPK, hingga pendokumentasian pengetahuan pada KMS (*Knowledge Management System*, KLC2) serta dalam bentuk buku.

IRU (Indikator Risiko Utama) ini sampai dengan triwulan IV berada pada status aman dengan penyelesaian penyusunan kelengkapan infrastruktur MP sebagai indikator tingkat kematangan MP yang telah tercapai sesuai dengan target triwulanan..

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan tren risiko proses manajemen pengetahuan di Kemenkeu tidak berjalan efektif sepanjang tahun 2024.

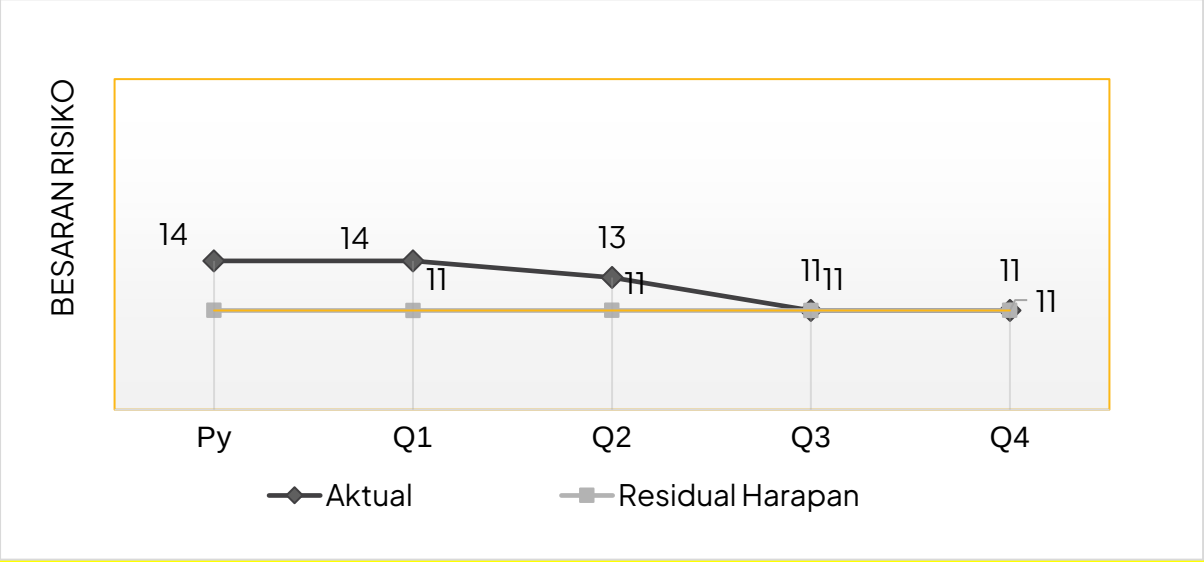

Sampai dengan berakhirnya Tahun 2024 mitigasi yang telah dilaksanakan terhadap risiko ini adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan identifikasi penyusunan pengetahuan kritis organisasi pada BPPK;
2. Penyusunan kerangka kerja penyelesaian infrastruktur manajemen pengetahuan;
3. Telah ditetapkan KMK Nomor 2/KM.11/2024 tentang Cetak Biru Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi salah satu infastruktur manajemen pengetahuan;
4. Penyusunan pedoman penghargaan yang saat ini masih dalam proses pembahasan;
5. Pelaksanaan webinar terkait Implementasi Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Pelaksanaan forum manajemen pengetahuan dengan seluruh UE1 dan non eselon serta pendampingan implementasi *Knowledge Management* pada unit mitra;
7. Pelaksanaan Pelatihan *Knowledge Management Masterclass* dengan peserta perwakilan unit eselon I dan Pusdiklat; dan
8. Penetapan KMK Nomor 3/KM.11/2024 tentang Penghargaan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tahun 2025 risiko ini diproyeksikan tetap ada namun dengan level risiko rendah (besaran risiko 6 s.d 11). Hal ini mempertimbangkan berbagai langkah yang telah diambil untuk memperkuat infrastruktur dan implementasi sistem manajemen pengetahuan di Kementerian Keuangan.

Adapun Rekomendasi yang disusun untuk terkait risiko ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi kembali terkait dengan risiko manajemen pengetahuan, tidak hanya risiko yang bersifat *downside risk* tetapi juga *upside risk.*
2. Memastikan dan dapat diupayakan setiap mitigasi yang dilakukan adalah kegiatan terobosan yang termasuk kegiatan di luar rutinitas yang telah dilakukan

6. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi di masa mendatang adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pengembangan KMS	Sekretariat Badan	2025

SS-8. Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel

Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya, dan menjaga agar kegiatan pembelajaran mulai dari analisis, desain, pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat dipercaya. Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 25 : SS Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Target	Capaian
8	**Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel**			**118,67**
8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100,00%	118,67%	118,67

Indeks capaian untuk SS ini adalah **118,67**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

8a-N Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandardisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK dan penyelesaian rekomendasi hasil pengukuran tahun sebelumnya.

Pengukuran Kualitas Pembelajaran mengacu pada Keputusan Kepala BPPK terkait penjaminan mutu, yang meliputi:

1. analisis kebutuhan pembelajaran;
2. desain pembelajaran;
3. validasi program;
4. penyelenggaraan pembelajaran;
5. evaluasi pembelajaran; dan
6. sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan secara semesteran/tahunan sesuai kebutuhan. Kriteria yang diuji dalam penjaminan mutu meliputi kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, kualitas isi, akurasi waktu, dan keamanan informasi. Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan mutu pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat mengikuti Standar Mutu Pembelajaran terbaru. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dihitung berdasarkan rekomendasi yang sudah diselesaikan, dibandingkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Berita Acara Hasil Penjaminan Mutu Tahun 2023

2. Formula IKU

Realisasi = 20% Tindak Lanjut + 80% Hasil Penjaminan Mutu

Pada Q1, Q2, Q3: realisasi hanya diperhitungkan dari tindak lanjut (20%)
Pada Q4: realisasi diperhitungkan dari tindak lanjut (20%) dan hasil penjaminan mutu (80%)

Tindak Lanjut:
Nilai Tindak Lanjut = (rekomendasi yang diselesaikan : jumlah rekomendasi) : 80%
nilai maksimal adalah 120 (sebelum dikali bobot 20%)
catatan: target penyelesaian tindak lanjut adalah 80%
(rekomendasi *trajectory* penyelesaisan rekomendasi setiap triwulan: 6%, 14%, 22%, 100%)

Hasil Penjaminan Mutu:
Capaian Hasil pejaminan mutu = Nilai hasil penjaminan mutu : 80
catatan: target 80
nilai maksimal adalah 120 (sebelum dikali bobot 80%)

3. Perhitungan Capaian IKU

Realisasi dan capaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel 8a-N Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	19,57%	22,55%	22,55%	23,78%	23,78%	118,67%	118,67%	
Capaian	120	120	120	120	120	118,67	118,67	

Realisasi IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran pada tahun 2024 diperoleh dari capaian penyelesaian tindak lanjut dan capaian nilai penjaminan mutu. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perhitungan realisasi IKU tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran.

Unit	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang diselesaikan	
		Jumlah	Persentase
Pusdiklat KM	15	15	100,00%
Pusdiklat AP	6	6	100,00%
Pusdiklat Pajak	11	11	100,00%
Pusdiklat BC	8	8	100,00%
Pusdiklat KNPK	7	7	100,00%
Pusdiklat KU	6	6	100,00%
BDK Medan	23	23	100,00%
BDK Pekanbaru	15	15	100,00%
BDK Palembang	9	9	100,00%
BDK Cimahi	15	15	100,00%
BDK Yogyakarta	7	7	100,00%
BDK Malang	6	6	100,00%
BDK Denpasar	4	4	100,00%
BDK Pontianak	4	4	100,00%
BDK Balikpapan	23	23	100,00%
BDK Makassar	20	20	100,00%
BDK Manado	1	1	100,00%
BDPim Magelang	4	4	100,00%
RATA-RATA	184	184	100,00%

Unit	Nilai penjaminan mutu (target 80)	Capaian Nilai penjaminan mutu (bobot 80%)	Persentase tindak lanjut (target 80%)	Capaian Tindak Lanjut (bobot 20%)	Realisasi IKU s.d. Desember
Pusdiklat KM	96,66	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
Pusdiklat AP	93,59	116,99%	100,00%	120,00%	117,59%
Pusdiklat Pajak	90,44	113,05%	100,00%	120,00%	114,44%
Pusdiklat BC	94,26	117,83%	100,00%	120,00%	118,26%
Pusdiklat KNPK	94,22	117,78%	100,00%	120,00%	118,22%
Pusdiklat KU	94,98	118,73%	100,00%	120,00%	118,98%
BDK Medan	80,47	100,59%	100,00%	120,00%	104,47%
BDK Pekanbaru	97,79	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Palembang	100,00	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Cimahi	96,61	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Yogyakarta	98,57	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Malang	98,53	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Denpasar	97,05	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Pontianak	92,90	116,13%	100,00%	120,00%	116,90%
BDK Balikpapan	96,61	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%
BDK Makassar	91,68	114,60%	100,00%	120,00%	115,68%
BDK Manado	94,86	118,58%	100,00%	120,00%	118,86%
BDPim Magelang	94,91	118,64%	100,00%	120,00%	118,91%
RATA-RATA	**94,67**	**118,34%**	**100,00%**	**120,00%**	**118,67%**

IKU Tingkat Pemenuhan standar kualitas pembelajaran mengalami reformulasi di tahun 2024 sehingga target dan realisasi tahun ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut terdapat dalam dokumen Renstra BPPK dengan nama indeks pemenuhan standar

kualitas pembelajaran. Berikut ini adalah perkembangan IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran dari tahun 2020.

Tabel 3. 26 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	4	-	-	4	5
2021	-	4	-	-	100	100
2022	-	5	-	-	4	5
2023	-	5	-	-	4	5
2024	-	5	-	-	100%	118,67%

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan standar kualitas pembelajaran pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	-	-	-
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	100%	120%	120
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	117,59%	117,59
Pusdiklat Pajak	100%	114,44%	114,44
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	118,26%	118,26
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	100%	118,22%	118,22
Pusdiklat Keuangan Umum	100%	118,98%	118,98
PKN STAN	-	-	-

4. Upaya Pencapaian IKU

Kendala yang muncul dalam pencapaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran sepanjang tahun 2024 adalah Penataan organisasi (PO) BPPK mengakibatkan penyusunan standar penjaminan mutu dengan mekanisme kerja baru.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh *unit in charge* dalam rangka pencapaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran sampai dengan berakhirnya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyampaian berita acara penjaminan mutu tahun 2023 dan rekomendasinya
2. Dari 184 rekomendasi penjaminan mutu yang perlu ditindaklanjuti, telah diselesaikan sebanyak 184 rekomendasi (selesai 100%). Target penyelesaian adalah 80%, dengan sehingga nilai komponen tindak lanjut adalah 120%.
3. Rata-rata nilai penjaminan mutu adalah 94,67 dari target 80 sehingga realisasi komponen nilai penjaminan mutu menjadi 118,34%.

5. Rencana Aksi

IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran masih akan diterapkan kembali di tahun 2025. Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi untuk pencapaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran yang disusun untuk tahun 2025.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Monitoring penyelesaian tindak lanjut penjaminan mutu tahun 2024;	Pusbin JFPM, Pusdiklat, BDK	2025
2.	Pelaksanaan penjaminan mutu tahun 2025	Pusbin JFPM, Pusdiklat, BDK	

SS-9. Pengelolaan Organisasi, SDM dan IT yang Adaptif

Organisasi, SDM, dan teknologi informasi merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel

sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Teknologi informasi yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam mendorong Kemenkeu agar relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Keandalan Sistem Informasi dalam dunia yang serba digital menjadi salah satu hal yang penting (salah satunya dalam mewujudkan dan menjaga reputasi Kementerian Keuangan secara khusus dan pemerintah secara umum di mata masyarakat/*stakeholder*). Pengelolaan layanan TIK yang andal tercermin dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi empat buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 27 : SS Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kredibel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	**Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif**			**111,38**
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	118,92%	118,92
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	104,48	104,48
9c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120,00%	120,00
9d-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*	94%	100,00%	106,38

Indeks capaian untuk SS ini adalah **111,38**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM

1. Definisi IKU

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia Kementerian keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*.

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta;
2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)/Non Eselon sebesar 35% ;
3. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan;
4. Tingkat Pemberdayaan *Talent* Kementerian Keuangan; dan
5. Tingkat Efektivitas Program Pembibitan dan Afirmasi PKN STAN.

2. Formula IKU

Capaian IKU	=	[(Capaian kegiatan A) x 20%] + [(Capaian kegiatan B) x 20%] + [(Capaian kegiatan C) x 20%] + [(Capaian kegiatan D) x 20%] + [(Capaian kegiatan E) x 20%]

Jumlah capaian masing-masing komponen dengan bobot sebagai berikut:

A. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta (Bobot 20%)
B. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)/Non Eselon sebesar 35% (Bobot 20%)
C. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Bobot 20%)
D. Tingkat Pemberdayaan *Talent* Kementerian Keuangan (Bobot 20%)
E. Tingkat Efektivitas Program Pembibitan dan Afirmasi PKN STAN (Bobot 20%)

3. Perhitungan Capaian IKU

Pada tahun 2024, IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM ditargetkan sebesar 100%. Berikut ini adalah target, realisasi dan capaian dari IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM di tahun 2024

BPPK	SS: Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif 9a-CP IKU : Tingkat kualitas pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	105,23%	116,50%	116,50%	116,62%	116,62%	118,92%	118,92%	Max/TLKV
Capaian	105,23	116,50	116,50	116,62	116,62	118,92	118,92	

Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM pada triwulan IV adalah sebesar 118,92. Nilai ini diperoleh dari perhitungan berikut.

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
1	**Tingkat kualitas pengeloaan kompetensi dan talenta (20%)**	**100**	**114.61**	**114.61**
	Aspek 1: Pemenuhan kompetensi SDM (50%)	**100**	**109.22**	**109.22**
	a. Pemenuhan kompetensi mansoskul (60%)	*98%*	*100.00%*	102.04
	b. Pemenuhan kompetensi teknis (40%)	*3*	*4.66*	120
	Aspek 2: Implementasi manajemen talenta (50%)	**4**	**5**	**120**
2	**Tingkat implementasi MAUE1 (20%)**	**100**	**120**	**120**
3	**Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kemenkeu (20%)**	**100**	**120**	**120**
	A. JPTP sebagai *role model* (40%)	**100%**	**120%**	**120**
	B. Penguatan 3 nilai (20%)	**100%**	**120.00%**	**120**
	C. Penindakan Hukdis (40%)	**100%**	**120%**	**120**
4	**Tingkat pemberdayaan *talent* Kemenkeu (20%)**	**100**	**120**	**120**
5	**Tingkat efektivitas program pembibitan dan afirmasi PKN STAN (20%)**	**4**	**4.82**	**120**
	Afirmasi (50%)	**4**	**4.93**	**120**
	Evaluasi SPMB pembibitan		4.85	
	Penerimaan mahasiswa afirmasi		5	
	Pembibitan (50%)	**4**	**4.72**	**117.92**

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
	Evaluasi SPMB pembibitan		4.84	
	Survei kepuasan SPMB pembibitan		4.31	
	Pemenuhan kuota afirmasi		5	

Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM = (20% x 114,61) + (20% x 120) + (20% x 120) + (20% x 120) + (20% x 120) = 118,92%

Realisasi 2024	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi BPPK (komponen 1, 2, 3, 4, dan 5)	100%	118,92%	118,92

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM mengalami reformulasi di tahun 2024 sehingga target dan realisasi tahun ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator tersebut tidak terdapat dalam Renstra BPPK namun terdapat pada Renstra dan Renja Kementerian Keuangan. Namun begitu, berikut ini adalah perkembangan IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM sejak tahun 2022.

Tabel 3. 28 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	88,2%	-	-	-	-	-
2022	89%	-	89%	-	100%	115,13%
2023	89,80%	-	89,80%	-	100%	118,21%
2024	90,50%	-	90,50%	-	100%	118,92%

IKU ini di-*cascade* ke K-*Two* secara *indirect* sehingga terdapat perbedaan komponen perhitungan antar unit eselon II di BPPK. Berikut ini adalah target dan realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	100%	118,65%	118,65
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	100%	117,31%	117,31
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	117,31%	117,31
Pusdiklat Pajak	100%	117,31%	117,31
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	117,31%	117,31
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	100%	117,31%	117,31
Pusdiklat Keuangan Umum	100%	117,31%	117,31
PKN STAN	100%	118,20%	118,20

4. Upaya Pencapaian IKU

Beberapa kendala yang dihadapi pada pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan kompetensi dan talenta: *Tools* Asesmen Teknis untuk tiap jabatan berbeda. *Mindset* karir masih struktural-*oriented*;
2. Mutasi antar unit JPTM: pegawai kurang terpapar kompetensi teknis lintas unit Eselon I;
3. Penguatan budaya organisasi: Atasan tidak langsung tidak segera menindaklanjuti laporan ketidakdisiplinan pegawai;
4. Belum dilaksanakan sosialisasi dengan tema spesifik mengenai Penguatan Budaya Kemenkeu oleh PPTP (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
5. Belum dilaksanakan internalisasi 3 (tiga) nilai (sinergi, profesionalisme, kesempurnaan) oleh Pejabat Administrator yang ditugaskan sebagai PPTP.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM sampai dengan berakhirnya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan kompetensi dan talenta: Penyusunan *tools* bersama dengan UE 1 lain yang memiliki standar kompetensi jabatan yang sama. Sosialisasi mengenai jalur karir baik struktural maupun fungsional;
2. Pelaksanaan mutasi antar unit JPTM: Pengenalan UE 1 lain;
3. Penguatan budaya organisasi: melakukan *workshop* terkait PMK 123/2023 terkait pedoman pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin;
4. Pelaksanaan identifikasi kegiatan terkait budaya Kemenkeu yang dapat diklaim sebagai bahan ND Laporan Penguatan Budaya kepada Biro SDM;
5. Pemberdayaan *talent* Kemenkeu: difasilitasi melalui kegiatan *secondment* program *re-entry*. Saat ini, telah diusulkan 12 program *secondment* kepada Biro SDM untuk memfasilitasi program *re-entry* dimaksud.

5. Rencana Aksi

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara masih akan berlanjut di tahun 2025. Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk tahun 2025.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Pengelolaan kompetensi dan talenta: menyelesaikan penyusunan *tools* dan menyiapkan jabatan target selain struktural	Sekretariat BPPK	Sepanjang tahun 2025
2.	Pemberdayaan *talent* Kemenkeu: menyusun sebaran *secondee* untuk program-program *secondment* yang telah diusulkan	Sekretariat BPPK	
3.	Penguatan budaya organisasi: melakukan pendampingan tindak lanjut informasi dari unit terkait dan koordinasi intens dengan Inspektorat Jenderal	Sekretariat BPPK	

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
4.	Pelaksanaan kegiatan internalisasi budaya yang lebih terstruktur di semester II	Sekretariat BPPK	

9b-CP Nilai evaluasi organisasi

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas organisasi berdasarkan penilaian organisasi di luar Kementerian Keuangan.

IKU ini mengukur tingkat dua komponen, yaitu:

a. Nilai evaluasi reformasi birokrasi; dan
b. Indeks Evaluasi SAKIP

Kedua penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

a. Nilai evaluasi reformasi birokrasi

   Nilai evaluasi reformasi birokrasi dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 jenis Reformasi Birokrasi, yaitu Reformasi Birokrasi General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan Reformasi Birokrasi Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dengan tema tertentu).

   Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui Keputusan Menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1) Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2) Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3) Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk menjaga tata kelola Reformasi Birokrasi Kemenkeu agar sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 3 dan 9 Tahun 2023, maka IKU ini juga memperhitungkan aktivitas sesuai arahan KemenPAN-RB, dengan rincian sebagai berikut.

Q	Jenis	*Trajectory*			
		Target	Bobot	Target	Target per Q
Q1	*Output* nilai Reformasi Birokrasi	91	40%	36,4	50,05
	Aktivitas Q1 (Membuat Tim, Membahas Hasil Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, Menyusun Renaksi, Menginput Renaksi di Portal RB, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen))	91	15%	13,65	
Q2	Aktivitas Q2 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen))	91	15%	13,65	63,7
Q3	Aktivitas Q3 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen))	91	15%	13,65	77,35
Q4	Aktivitas Q4 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen), Meso (KL terkait), Makro (KemenPAN-RB))	91	15%	13,65	91,00

b. Indeks evaluasi SAKIP

Indeks evaluasi SAKIP mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

1) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 20%).

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 terdapat 9 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Tindak Lanjut dianggap selesai jika penjelasan/data dukung telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu KemenPAN-RB.

Kriteria	Indeks
≥ 5 hari kerja sebelum *deadline**)	120
1 ≤ x < 5 hari kerja sebelum *deadline*	110
tepat waktu sesuai tanggal *deadline*	100
1 ≥ x > 5 hari kerja setelah *deadline*	90
≥ 5 hari kerja setelah *deadline*	80

2) Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Inspektorat Jenderal (bobot 20%).

   Indeksasi atas nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Itjen menggunakan skala 1-100.

Nilai	Indeks Nilai
93 ≤ x	120 (Predikat AA)
92 ≤ x < 93	110 (Predikat AA)
91 ≤ x < 92	100 (Predikat AA)
90 ≤ x < 91	90 (Predikat AA)
x < 90	80 (Predikat A ke bawah)

3) Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%).

   Nilai Evaluasi SAKIP Kemenkeu merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP

antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2. Formula IKU

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Capaian Nilai Evaluasi RB/Target} + \text{Capaian Indeks Evaluasi AKIP}}{2}$$

3. Perhitungan Capaian IKU

Pada tahun anggaran 2024, IKU Nilai Evaluasi Organisasi ditetapkan sebesar 100. Adapun realisasi, target dan capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi disajikan dalam tabel berikut.

BPPK	SS: Pengelolaan Organisasi, SDM, dan IT yang adaptif 9b-CP Nilai evaluasi organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	102,29	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Capaian	**102,29**	**102,86**	**102,86**	**105,73**	**105,73**	**104,48**	**104,48**	

Capaian IKU **Nilai Evaluasi Organisasi** pada tahun 2024 adalah **104,48** yang diperoleh dari:

a. Nilai evaluasi reformasi birokrasi

Q	Jenis	Realisasi		
		Nilai	Bobot	Total Nilai
Q1	*Output* nilai Reformasi Birokrasi	93,34	40%	37,336
	Aktivitas Q1 (Membuat Tim, Membahas hasil RB tahun sebelumnya, Menyusun Renaksi,	100	15%	15

Q	Jenis	Realisasi		
		Nilai	Bobot	Total Nilai
	Menginput Renaksi di Portal RB, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen))			
Q2	Aktivitas Q2 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen))	100	15%	15
Q3	Aktivitas Q3 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen))	100	15%	15
Q4	Aktivitas Q4 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen), Meso (KL terkait), Makro (KemenPAN-RB))	100	15%	15
	Total Nilai			97,34

Target komponen Nilai Reformasi Birokrasi adalah 91 sedangkan realisasinya adalah 97,34 sehingga capaian pada = 97,34 : 91 = **106,97**

b. Indeks Evaluasi SAKIP

Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi dari Indeks evaluasi SAKIP adalah sebesar **105,** dengan rincian sebagai berikut.

1) Terdapat 6 rekomendasi evaluasi AKIP KemenPAN-RB yang ditargetkan pada triwulan I telah ditindaklanjuti (Realisasi 100). Adapun terkait rekomendasi yang ditargetkan pada triwulan III telah ditindaklanjuti lebih awal (Realisasi 120) sehingga **realisasi komponen penyelesaian tindak lanjut** adalah sebesar **110**;
2) **Nilai evaluasi mandiri AKIP** Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-508/MK.09/2024 tanggal 11 Juni 2024 adalah sebesar 91,87 (naik 0,22 poin dari tahun sebelumnya) sehingga realisasi adalah **100** (91≤x<92);
3) Telah dilakukan *entry meeting* Evaluasi AKIP oleh KemenPan-RB secara nasional melalui Youtube tanggal 28 Mei 2024. . Sampai dengan laporan ini dibuat Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemenkeu belum dirilis, sehingga digunakan nilai tahun 2023 sebesar 88,50 (Realisasi: 100 ((88,50≤x<89));
4) Rata-rata realisasi indeks evaluasi AKIP = (110x20%) + (100x20%) + (100x60%) = **102.**

Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi = (106,97 + 102)/2 = 104,48

IKU Nilai evaluasi organisasi merupakan IKU baru di BPPK sehingga target dan realisasinya tahun ini tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IKU ini juga tidak terdapat dalam Renstra ataupun Renja BPPK.

Tabel 3. 29 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	100	104,48

Pada level K-*Two*, IKU Nilai Evaluasi Organisasi hanya terdapat di Sekretariat BPPK dengan target, realisasi dan capaian yang sama dengan level K-*One*.

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi, tidak ada kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian komponen evaluasi reformasi birokrasi, namun pada komponen evaluasi AKIP terdapat kendala berupa adanya kebutuhan data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan waktu pengumpulan data yang mendesak sedangkan data tersebut tersebar di seluruh unit BPPK.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapain target, namun target yang ditetapkan tersebut tetap dapat terpenuhi. Berikut ini adalah *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi sepanjang tahun 2024.

1. Pelaksanaan FGD penyusunan LAKIN (Laporan Kinerja) di lingkungan BPPK;

2. Penyelesaian Rekomendasi tindak lanjut Evaluasi AKIP Internal 2022 misalnya mengunggah dokumen Perjanjian Kinerja dan LAKIN BPPK pada e-SAKIP Reviu KemenPANRB sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
3. Penyampaian narasi IKU dan kinerja lainnya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) Setjen dalam rangka penyusunan LAKIN Kemenkeu Tahun 2023;
4. Penyelesaian penyusunan LAKIN BPPK dan Sekretariat BPPK 2023;
5. Pengumpulan dan reviu LAKIN 2023 di lingkungan BPPK;
6. Koordinasi dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan penilaian Evaluasi AKIP Internal Tahun 2023 di Pusdiklat Bea dan Cukai;
7. Mengikuti Kegiatan Pembahasan tindak lanjut Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023 yang dilaksanakan oleh KemenPANRB;
8. Penyampaian dokumen tambahan dalam rangka pelaksanaan AKIP BPPK oleh Itjen;
9. Pengumpulan dokumen dalam rangka pemenuhan tindak lanjut catatan dan rekomendasi KemenPANRB pada Evaluasi AKIP 2023;
10. Pengisian matriks Rencana Aksi Kemenkeu Tahun 2023 dan 2024 dalam rangka Persiapan Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024;
11. Penyusunan paparan pendalaman evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB tahun 2024.

5. Rencana Aksi

IKU Nilai Evaluasi Organisasi masih akan diimplementasikan di BPPK pada tahun 2025. Untuk memastikan pencapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi pada tahun berikutnya, terdapat beberapa rekomendasi rencana aksi yang telah disusun untuk tahun 2025 sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Penetapan Perjanjian Kinerja dan Manajemen Risiko BPPK	Sekretariat BPPK	Tahun 2025
2.	Penyusunan dan Pelaporan LAKIN BPPK dan Sekretariat BPPK	Sekretariat BPPK	
3.	Pelaksanaan DKRO Triwulan I, II, II dan IV	Sekretariat BPPK	

9c-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK

1. Definisi IKU

Tujuan IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK adalah untuk mengukur keandalan TIK Kemenkeu.

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK diukur melalui tiga komponen yaitu:

1. Tingkat *downtime* sistem TIK;
2. Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK; dan
3. Tingkat Pemulihan Layanan TIK

Pengukuran IKU ini pada BPPK hanya mengukur tingkat penyelesaian proyek strategis TIK dimana proyek strategis pada tahun ini adalah pengembangan KLC 2.4.1 yang berfokus pada otomasi proses bisnis *core* BPPK serta penataan organisasi BPPK.

2. Formula IKU

Realisasi IKU	=	Indeks capaian "Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK"

3. Perhitungan Capaian IKU

Berikut ini adalah target, realisasi dan capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK pada tahun 2024.

BPPK	SS: Pengelolaan Organisasi, SDM, dan IT yang adaptif 9c-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-24**	**Pol/KP**
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	Max/TLKV
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK di BPPK pada tahun 2024 adalah 120%. Adapun progres dari BPPK sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- Pengembangan fitur prioritas iterasi 4 (kuartal 4 tahun 2024) berupa penerbitan surat keterangan pembelajaran (SKP) yang mengadopsi implementasi *e-seal*/segel elektronik dari BSSN pada modul KLC *Office*;
- Pelaksanaan uji coba/*testing* Modul KLC Office, baik untuk fitur prioritas maupun fitur-fitur utama lainnya menghasilkan dokumen *user acceptance test* (UAT);
- Pelaksanaan *deployment* iterasi 1 s.d. 4 pada *service production*, sehingga Modul KLC *Office* dapat diakses pada https://klc2.kemenkeu.go.id/office untuk mendukung migrasi fitur dari Semantik dan KLC Administrator;
- Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan Modul KLC *Office* melalui pelaksanaan Pelatihan Pemanfaatan LMS untuk Pengelolaan Pembelajaran pada 9-12 Desember 2024 di Pusdiklat Keuangan Umum dengan peserta 41 pegawai BPPK.

Komponen IKU "Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK" pada unit BPPK adalah "Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK". Indikator kinerja tersebut sudah lama dimiliki oleh BPPK namun indikator ini mengalami reformulasi sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga terdapat dalam Renstra dan Renja BPPK. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan perbandingan target renstra/renja, target IKU, realisasi, dan capaian komponen tingkat penyelesaian proyek strategis TIK.

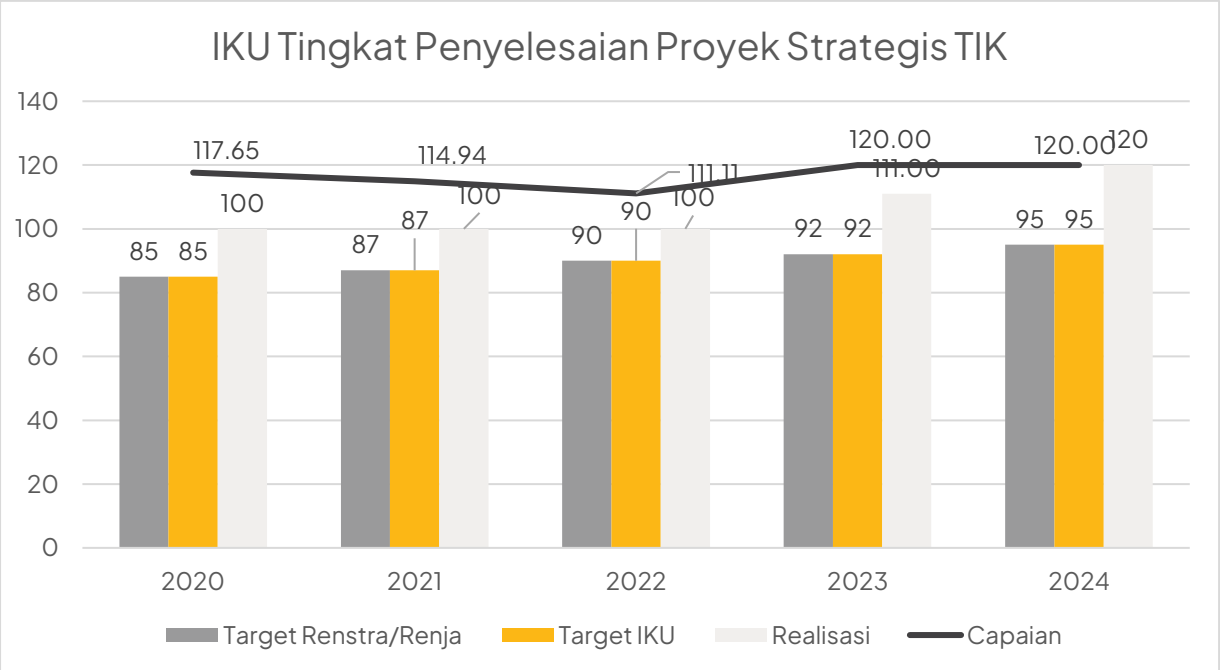

Tabel 3. 30 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat penyelesaian Proyek Strategis TIK

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja BPPK	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	85%	85%	-	-	85%	100%
2021	87%	87%	87%	-	87%	100%
2022	90%	90%	90%	-	90%	100%
2023	92%	92%	92%	-	92%	111%
2024	95%	95%	95%	-	100%	120%

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. Keterbatasan SDM: SDM-IT (TIKMP) yang *available* untuk mengerjakan proyek strategis ini, karena terlibat pula dalam pengembangan proyek lain, seperti pada proyek IS *data analytics*, KLF, dan lain-lain.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaiannya, namun *extra effort* yang dilakukan berhasil membuat target IKU ini dapat tercapai di tahun 2024. *Extra Effort* yang dilakukan oleh tim Sekretariat BPPK adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian *model security* (*centralized user service*);
2. Penyesuaian sertifikat untuk pelatihan yang bersifat *asynchronous*;
3. Pelaksanaan migrasi data *user*;
4. Pelaksanaan pembahasan spesifikasi fitur, khususnya sertifikat pelatihan mengimplementasikan teknologi TTE dan/atau *e-Seal* sertifikat;
5. Pengembangan Modul Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan (PMP) pada KLC;
6. Pengembangan Modul Tim Kerja pada KLC;
7. Pengembangan Modul *Stakeholder* pada KLC;

8. Pengembangan Modul Administrator pada KLC;
9. Pengujian terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan;
10. Pelaporan terhadap fitur yang telah dikembangkan; dan
11. Pelaporan terhadap fitur yang telah dikembangkan.

5. Rencana Aksi

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun terkait IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK di masa mendatang

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Analisis masukan perbaikan	Setban (Bagian TIKMP dan Bagian OTL)	2025
2.	*Development bug*		
3.	*Testing* internal fitur		

9d-N Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *Data Analytics*

1. Rencana Aksi

IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytic* bertujuan untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. IKU ini mengukur capaian pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu (termasuk *data analytics*). Persentase penyelesaian inisiatif Program IS RBTK dapat diukur secara berkala sesuai dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap *milestone* penyelesaian masing-masing inisiatif Program IS RBTK.

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan *milestone* IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

Inisiatifis Strategis dengan UIC BPPK adalah Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang terstruktur dan efektif berbasis peran melalui *Learning Path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, sedangkan *data analytics* dengan UIC BPPK adalah penerapan AI pada *Platform Knowledge Management System* Kementerian Keuangan.

2. Perhitungan Capaian IKU

Pada tahun anggaran 2024, IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* ditargetkan dapat mencapai 94%. Dari pengukuran yang telah dilakukan, realisasi IKU mencapai 100% yang menjadikan capaian dari IKU ini berada di angka 106,38%. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU ini.

BPPK	SS: Pengelolaan Organisasi, SDM, dan IT yang adaptif 9d-CP Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%	Max/TLKV
Realisasi	27,31%	46,91%	46,91%	77,15%	77,15%	100%	100%	
Capaian	**118,74**	**101,99**	**101,11**	**111,81**	**111,81**	**106,38**	**106,38**	

IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* telah dimiliki sejak tahun 2020 namun pada tahun 2024 terdapat formulasi (perubahan nomenklatur dan perubahan komponen) sehingga tidak dapat dilihat perbandingan target dan realisasi secara langsung.

Tabel 3. 31 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK Dan Data Analytics

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	75%	75%	75%	-	85%	94,32%
2021	77%	77%	77%	-	87,5%	98,16%
2022	80%	80%	80%	-	92%	94,60%
2023	82%	82%	82%	-	92%	99,58%

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2024	85%	85%	85%	-	94%	100%

Pada level K-*Two*, IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* hanya terdapat pada Sekretariat BPPK dengan target dan realisasi yang sama dengan level K-*One*.

3. Upaya Pencapaian IKU

Dalam mencapai IKU ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Penyusunan *learning path* idealnya dilakukan setelah aspek kritis, *knowledge*, dan *skill* (KSA) dari JFKN selesai disusun. Namun, pada perkembangannya penggalian kompetensi JFKN dilakukan oleh BPPK melalui Tim PMO dengan UE 1 terkait, yang dilaksanakan paralel dgn penyusunan *learning path*-nya.
2. Konversi dan validasi aset intelektual level 1 dan 2 membutuhkan arahan dan keputusan pimpinan.

Berikut ini ada *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*.

1. Umum
   a. Penyusunan konsep *charter* dan *Work Breakdown Structure* (WBS) IS dan *Data Analytics* (DA) BPPK Tahun 2024;
   b. Penyampaian konsep *charter* dan WBS IS dan DA BPPK Tahun 2024 ke Tim Reformasi Birokrasi/*Central Transformation Office* melalui kegiatan Minilabs yang diselenggarakan oleh *Central Transformation Office*; dan
   c. Penetapan IS Kemenkeu Tahun 2024 oleh Menkeu melalui KMK Nomor 170 Tahun 2024.
2. IS *Learning Path*
   a. Pembentukkan Tim Teknis Penyusun *Learning Path* yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPK;

b. Penunjukkan nama-nama perwakilan pejabat/pegawai dari Unit Eselon I (selaku pembina teknis JFKN) yang nantinya berperan sebagai SME dalam penyusunan *Learning Path*;
c. Pelaksanaan rapat koordinasi awal Tim Teknis Penyusun *Learning Path*;
d. Pelaksanaan studi literatur dan penyusunan kajian tentang *Learning Path;*
e. Penyusunan *grand design Learning Path* JFKN
f. Penyusunan kertas kerja kolaborasi dalam rangka penyusunan *Learning Path*, karena pengumpulan data *learning path* selaras dan sejalan dengan penyusunan *Knowledge Skill*/KSA (Biro Organta);
g. Pelaksanaan *kick off* pengisian kertas kerja KSA dan *Learning Path* dengan mengundang perwakilan UE 1 (Kolaborasi dengan Biro Organta);
h. Pelaksanaan pemetaan peran dari tiap jenjang JFKN;
i. Penyelesaian konsep awal *Learning Path* oleh Tim Penyusun;
j. Pelaksanaan rapat pembahasan konsep awal *Learning Path* bersama Unit Eselon I dalam rangka akselerasi penyelesaian *learning path* JFKN;
k. Pelaksanaan penyelarasan dan pendetilan hasil pemetaan, dan saat ini menunggu hasil konfirmasi dari Unit Eselon I;
l. Permintaan masukan konsep awal *Learning Path* ke Unit Eselon I melalui ND-2383/PP.1/2024;
m. Pelaksanaan harmonisasi dan finalisasi *Learning Path* JF KN pada tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2024; dan
n. Pelaksanaan diseminasi konsep dan penyampaian rekomendasi pemanfaatan *Learning Path* JFKN bersamaan dengan kegiatan harmonisasi hasil AKP tahun 2025 pada 30 September 2024.

3. IS *Data Analytics*
   a. Penyusunan *project management* pada SubBagian Sistem Informasi-TIKMP untuk memetakan pegawai dalam rangka penyelesaian *project data analytics* secara tepat waktu;
   b. Pembuatan *Business Requirements Document* dalam rangka penyusunan *data analytics;*
   c. Pelaksanaan pengumpulan data dan riset AI;
   d. Pelaksanaan eksplorasi data aset intelektual level 3 dan 4;
   e. Pembuatan diagram alir/Arsitektur AI KMS;

f. Pelaksanaan riset model konversi audio/video/*pdf-to-text*;
g. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur konversi ke teks;
h. Pembuatan UI validasi, *Chat*, dan modul konversi;
i. Pembuatan modul validasi teks konversi;
j. Pelaksanaan konversi aset intelektual ke teks;
k. Pelaksanaan PoC/uji coba algoritma dan model;
l. Pelaksanaan validasi teks hasil konversi;
m. Pemilihan model AI pada KMS;
n. Pembuatan UI/UX *chat*;
o. Pelaksanaan UAT pada KMS Kemenkeu;
p. Perolehan *transaction log* pengguna;
q. Pembuatan UI/UX fitur *chat* GPT;
r. Penyusunan dokumen *user* manual sebagai panduan penggunaan fitur KMS *Chat*;
s. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan fitur KMS *Chat* bersamaan dengan kegiatan forum Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan.

4. Analisis atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU ini adalah Penyelesaian IS RBTK tidak sesuai dengan rencana. Sampai dengan triwulan IV, risiko ini tetap pada level rendah dengan besaran risiko 11 (yang sama dengan besaran risiko pada Q3 & Q4) dan sesuai dengan besaran risiko residual yang diproyeksikan pada awal tahun 2024. Secara umum progres pengerjaan pada setiap tahapan dan kegiatan mitigasi yang direncanakan telah terpenuhi baik terkait IS RBTK *Data Analytic* (*chatbot*) penerapan AI pada *platform* KMS maupun untuk IS RBTK *Learning Path*.

Tren risiko Penyelesaian IS RBTK tidak sesuai dengan risiko sepanjang tahun 2024 diilustrasikan dengan grafik berikut.

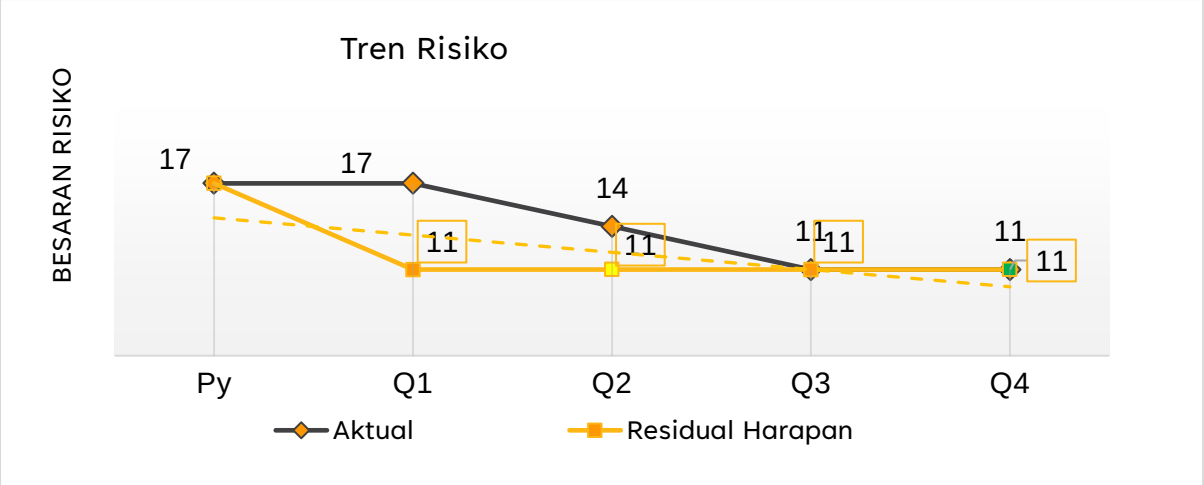

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Data Analytic*
   a. Pelaksanaan riset model *chat*-GPT 3.5 dan model *chat*-GPT 4 turbo vision untuk kebutuhan vektorisasi KC;
   b. Permintaan *server development* ke Pusintek melalui ND-685/PP.1/2024 dan saat ini sedang dilakukan uji coba menggunakan infrastruktur Pusintek;
   c. Pelaksanaan *knowledge capture* tim AI JDIH melalui MsTeams pada tanggal 23 Februari 2024;
   d. Permintaan penyediaan kebutuhan infrastruktur inisiatif strategis *data analytic* BPPK kepada Pusintek (ND-658/PP.1/2024);
   e. Pembuatan modul dan UI/UX (*User Interface/User Experience*) validasi teks hasil konversi;
   f. Pelaksanaan tahapan Implementasi (Pembuatan UI/UX fitur *chat* GPT);
   g. Pelaksanakan sosialisasi fitur KMS *Chat* bersamaan dengan forum Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan

2. *Learning Path*
   a. Penyusunan SK Tim *Learning Path;*
   b. Pelaksanaan FGD *one-on-one* pembahasan *Learning Path* dengan Unit Eselon I Kemenkeu;
   c. Pelaksanaan harmonisasi *Learning Path* JF KN;
   d. Pelaksanaan diseminasi konsep *Learning Path* JF KN bersamaan dengan harmonisasi AKP 2025:

e. Penyelesaian SK Tim *Learning Path*.

Pada tahun 2025 Risiko ini akan di-*assess* kembali, mengingat pada tahun ini terdapat IS RBTK baru yang diusulkan yakni rekomendasi pelatihan dan aset intelektual pada *platform* KLC. Namun, berdasarkan histori capaian IS-RBTK yang senantiasa tercapai, level risiko ini dapat diproyeksikan berada pada level rendah (besaran risiko 6 s.d 11) di tahun 2025. Berikut ini adalah rekomendasi yang disusun terkait risiko ini untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan *assessment* risiko terhadap identifikasi risiko baru sesuai dengan IS RBTK yang baru di tahun 2025 dalam rangka menganalisis level kemungkinan dan dampak untuk menghitung besaran risiko, serta menganalisis relevansi dan mengidentifikasi langkah mitigasi risiko.
2. Identifikasi risiko yang bersifat *upside*, selain risiko yang bersifat *downside*, terhadap pencapaian tujuan organisasi.

5. Rencana Aksi

IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* masih akan berlanjut di tahun 2025. Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk tahun 2025.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Monitoring implementasi IS RBTK secara berkelanjutan	Sekretariat BPPK (OTL dan TIKMP)	Tahun 2025

SS-10. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Selain itu, organisasi juga membutuhkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan barang milik negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. 32 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel			112,89
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00	117,16	117,16
10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	90,06	107,09

Indeks capaian untuk SS ini adalah **112,89**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS "Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel" ini adalah sebagai berikut.

10a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15

1. Definisi IKU

IKU Indeks kualitas pengelolaan BA 15 (BPPK) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.
Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU kualitas pengelolaan keuangan BA 015, yaitu:

1. Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4)

   Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan indeks 4, WDP dengan 4-6 pengecualian (3,4); WDP dengan 7-9 pengecualian (3,2); WDP dengan 10-12 pengecualian (3); WDP dengan >12 pengecualian (2); Tidak Wajar (1); Tidak Menyatakan Pendapat (0).

   Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP

   Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2023 (atas LK s.d. TA 2022) yang statusnya masih "dalam proses" per 1 Januari 2024 dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2024 atas LK BA 015 tahun 2023.

   Selanjutnya IKU ini juga memperhitungkan tingkat penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2023. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2023.

2. IKKPA (Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

   Indeks kinerja anggaran Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

   - Perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) mengacu pada PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

- Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan KMK 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.
- Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. IKU IKKPA triwulan I s.d. triwulan III ditentukan oleh nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran. IKU IKKPA triwulan IV ditentukan oleh nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dan Indikator Perencanaan Anggaran.

2. Formula IKU

Realisasi	=	(Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 * 50%) * (IKKPA * 50%)

Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2023	-	70%	70%	70%
B.1. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	100%	21%	21%	21%
B.2. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	-	9%	9%	9%

Nilai persentase tersebut merupakan bobot pengali untuk masing-masing hasil perhitungan formula pada setiap komponen.

NKA Triwulan, Triwulan II, Triwulan III = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, II, dan III : Realisasi IKPA/95,0

NKA Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

Kriteria Indeks	Formula Konversi Tw IV	Indeks Tw IV
Realisasi NKA ≥ 95,00	120	120
(91,00<Realisasi NKA<95,00)	100 + (Realisasi NKA - 91) : 0,2 **	100 < X < 120
Realisasi NKA = 91,00	100	100
(80,00<Realisasi NKA<91,00)	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 *	80 < X < 100
Realisasi NKA = 80,00	80	80
Realisasi NKA < 80,00	79,9	79,9

3. Perhitungan Capaian IKU

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 pada tahun 2024.

BPPK	SS: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel 10a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	105,26	111,58	111,58	120	120	117,16	117,16	Max/TLKV
Capaian	105,26	111,58	111,58	120	120	117,16	117,16	

Realisasi ini diperoleh dari perhitungan berikut.

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Bobot	Nilai	Realisasi (Nilai Tertimbang)
A. Nilai IKPA				**98,45**
1	Revisi DIPA	10,00	100,00	10,00
2	Deviasi Hal III DIPA	15,00	100,00	15,00

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Bobot	Nilai	Realisasi (Nilai Tertimbang)
3	Penyerapan Anggaran	20,00	92,75	18,55
4	Belanja Kontraktual	10,00	100	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10,00	100	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10,00	100	10,00
7	Capaian *Output*	25,00	100	25,00
Pengurang Nilai IKPA				
1	Dispensasi SPM			0
B. Nilai SMART				**99,53**
	NKA			**98,99**

1. Komponen Indeks kualitas pelaporan keuangan	Bobot	Nilai
1.1. Indeks opini BA 15	70%	120
1.2. Indeks tinjut	21%	105,83
1.3. Indeks penyelesaian konsep temuan	9%	90
	Capaian LK	114,3243

2. Komponen Indeks Kinerja Anggaran	Bobot	Nilai BPPK
2.1. Nilai SMART	50%	99,53
2.2. Nilai IKPA	50%	98,45
		98,99
	Capaian NKA	120

Realisasi BPPK = (50% x Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015) + (50% x NKA)

= (50% x 114,3243) + (50% x 120) = **117,16**

Terdapat perubahan formulasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 karena adanya perubahan komponen sehingga target dan capaian tahun ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Perkembangan target dan realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 dari tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 33 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2021	-	-	-	-	90	95,79
2022	-	-	-	-	100	112,78
2023	-	-	-	-	100	114,66
2024		-	-	-	100	117,16

Pada level K-*Two*, IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 diturunkan secara *indirect* kepada K-*Two*. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA-15 pada level K-*Two* BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat BPPK	100	120	120
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	100	120	120
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100	120	120
Pusdiklat Pajak	100	120	120
Pusdiklat Bea dan Cukai	100	120	120
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	100	120	120
Pusdiklat Keuangan Umum	100	120	120
PKN STAN	100	120	120

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Reformulasi baru yang mengatur penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran TA 2024 berdasarkan PER-5/PB/2024 yang lebih kompleks; dan
2. Nilai indikator Penyerapan Anggaran belum mencapai nilai optimal karena seluruh satker BPPK belum dapat mencapai target penyerapan triwulan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan realisasi IKU ini dan memperoleh capaian yang melampaui target, *extra effort* yang dilakukan oleh BPPK adalah sebagai berikut.

1. Melakukan verifikasi kualitas data dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat satker dan Unit Eselon I;
2. Memfasilitasi permintaan dokumen BPK dan data secara lengkap dan tepat waktu;
3. Melakukan *one-on one meeting* dengan satker sampel pemeriksaan lapangan BPK;
4. Memberikan tanggapan atas konsep temuan BPK agar tidak naik menjadi temuan;
5. Melakukan *video conference coaching clinic* dan *forum Community of Practice* pengelolaan keuangan BPPK secara rutin untuk *monitoring*, koordinasi dan asistensi satker dalam pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran; dan
6. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perkembangan informasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

5. Analisis Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU ini adalah Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target. Sampai dengan akhir tahun 2024, level risiko turun pada level rendah dengan besaran risiko 11. Level dan besaran risiko sampai dengan triwulan IV lebih kecil dari besaran risiko residual akhir tahun. Namun yang masih menjadi perhatian adalah pola penyerapan anggaran kegiatan tiap triwulan masih belum sesuai dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan regulator yang menyebabkan ketercapaian komponen Penyerapan Anggaran IKPA menjadi tidak optimal dan terdapat RO yang efisiensinya tidak optimal dikarenakan

penyerapan Rincian *Output* Standar Biaya Keluaran Umum (RO SBKU) >80%. Beberapa catatan diantaranya realisasi belanja tidak sesuai rencana serta belum sesuai dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Secara keseluruhan nilai indikator komponen penyerapan anggaran dalam IKKPA sampai dengan triwulan IV belum mencapai nilai maksimal dengan realisasi nilai tertimbang sebesar 92,49 dari 100. Serta Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran belum mencapai nilai optimal yaitu sebesar 96,85 dari 100.

Tren risiko Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target sepanjang tahun 2024 tersaji dalam grafik berikut.

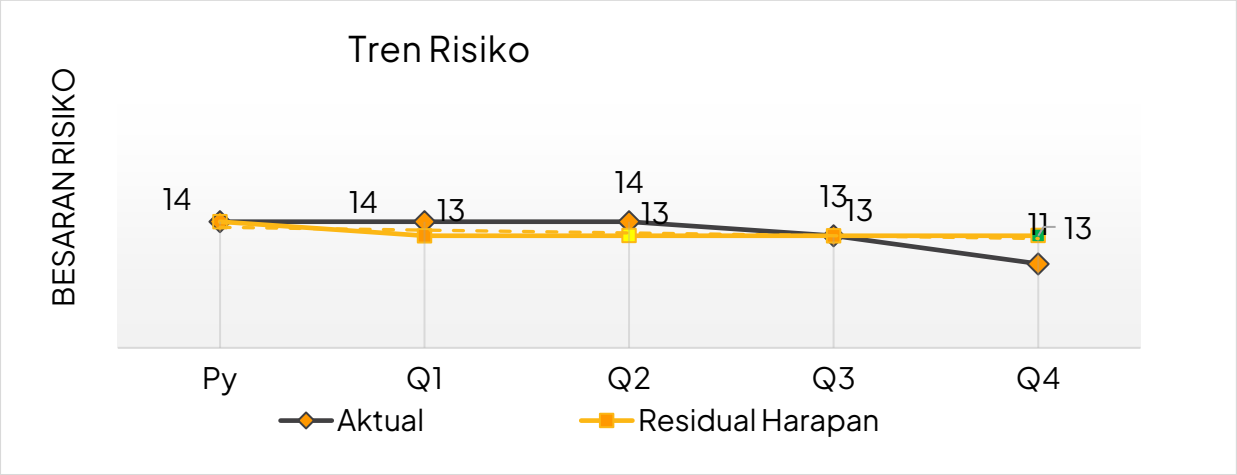

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemantauan dan proyeksi atas realisasi dan capaian kinerja satker secara berkala;
2. Menerbitkan *flash report* bulanan sebagai moitoring kinerja anggaran bagi para pimpinan satker/unit kerja;
3. *Coaching Clinic* Pengelolaan Keuangan dan Kinerja pada sakter dan unit di BPPK;
4. Melakukan *One on One Meeting* Konfirmasi Data Proyeksi Realisasi Anggaran dan *Output* Satker/Unit BPPK TA 2024 pada 6 Januari 2025; dan
5. Melakukan beberapa simulasi nilai capaian IKKPA dan mengkoordinasikan simulasi dengan PIC di Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen untuk mendapatkan tanggapan sampai dengan akhir periode tahun 2024.

Risiko tidak tercapainya target Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK untuk profil risiko tahun 2025 akan terus dipantau. Pemantauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan level risiko triwulan IV 2024, guna memastikan langkah mitigasi yang efektif dan pencapaian target kinerja yang optimal. Untuk risiko ini, besaran dan level risiko di tahun depan diproyeksikan berada pada level risiko sedang (12 s.d 15). Berikut ini adalah rekomendasi dimasa yang akan datang terkait Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target.

1. Melakukan analisis akar penyebab (*root cause analysis*) terhadap risiko yang belum sepenuhnya teratasi dalam rangka memahami penyebab kegagalan secara komprehensif untuk menyusun solusi yang lebih efektif;
2. Peningkatan koordinasi antar unit untuk membahas progress pelaksanaan anggaran dan mengatasi kendala;
3. Melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
4. Melakukan perbaikan pada aspek mitigasi risiko terkait dengan rencana kegiatan mitigasi yang membutuhkan keterlibatan lebih dari satu unit yang termasuk ke dalam Satker BPPK Pusat dan setiap satker pada lingkungan BPPK;
5. Mereview dan mengidentifikasi kembali indikator risiko utama yang dapat berfungsi sebagai simtom/sinyal awal keterjadian risiko yang dapat menyebabkan ketidak tercapaian penyerapan anggaran IKKPA; dan
6. Melakukan identifikasi risiko tidak hanya yang bersifat *downside* (menghambat/menggagalkan) tujuan organisasi tetapi juga mengidentifikasi risiko yang bersifat *upside* (dapat meningkatkan potensi ketercapaian tujuan organisasi).

6. Rencana Aksi

IKU Indeks kualitas pengelolaan BA 15 (BPPK) masih dimiliki oleh BPPK di tahun 2025. Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk periode mendatang.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Memantau dan memenuhi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK di lingkungan BPPK	Sekretariat BPPK, Pusdiklat, PKN STAN, dan BDK	Sepanjang tahun 2025

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
2.	Meningkatkan koordinasi intensif dengan pemilik kegiatan masing-masing Bagian dan Pusdiklat		
3.	Berkoordinasi dengan Rocankeu dan DJA terkait *mapping* SBK/SBKU dan RO untuk satker di lingkungan BPPK		

10b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

1. Definisi IKU

IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan diukur melalui dua komponen, yaitu:

a. Indikator Pengelolaan Aset : mengukur seluruh komponen pengelolaan BMN yang terdiri dari Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas laporan keuangan, Realisasi PNBP atas pengelolaan Aset, Ketepatan waktu penyampaian laporan, Asuransi BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut BMN Rusak Berat, Dokumen Kepemilikan BMN dan penggunaan BMN sesuai dengan ketentuan.
   (bobot 60%), target 87,5 (indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)
b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) : persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU *Mandatory* di tahun 2024 berfokus pada **pemanfaatan sistem**

aplikasi pengadaan, yaitu SiRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing*, Non-*e-Tendering* dan Non-*e-Purchasing*, serta e-Kontrak.
(bobot 40%), target 79.

2. Formula IKU

Realisasi IKU	=	(a x 60%) + (b x 40%)

3. Perhitungan Capaian IKU

Realisasi dan capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan sepanjang tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut.

BPPK	SS: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel 10b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	42,50	60	60	70	70	84,10	84,10	Max/TLKV
Realisasi	56,11	65,03	65,03	87,67	87,67	90,06	90,06	
Capaian	120	108,38	108,38	120	120	107,09	107,09	

Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal. Adapun realisasi IKU Nilai Indikator Pengelolaan Aset sama untuk seluruh unit eselon I di Kemenkeu.

Sampai dengan triwulan IV, realisasi IKU Nilai Indikator Pengelolaan Aset adalah sebesar 88,75 sedangkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa sampai dengan triwulan IV adalah 92,03 sehingga realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan adalah (60%x88,75)+(40%x92,03)=90,06.
IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan mengalami reformulasi pada Tahun 2024 sehingga tidak dapat dilihat perbandingan target dan realisasi dari tahun ke tahun.

IKU ini juga tidak terdapat dalam Renstra Kemenkeu ataupun BPPK. Indikator ini juga tidak tercantum dalam Renja.

Tabel 3. 34 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-		
2021	-	-	-	-		
2022	-	-	-	-		
2023	-	-	-	-		
2024	-	-	-	-	84,10	90,06

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Beberapa komponen belum memilki realisasi pada Triwulan I ;
2. Masih belum optimalnya *awareness* pengelola pengadaan untuk memutakhirkan data RUP masih kurang;
3. Pekerjaan besar BMN seperti Sensus BMN, memerlukan usaha dan waktu yang lebih ekstra, sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan rutin BMN lainnya, salah satunya yaitu realisasi RP4 BMN yang menumpuk diakhir tahun; dan
4. Beberapa SDM pengelola pengadaan dan BMN membutuhkan peningkatkan kapasitas karena terdampak mutasi/rotasi (baru menempati posisi tersebut).

Berikut ini adalah *extra effort* yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024.

1. Pelaksanaan koordinasi internal untuk pemanfaatan aplikasi pengadaan;

2. Pelaksanaan asistensi dan *monitoring* dalam rangka pengelolaan BMN.

5. Analisis Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN adalah penyelesaian *transit office* dan hunian sementara Kemenkeu tidak sesuai dengan jadwal. Risiko ini turun ke level rendah dengan besaran risiko **10**. Penurunan level dan besaran risiko ini mempertimbangkan setiap kegiatan mitigasi yang telah dilaksanakan sampai dengan penyelesaian Transit Office. Telah dilaksanakan serah terima pekerjaan pada tanggal 19 Juli 2024 sesuai dengan BAST Pertama Pekerjaan nomor BAST-032/PPK/BPP.09/2024.

Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren risiko Penyelesaian *transit office* dan hunian sementara Kemenkeu tidak sesuai dengan jadwal.

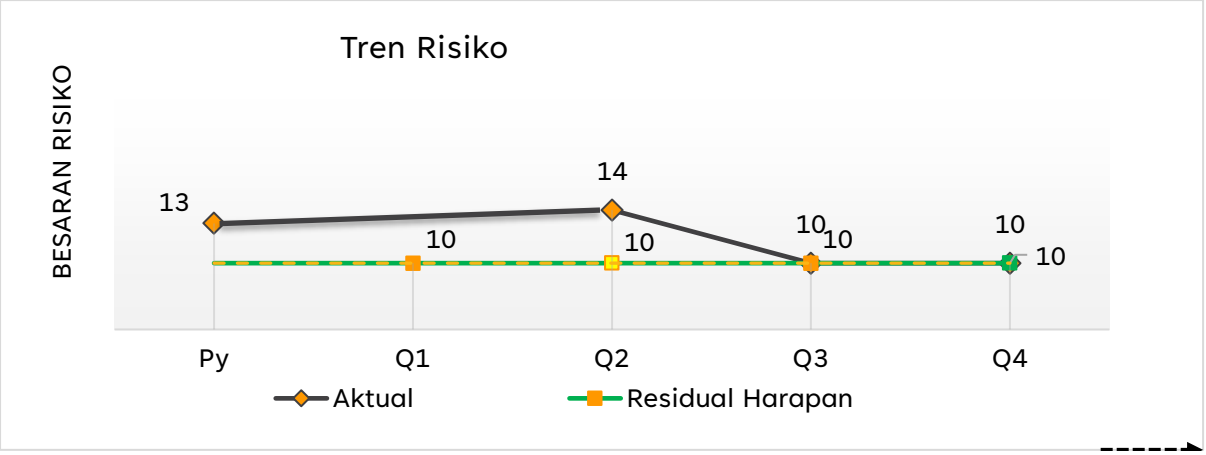

Berikut ini adalah mitigasi risiko yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

1. Pelaksanaan lelang untuk pelaksana konstruksi dan pengadaan langsung untuk konsultan pengawas;
2. Pelaksanaan rapat *monitoring* mingguan secara rutin atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
3. Pemberian Surat Peringatan dan *show cause meeting* serta addendum termin dan nomor rekening penyedia;
4. Pemantauan *on the spot;*
5. Pemeriksaan dan penyerahan serah terima pekerjaan konstruksi *Transit Office* dan Hunian Kemenkeu di BDK Balikpapan.

Di tahun 2025, risiko ini sudah tidak ada mengingat *transit office* telah selesai dibangun di tahun 2024 sehingga tidak ada rencana mitigasi yang akan dilakukan.

6. Rencana Aksi

IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan masih akan diimplementasikan di BPPK pada tahun 2025. Adapun rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk mendukung penccapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Koordinasi dengan Setjen, dalam rangka pengadaan dan pengelolaan BMN.	Sekretariat BPPK, seluruh satker Komite LO	2025
2.	Melaksanakan kegiatan harmonisasi dalam rangka *monitoring* kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.		
3.	Asistensi dan pendampingan bagi PIC pengelolaan BMN dan pengadaan seluruh satker BPPK.		

SS-11. Komunikasi Publik yang Efektif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan sebuah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 35 : SS Komunikasi Publik yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
11	**Komunikasi publik yang efektif**			**120,00**
11a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100,00	120,00	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120,00** Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS "Komunikasi Publik yang Efektif" ini adalah sebagai berikut.

11a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

1. Definisi IKU

Tujuan IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan adalah untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi.

IKU ini dihitung dari komponen berikut:

1. Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot : 50%), yang terdiri atas:
   a) Capaian efektivitas komunikasi publik (40%)
   b) Partisipasi agenda setting (20%)
   c) *Employee Advocacy* (20%)
   d) Capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat (20%)
2. Pengelolaan Opini Negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot 50%), yang terdiri atas:
   a) Persentase Opini Negatif pada media massa dan media sosial (bobot 55% dengan target 12,8%)
   b) Penanganan Opini Negatif (bobot 45%, target 60-69%) pada media massa dan media sosial

2. Formula IKU

Realisasi IKU	=	[(50% Realisasi Komponen IEEK) + (50% Realisasi Komponen Opini Negatif)] *100

3. Perhitungan Capaian IKU

Target dan realisasi IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan pada tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut.

BPPK	SS: Komunikasi publik yang efektif 11a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	112,75	115,5	115,5	115,5	115,5	120,00	120,00	
Capaian	112,75	115,5	115,5	115,5	115,5	120,00	120,00	

Realisasi IKUI Indeks efektivitas ekosistem kehumasan pada BPPK hanya diperoleh dari realisasi komponen Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan rincian sebagai berikut.

Unsur				Total Realisasi Q4	Total Realisasi	Capaian Q4
Efektivitas Komunikasi Publik	Partisipasi *Agenda Setting*	*Employee Advocacy*	Penguatan Hub. Kelembagaan			
3,8730	3,7967	4	4	3,9085	3,91	120

IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dimiliki oleh BPPK pada tahun 2023 namun pada tahun ini terdapat reformulasi sehingga target dan realisasi IKU tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya. Indikator ini tidak terdapat dalam Renstra BPPK namun terdapat dalam Renja BPPK tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3. 36 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja BPPK	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2021	-	-	-	-	3,55	3,75
2022	-	-	-	-	3,55	3,91
2023	-	-	3,55	-	100	120
2024	-	-	100	-	100	120

Adapun pada level Eselon II, IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan hanya terdapat pada Sekretariat BPPK.

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam mencapai IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat BPPK, yaitu :

1. Narasi besar Kemenkeu yang kurang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi di BPPK, sehingga menyebabkan kesulitan memutuskan target audiens dan strategi komunikasi BPPK. Fokus utama BPPK tahun 2024 adalah penataan organisasi yang menyebabkan strategi komunikasi dapat mengalami perubahan di tahun berjalan.
2. Mayoritas *stakeholder* BPPK adalah internal Kemenkeu, sementara Narasi Besar Kemenkeu memiliki target audiens masyarakat umum.
3. Meningkatnya target aktivasi *Employee Advocacy* sehingga menjadi tantangan tersendiri agar mampu meningkatkan engagement pegawai untuk ikut serta dalam program tersebut.

Beberapa kegiatan/tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan dokumen strategi komunikasi BPPK dengan tema "Perluasan Edukasi Keuangan Negara untuk mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui APBN" untuk mendukung Narasi Besar Kemenkeu;

2. Penyampaian ND ke seluruh satker BPPK agar semua pegawai berpartisipasi pada kegiatan *Employee Advocacy*;
3. Pelaksanaan monitoring *Employee Advocacy* seluruh unit di BPPK;
4. Pemenuhan *Agenda Setting* melalui amplifikasi konten media sosial;
5. Pendataan dan pelaporan kegiatan strategi komunikasi di BPPK ke Biro KLI;
6. Pelaksanaan aktivasi akun *Hootsuite* BPPK sebagai salah satu *tools monitoring* media sosial;
7. Pelaksanaan *monitoring* terhadap isu negatif #wakeuppknstan telah dilakukan di media sosial maupun media massa;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan Humas PKN STAN, untuk menyusun *holding statement*, konsolidasi internal PKN STAN karena terindikasi sumber isu negatif adalah pada intenal PKN STAN, PKN STAN tidak mem-*posting* apapun di media sosial pada periode 22 – 27 Februari.
9. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di Kemenkeu sebagai salah satu strategi komunikasi Kemenkeu.

5. Analisis Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah persepsi negatif atas pemberitaan di media massa atau media sosial tentang layanan BPPK. Risiko persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial tentang layanan BPPK sampai dengan triwulan IV tetap berada pada level rendah dengan besaran risiko 9. Besaran risiko ini lebih tinggi dari proyeksi residual harapan pada awal tahun di besaran risiko 8, namun level risiko sama pada level rendah.

Berikut ini adalah tren risiko persepsi negatif atas pemberitaan di media massa atau media sosial tentang layanan BPPK sepanjang tahun 2024.

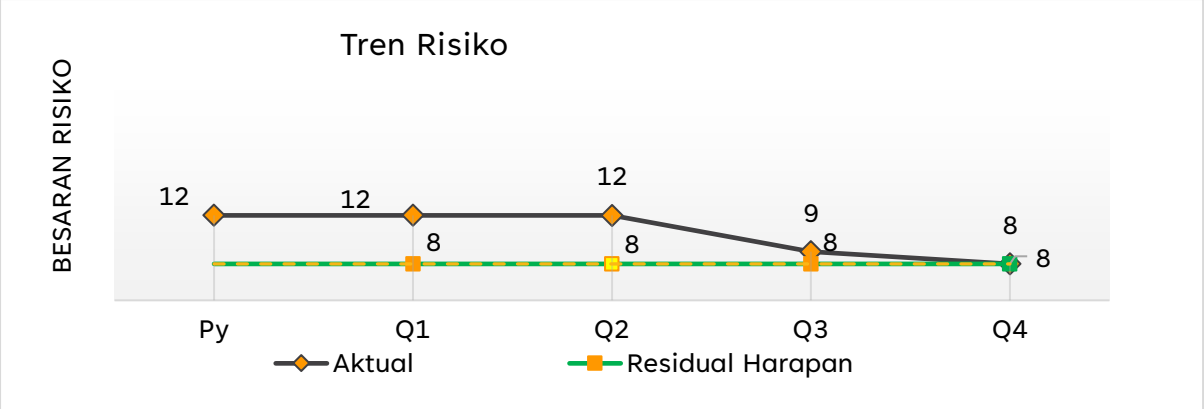

Mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kegiatan atas dukungan *employee advocacy* Kemenkeu
2. Mengunggah/*repost* konten positif di media sosial terkait topik layanan BPPK
3. Secara kontinu dilakukan monitoring isu di media sosial maupun media massa untuk memitigasi adanya potensi isu negatif.
4. Menyusun atau membuat *holding statement* dalam rangka memberikan kesamaan pernyataan terhadap isu-isu negatif yang muncul.
5. Melakukan edukasi dan *counter* narasi melalui kolaborasi dan sinergi dengan akun media sosial Kementerian Keuangan dan UE 1 lainnya
6. Mengerahkan pegawai untuk berpartisipasi mengamplifikasi pesan/berita/konten positif di media sosial melalui *employee advocacy* dengan bersinergi bersama *Learning Organization* Kehumasan.

Proyeksi tren risiko pada tahun depan, untuk risiko persepsi negatif terhadap layanan BPPK akan berada pada level risiko sedang (Besaran risiko 12 s.d 15) sampai dengan level risiko tinggi (Basaran risiko 16 s.d 19). Hal ini dengan mempertimbangkan penambahan tugas dan fungsi BPPK untuk tahun 2025 serta kemungkinan bertambahnya ekspektasi pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh BPPK. Rekomendasi untuk periode berikutnya adalah perlu difokuskan pada edukasi publik dengan berkoordinasi dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi untuk menjawab isu yang berkembang di media sosial baik di lingkup BPPK maupun lingkup Kemenkeu.

6. Rencana Aksi

Rekomendasi Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada masa mendatang adalah sebagai berikut.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Memetakan taktik dan saluran komunikasi untuk Semester II yang sesuai dengan pesan kunci strategi komunikasi 2025.	Setban (Bagian TIKMP)	2025
2.	Melanjutkan *monitoring* pemenuhan *agenda setting* dan *employee advocacy*.	Setban (Bagian TIKMP)	2025

SS-12. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 37 : SS Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
12	**Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**			**113,19**
12a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	110	110
12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95,19	116,09

Indeks capaian untuk SS ini adalah **113,19**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS "Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif" adalah sebagai berikut.

12a-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

1. Definisi IKU

Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP mencerminkan kualitas pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

1. Penyelesaian kertas kerja *monitoring* tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP, paling lambat 8 Maret 2024;
2. Pemahaman peserta Bimtek atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP;
3. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP kepada BPKP; dan
4. Nilai maturitas SPIP dari BPKP.

Komponen IKU ini pada tahun 2024 sebagai berikut:

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP (target 100)	100%	50%	30%	15%
2. Tingkat pemahaman peserta Bimtek atas Pelaksanaan PM Maturitas SPIP (target 100)		50%	30%	15%
3. Indeks ketepatan waktu penyampaian LHPM Maturitas SPIP (target 100)			40%	20%
4. Indeks maturitas SPIP target 100 (4 (skala 5)				50%

Indeks ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP (target 100)

Tanggal Penyampaian ke BPKP	Indeks
≤ 6 Maret 2024	120
7 Maret 2024	110
8 Maret 2024	100
9 Maret 2024	90
≥ 10 Maret 2024	80

Tingkat pemahaman peserta Bimtek atas Pelaksanaan PM Maturitas SPIP (target 100)

Nilai	Indeks Nilai
85 ≤ x	120
80 ≤ x < 85	110
75 ≤ x < 80	100
70 ≤ x < 75	90
x < 70	80

Indeks ketepatan waktu penyampaian LHPM Maturitas SPIP (target 100)

Tanggal Penetapan	Indeks
25 Oktober 2024 < x	120
31 Oktober < x < 25 Oktober 2024	110
31 Oktober 2024	100
8 November < x < 1 November 2024	90
≥ 8 November 2024	80

Indeks maturitas SPIP target 100 (4 (skala 5))

2. Formula IKU

∑ (Capaian komponen per triwulan x bobot)

3. Perhitungan Capaian IKU

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU "Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP" pada tahun 2024.

BPPK	SS: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif 12a-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	110	110	110	110	110	110	
Capaian	100	110	110	110	110	110	110	

1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP (Bobot 10%); Target 100, realisasi 100
2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Bimtek Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP (Bobot 10%); Target 100, realisasi 120
3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK (Bobot 20%); target 100, realisasi 110 (4,397 skala 5))
4. Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP (Bobot 60%). Target 100, realisasi 110 (4,122 skala 5), nilai sementara berdasarkan notisi BPKP tanggal 16 Desember 2024

Maka realisasi = (10% x 100) + (10% x120) + (20% x 110) + (60% x 110) = 110

IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan IKU baru di BPPK sehingga tidak dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaiannya dari tahun ke tahun. IKU. IKU ini juga tidak terdapat dalam Renstra dan Renja Kemenkeu ataupun BPPK.

Tabel 3. 38 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	100	110

Adapun pada level Eselon II, IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP hanya terdapat pada Sekretariat BPPK.

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Sekretariat BPPK menghadapi kendala sebagai berikut.

1. Perbedaan persepsi antara tim asesor Kemenkeu dengan Tim evaluator BPKP dalam penilaian maturitas SPIP, khususnya penilaian atas komponen struktur dan proses sehingga Nilai maturitas SPIP turun sebesar 0,275 dari Nilai PM dan PK Kemenkeu, namun demikian nilai dari BPKP naik 0,104 dari sebelumnya 4,018 di tahun 2023.
2. Sistem Pengendalian *Intern* yang diterapkan dinilai BPKP kurang efektif dan optimal dalam mencegah pelanggaran (*fraud* maupun *non fraud*).

Adapun upaya yang dilakukan Sekretariat BPPK dalam rangka pencapaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP sampai dengan berakhirnya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP tanggal 8 Maret 2024

2. Pelaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kemenkeu oleh BPKP kepada seluruh tim evaluator level unit dan satker tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan hasil survei, efektivitas pelaksanaan Bimtek mendapatkan nilai 89,10.
3. Pemaparan progres pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi di DKRO Kemenkeu Wide-*One* Triwulan II Tahun 2024
4. Pelaksanaan dan rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) secara manual. Berdasarkan hasil PM dan PK, Nilai Maturitas SPIP Kemenkeu sebesar indeks 4,397 (realisasi 110)
5. Peng-*Input*-an tahapan Persiapan PM pada aplikasi e-*Integrity*.
6. Rekapitulasi nilai maturitas SPIP dan penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP kepada Menkeu dan BPKP.
7. Penyampaian surat Karocankeu kepada Koordinator Pengawasan Bidang Keuangan, Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP No S-1/SJ.12/2024 tanggal 21 Desember 2024 hal tanggapan atas notisi hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2024.

5. Rencana Aksi

Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi yang disusun dalam rangka pencapaian IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP untuk periode berikutnya.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPKP	Subbag KI-SDMKI	2025

12b-CP Indeks efektivitas unit kepatuhan internal (UKI)

1. Definisi IKU

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen yaitu komponen pengungkit, proses, dan hasil.

A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

1. Komitmen Pimpinan (7,5%)
   Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)
   Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI.
3. Akses Data dan Informasi (5%)
   Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.
4. Komunikasi (5%)
   Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

B. Komponen Proses (25%)

1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%)
   Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.
2. Penyusunan RCM dan *Fraud Risk Scenario* (FRS) (4%)
   Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.
3. Profiling Pegawai (4%)
   Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.
4. Penyusunan Program Kerja (3%)
   Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.
5. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian *Intern* (3%)
   Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian *Intern* serta tindak lanjut hasil pemantauannya.
6. Penarikan Simpulan Efektivitas Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian *intern* dari hasil pemantauan pengendalian *intern* yang dilakukan oleh UKI.

7. Pelaporan Pemantauan Pengendalian Internal (4%)
   Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

C. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)
   Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (*fraud* dan *nonfraud*) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal
2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (15%)
   Subkomponen ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
3. Kejadian Tangkap Tangan dan/atau Kasus Korupsi (20%)
   Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun *fraud* yang ada di unit eselon I.

Isu Utama yang dihadapi terkait IKU Indeks efektivitas UKI saat ini adalah sebagai berikut.

1. Hampir di seluruh unit Eselon I mendapat nilai minor untuk sub komponen komitmen pimpinan;
2. Pemantauan oleh UKI belum bisa dilaksanakan dengan optimal karena kendala penyampaian dokumen pengendalian oleh manajemen; dan
3. Perubahan organisasi yang sedang berjalan berimplikasi perlunya penyesuaian kegiatan pemantauan.

2. Formula IKU

Q2 (15) = Efektivitas Pengendalian *Intern* Tahun 2023 serta rencana kegiatan pemantauan dan skenario risiko kecurangan Tahun 2024 --> dokumen bukti: Laporan Efektivitas Pengendalian *Intern*/LEPI (5%), Rencana Pemantauan Tahunan (5%), dan Laporan Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* Semester II 2023 (5%)

Q3 (20) = Hasil pemantauan pengendalian *intern* pada Semester I Tahun 2024 --> dokumen bukti: LHPPU Semester I 2024 (20%)

Q4 (82) = Pemenuhan standar efektivitas UKI --> dokumen bukti: hasil penilaian IKU indeks efektivitas UKI

Penghitungan:

Nilai Komponen Pengungkit (25%) + Nilai Komponen Proses (25%) + Nilai Komponen Hasil (50%)

3. Perhitungan Capaian IKU

BPPK	SS: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif 12b-CP Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	15	15	20	20	82	82	Max/TLKV
Realisasi	N/A	15	15	20	20	95,19	95,19	
Capaian	N/A	100	100	100	100	116,09	116,09	

Realisasi IKU Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal diperoleh berdasarkan pelaksanaan kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Kemenkeu Tahun 2024. Hasil Penilaian ini dilaporkan dalam Nota Dinas Inspektur III nomor ND-867/IJ.4.2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas UKI pada BPPK. Pada Laporan tersebut BPPK mendapatkan nilai **95,19** (skala 100) yang merupakan total nilai dari Komponen Pengungkit sebesar 18,93 (skala 20), Komponen Proses sebesar 33,51 (skala 35), dan Komponen Hasil sebesar 42,75 (skala 45).

IKU Indeks Efektivitas UKI adalah IKU yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI dari tahun ke tahun.

Tabel 3. 39 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI

Tahun	Target					Realisasi
	Renstra Kemenkeu	Renstra BPPK	Renja BPPK	Standar Nasional	Perjanjian Kerja	
2020	-	-	-	-	70	85,4
2021	-	-	-	-	75	90,18
2022	-	-	75	-	80	90,62
2023	-	-	80	-	82	90,34
2024	-	-	82	-	82	95,19

Adapun pada level Eselon II, IKU Indeks Efektivitas UKI hanya terdapat pada Sekretariat BPPK.

4. Upaya Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPPK. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPPK adalah sebagai berikut.

1. Pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal belum bisa dilaksanakan dengan optimal karena kendala penyampaian dokumen pengendalian oleh manajemen.
2. Perubahan organisasi yang sedang berjalan berimplikasi perlunya penyesuaian kegiatan pemantauan.
3. Kurangnya intensitas komunikasi dan pembinaan dari Unit Kepatuhan Internal pada tingkat yang lebih tinggi atau dari Inspektorat Mitra.
4. SDM Unit Kepatuhan Internal belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan karena dampak dari rotasi dan mutasi.

Beberapa kegiatan/tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal ini sepanjang tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Inspektorat VI sebagai Auditor Mitra BPPK dalam merencanakan pemantauan;

2. Pendokumentasian secara formal arahan pimpinan dalam pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal;
3. Penyampaian usulan pelatihan terkait dengan tugas dan fungsi Kepatuhan Internal bagi personil UKI yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan lebih intens dengan seluruh Unit Kepatuhan Internal di BPPK dengan menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin;
5. Pelaksanaan rapat koordinasi Unit Kepatuhan Internal secara berkala; dan
6. Pelaksanaan penilaian efektivitas Unit Kepatuhan Internal oleh Inspektorat III.

5. Rencana Aksi

Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk periode berikutnya.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	*Update* data informasi kompetensi dan kualifikasi pegawai UKI BPPK.	Sekretariat BPPK	2025
2.	Penyampaian usulan pelatihan bagi personil UKI yang belum terpenuhi kualifikasi (terlebih yang terkena dampak mutasi/rotasi).		
3.	Melaksanakan koordinasi UKI dan Itjen dalam rapat koordinasi UKI		

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2024

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp 710.468.086.787,00 atau **97,49%** dari total pagu sebesar Rp728.761.335.000,00.

Berikut ini adalah realisasi anggaran BPPK sampai dengan berakhirnya tahun 2024 menurut jenis belanja.

Tabel 3. 40 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2024 Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Belanja Pegawai	10.874.426.000	9.661.431.780	88,85
2	Belanja Barang	392.532.393.000	377.207.846.742	96,10
3	Belanja Modal	325.354.516.000	323.598.808.265	99,46
	Jumlah	**728.761.335.000**	**710.468.086.787**	**97,49**

Perbandingan realisasi penyerapan anggaran per jenis belanja untuk tahun anggaran 2023 s.d. 2024 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	2023			2024(dalam ribuan)		
		Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Pegawai	9.876.406	9.517.666	96,37%	10.874.426	9.661.432	88,85
2	Barang	364.361.763	353.648.826	97,06%	392.532.393	377.207.847	96,10
3	Modal	62.511.443	57.922.705	92,66%	325.354.516	323.598.808	99,46
	Jumlah	436.749.612	421.089.197	96,41%	728.761.335	710.468.087	97,49

Realisasi belanja BPPK sampai dengan periode 31 Desember 2024 mencapai 97,49% (terserap Rp710,47 M dari pagu Rp728,76M) dengan rincian Belanja Pegawai 88,85% (terserap Rp9,66M dari pagu Rp10,87M), Belanja Barang 96,10% (terserap Rp377,2 M dari pagu Rp392,53M), dan Belanja Modal 99,46% (terserap Rp323,6M dari pagu Rp325,35M).

Realisasi belanja pegawai hanya terdiri dari uang makan dan lembur dengan realisasi uang makan sebesar 90,15% (terserap Rp8,91M dari pagu Rp9,88M) dan realisasi uang lembur sebesar 75,41% (terserap Rp695,84JT dari pagu Rp0,92M).

Realisasi anggaran BPPK menurut jenis kegiatan sepanjang tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3. 41 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2024 Menurut Jenis Kegiatan

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4678	Legislasi dan Litigasi	21.488.000	9.653.316	44,92%
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	287.498.296.000	283.131.598.821	98,48%
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN)	150.197.687.000	149.014.351.772	99,21%
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1.043.056.000	962.350.415	92,26%
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	545.934.000	438.271.184	80,28%
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	242.111.587.000	230.341.411.210	95,14%
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	46.503.082.000	45.921.366.811	98,75%
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	190.558.000	128.437.045	67,40%
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	88.205.000	60.115.471	68,15%
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	561.442.000	460.530.742	82,03%
	Total	728.761.335.000	710.468.086.787	97,49%

2. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran antara lain.

1. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung dan bangunan di beberapa satker BPPK;

2. Akumulasi perencanaan kegiatan dan RPD yang disusun oleh satker/unit kerja tidak sesuai dengan target penyerapan anggaran triwulanan dan menumpuk pada triwulan IV;
3. Adanya pembatalan pelatihan atas inisiasi unit Eselon I seperti Pelatihan Penguatan Karakter *Talent* Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan pada Pusdiklat Bea dan Cukai.

3. Realisasi *Output* BPPK Tahun 2024

Realisasi *Output* Kegiatan BPPK tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3. 42 : Realisasi *Output* BPPK Tahun 2024

KODE	URAIAN	TARGET		TOTAL	
		VOL	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
4678	**Legislasi dan Litigasi**				
4678.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1	**100,00%**
4679	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**				
4679.CAN	**Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	47	Unit	47	**100,00%**
4679.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	12	Dokumen	12	**100,00%**
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Layanan	12	**100,00%**
EBA.105	Kerumahtanggaan	152	Layanan	152	**100,00%**
EBA.994	Layanan Perkantoran	152	Layanan	152	**100,00%**
4679.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				
EBB.101	Kendaraan Bermotor	14	Unit	14	**100,00%**
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	8.511	Unit	8.511	**100,00%**

KODE	URAIAN	TARGET		TOTAL	
		VOL	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
EBB.103	Gedung/Bangunan	33.057	m2	33.057	100,00%
4679.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**				
EBD.101	Dokumen Perbendaharaan Unit	1	Dokumen	1	100,00%
EBD.102	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1	Dokumen	1	100,00%
EBD.103	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	1	Dokumen	1	100,00%
EBD.104	Laporan Keuangan Unit	1	Laporan	1	100,00%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	1	100,00%
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				
4680.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	117	Unit	117	100,00%
4680.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA. 104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Layanan	12	100,00%
EBA. 105	Kerumahtanggaan	12	Layanan	12	100,00%
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100,00%
4680.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	353	Unit	353	100,00%
EBB.106	Gedung/Bangunan	12.560	m2	12.560	100,00%
4681	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**				
4681.BMB	**Komunikasi Publik**				
BMB.101	Jurnal BPPK	2	volume	3	150,00%
BMB.102	Corpu TV	1	volume	1	100,00%
BMB.104	Strategi Komunikasi	1	kegiatan	1	100,00%
BMB.105	Pameran/Eksibisi	1	kegiatan	1	100,00%
BMB.106	Publikasi Media Elektronik	1	Media	1	100,00%

KODE	URAIAN	TARGET		TOTAL	
		VOL	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
4682	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**				
4682.BMB	**Komunikasi Publik**				
BMB.101	Jurnal Keuangan Negara	5	Volume	19	**380,00%**
BMB.102	Layanan Kepustakaan	12	layanan	12	**100,00%**
4683	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**				
4683.AAG	**Peraturan Menteri**				
AAG.101	Peraturan/Kebijakan Terkait Organisasi	1	PerMen	2	**200,00%**
4683.AAH	**Peraturan Lainnya**				
AAH.101	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1	Peraturan	1	**100,00%**
4683.ABA	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**				
ABA.101	Kajian Akademis	27	Kajian	27	**100,00%**
4683.ADE	**Akreditasi Lembaga**				
ADE.101	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan	1	Lembaga	1	**100,00%**
4683.DCF	**Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan**				
DCF.101	Program dan Materi	217	Kegiatan	414	**190,78%**
DCF.102	Pembelajaran Digital	112.915	Orang	229.818	**203,53%**
DCF.103	Pembelajaran Klasikal	12.022	Orang	18.474	**153,67%**
DCF.104	Sertifikasi Kompetensi	567	Orang	2.172	**383,07%**
DCF.105	Alat Uji	8	Kegiatan	32	**400,00%**
DCF.106	Manajemen Pengetahuan	462	Kegiatan	586	**126,84%**
DCF.107	Karyasiswa Beasiswa	281	Orang	345	**122,78%**
DCF.108	*Regional Training Center*	1	Kegiatan	5	**500,00%**
DCF.309	Pembelajaran Digital terkait *Managing Change : Agile and Adaptive Mindset* (PU)	60.000	Orang	68.501	**114,17%**

KODE	URAIAN	TARGET		TOTAL	
		VOL	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
DCF.310	*Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah (PU)	542	Orang	1.114	**205,54%**
DCF.311	Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak (PU)	12.944	Orang	13.585	**104,95%**
DCF.312	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah (PU)	294	Orang	318	**108,16%**
DCF.313	Pembelajaran terkait *Green and Sustainable Financing* (PU)	700	Orang	2.116	**302,29%**
DCF.314	Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU)	359	Orang	369	**102,79%**
4683.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.103	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	**100,00%**
EBA.105	Learning Organization	1	Laporan	1	**100,00%**
EBA.106	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	1	Rekomendasi	1	**100,00%**
EBA.107	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1	Rekomendasi	2	**200,00%**
EBA.108	Pengelolaan Inovasi BPPK	1	Rekomendasi	1	**100,00%**
EBA.109	AKP Kewilayahan	11	Rekomendasi	11	**100,00%**
EBA.994	Layanan Perkantoran	152	Layanan	152	**100,00%**
4683.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**				
EBC.101	Pengembangan SDM	2.013	Orang	2.860	**142,08%**
EBC.102	Administrasi Kepegawaian	1.240	Orang	1.240	**100,00%**

KODE	URAIAN	TARGET		TOTAL	
		VOL	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
EBC.103	Pengelolaan Jafung	353	Orang	538	**152,41%**
4684	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**				
4684.DBA	**Pendidikan Tinggi**				
DBA.101	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	2.225	Mahasiswa	4.178	**187,78%**
DBA.103	Penerimaan Mahasiswa Baru	5.000	Orang	8.419	**168,38%**
DBA.104	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	250	Orang	2.597	**1.038,80%**
DBA.105	Program Pengabdian Masyarakat	50	Kegiatan	125	**250,00%**
DBA.106	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	31	Penelitian	40	**129,03%**
DBA.301	Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara/Daerah/BUM Desa (PU)	1.400	Orang	1.466	**104,71%**
4684.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.102	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	**100,00%**
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	**100,00%**
4684.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**				
EBC.101	Pengembangan Sumber Daya Manusia	267	Orang	274	**102,62%**
4685	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal**				
4685.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**				
EBD.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1	Rekomendasi	1	**100,00%**
4686	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal**				
4686.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**				
EBD.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	4	Rekomendasi	4	**100,00%**
4687	**Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi**				

KODE	URAIAN	TARGET		TOTAL	
		VOL	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
4687.FAB	**Sistem Informasi Pemerintahan**				
FAB.101	KLC	1	Sistem Informasi	1	**100,00%**

4. Penjelasan atas Realisasi *Output* BPPK Tahun 2024

Pada tahun 2024 Eselon I BPPK memiliki 67 RO, dimana sampai dengan berakhirnya tahun 2024, 27 RO memiliki realisasi melebihi target (>100%) dan 40 RO sisanya telah tercapai sesuai target (100%).

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Disiplin fiskal melalui terjaganya defisit anggaran selalu menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas di antaranya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga efisiensi belanja negara. Penggunaan sumber daya di BPPK telah dilakukan dengan efisien terbukti dengan dilakukannya identifikasi sisa anggaran untuk dilakukan optimalisasi anggaran. Optimalisasi ini dilakukan melalui revisi anggaran untuk realokasi anggaran yang ada pada kegiatan yang sesuai dengan perubahan kebutuhan ataupun adanya penambahan kegiatan pada periode berjalan.

1. Revisi DIPA 1.0 tanggal 30 Januari 2024 (Revisi Kewenangan DJA)
   dilaksanakan melalui penetapan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) nomor S-102/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengesahan Revisi Anggaran dalam rangka Memenuhi Kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2024 pada Unit BPPK. Bersamaan dengan pelaksanaan pemenuhan *Automatic Adjustment*, BPPK juga melakukan revisi pergeseran anggaran antar Unit Eselon I dalam rangka penambahan anggaran *Transit Office* pada BDK Balikpapan. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPK nomor ND-179/PP.1/2024 tanggal 13 Januari 2024 hal Permintaan *Cost Sharing* Anggaran Renovasi BDK Balikpapan untuk *Transit*

Office Kementerian Keuangan di IKN, dari total kebutuhan sebesar Rp7.782.657.000,00 porsi Cost Sharing dari BPPK sebesar Rp1.037.300.000,00

2. Revisi DIPA 3.0 tanggal 8 Maret 2024 (Revisi Kewenangan DJA)
   dilakukan pergeseran anggaran antar-Unit Eselon I; antar jenis belanja; dan perubahan RPD pada halaman III DIPA. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Pelatihan Teknis Kegiatan Penguatan Karakter pada BPPK (411868), pemenuhan kebutuhan belanja gaji PPPK pada PKN STAN (477198) dan penyesuaian belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja yang mendukung penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan organisasi
3. Revisi DIPA 5.3 tanggal 22 Mei 2024 (Revisi Kewenangan DJA – Distribusi Anggaran AKP Kewilayahan)
   Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
   - Distribusi anggaran dan *output* RO AKP Kewilayahan dari DIPA Satker BPPK (411868) ke 11 Balai Diklat Keuangan.
   - Distribusi anggaran dan *output* RO Pelatihan Penguatan Pengawasan di
   - Kawasan Perbatasan – PU dari DIPA BPPK (411868) – Pusdiklat BC ke BDK Pekanbaru, BDK Yogyakarta dan BDK Denpasar.
   - Penyesuaian *volume output* di beberapa satker.
   - Pergeseran anggaran belanja barang operasional ke belanja barang non-operasional.
   - Pergeseran antar jenis belanja dan antar satker
4. Revisi DIPA 7.3 tanggal 4 Juli 2024 (Revisi Kewenangan DJA – Buka Blokir BDK Pekanbaru)
   Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
   - Pembukaan Blokir Halaman IV.A DIPA di BDK Pekanbaru sebesar Rp1.644.240.000,00 pada RO Gedung/Bangunan sebagai tindak lanjut telah disetujuinya RKBMN Pengadaan 2024 Perubahan Kedua.
   - Pendetailan RO Gedung/Bangunan dan Pemenuhan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Satker BPPK (411868).
   - Pergeseran anggaran antar KRO dan anta rjenis belanja
5. Revisi DIPA 9.5 tanggal 7 Agustus 2024 (Revisi Kewenangan DJA – Relaksasi Automatic Adjustment dan Penambahan Anggaran antar UE I)
   Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan *Automatic Adjustment* (blokir);
- Kebutuhan tambahan anggaran *Transit Offic*e Kementerian Keuangan di IKN terkait pekerjaan tambahan/penyempurnaan;
- Kebutuhan tambahan anggaran pengisian peralatan/*furniture* dan penambahan PPNPN pasca pembangunan gedung kantor dan asrama Balai Diklat Keuangan Denpasar;
- Selain pergeseran anggaran tersebut, pada usulan revisi ini juga terdapat perubahan volume Rincian *Output* (RO) di beberapa satker

6. Revisi DIPA 10.5 tanggal 22 Agustus 2024 (Revisi Kewenangan DJA – Pergeseran BD PIM)

   Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

   - Pergeseran anggaran antar satker dari Balai Diklat Kepemimpinan (411874) ke BPPK Pusat;
   - Terdapat pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Denpasar (675741) dalam rangka pemenuhan peralatan/*furniture* pasca pembangunan Gedung Kantor dan Asrama;
   - Terdapat pergeseran anggaran antar satker dari BDK Cimahi (622429) ke BDK Denpasar;
   - Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja barang *ekstrakomptabel* pada RO Peralatan Fasilitas Perkantoran BPPK Pusat;
   - Pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan (pemanfaatan sisa anggaran kontraktual) dari RO Peralatan Fasilitas Perkantoran ke RO Pembelajaran Klasikal pada BDK Pekanbaru;
   - Terdapat pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan pada BPPK Pusat;
   - Terdapat pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO Kendaraan Bermotor sebesar dan RO Gedung/Bangunan sebesar pada BPPK Pusat;
   - Penambahan pagu dan penambahan detail pekerjaan pada RO Gedung/Bangunan

7. Revisi DIPA 11.5 tanggal 17 September 2024 (Revisi Kewenangan DJA – Penambahan Anggaran PSIAP, Distribusi RO SBKU)

   Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kebutuhan tambahan anggaran Pelatihan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP);
- Pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat ke setiap satker Balai Diklat Keuangan dalam rangka distribusi Rincian *Output* (RO) Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya;
- Pergeseran antar satker;
- Pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan
- Perubahan volume Rincian *Output* di seluruh satker.

8. Revisi DIPA 12.6 tanggal 11 Oktober 2024 (Revisi Kewenangan DJA – Penambahan Anggaran Karyasiswa dari Setjen)
   Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
   - Kebutuhan anggaran Karyasiswa beasiswa dan Pelatihan RSPP;
   - Pergeseran ke RO Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit sebesar Rp64.610.000,00, RO Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi sebesar Rp47.710.000,00 dan RO Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp15.410.000 yang berasal dari RO Rekomendasi Perencanaan Pelatihan sebesar total Rp127.730.000,00 untuk memenuhi kegiatan Penyusunan Renstra BPPK 2025-2029, kegiatan Evaluasi Program Legislasi 2024 dan Identifikasi Legislasi 2025, serta kegiatan Finalisasi Pedoman Penjaminan Mutu Pembelajaran;
   - pemenuhan RO Sertifikasi Kompetensi dan RO Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Pusdiklat AP yang diambil dari RO Manajemen Pengetahuan;
   - pemenuhan RO Pembelajaran Klasikal Pusdiklat KU sebesar Rp9.500.000,00 yang diambil dari RO Pembelajaran digital
9. Revisi DIPA 13.6 tanggal 4 November 2024 (Revisi Kewenangan DJA)
   substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
   - Pergeseran anggaran antar satker dari Politeknik Keuangan Negara STAN (477198) ke BPPK Pusat (411868);
   - Pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Yogyakarta (561178) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional kantor;
   - Pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Makassar (561225) dalam rangka memenuhi kebutuhan Pelatihan Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA;

- Pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Medan (561199), BDK Pekanbaru (675720), dan BDK Cimahi (622429) untuk memenuhi kebutuhan RO Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya;
- Pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Malang (561182) untuk memenuhi kebutuhan peralatan fasilitas perkantoran;
- Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja barang *ekstrakomptabel* pada RO Peralatan Fasilitas Perkantoran BPPK Pusat;
- Penambahan anggaran belanja barang operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan gedung/bangunan;
- Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, RO Kendaraan Bermotor, RO Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan RO Gedung/Bangunan pada BPPK Pusat;
- Penambahan pagu dan penambahan detiail pekerjaan pada RO Gedung/Bangunan pada BPPK Pusat (411868) yang dipenuhi dari sisa anggaran kontraktual.

Terkait dengan aspek belanja, pemerintah selalu berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat yang antara lain tercermin dari kebijakan penghematan anggaran serta perbaikan pola penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi belanja barang, serta peningkatan kinerja pada belanja modal.

Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, BPPK juga telah melaksanakan berbagai kebijakan penghematan anggaran sejak lama dalam berbagai bentuk berikut:

1. Efisiensi pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui:
    a. Pemanfaatan sistem aplikasi baik yang disediakan oleh Kemenkeu (misalnya Satu Kemenkeu dan E-Perjadin) atau aplikasi internal di BPPK dalam menunjang otomasi dan efisiensi pelaksanaan tugas.
2. Efisiensi pelaksanaan perjalan dinas melalui:
    a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif dimana pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring apabila masih memungkinkan.
    b. Pembayaran uang perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan maksimal 80% dari SBM.

c. Pembayaran transportasi dibayarkan sesuai dengan Daftar Pengeluaran Riil (*at cost*) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran (melalui aplikasi e-perjadin)

3. Efisiensi pemberian kudapan dan makan siang rapat.
   a. Pemberian makan siang saat rapat hanya bisa diberikan jika mengundang peserta rapat dari unit eselon I lain dan pemberian kudapan hanya jika mengundang peserta rapat dari unit eselon II lain.
   b. Pemberian makan siang dan kudapan juga hanya dapat diberikan untuk rapat yang dilaksanakan secara daring.
4. Efisiensi pemberian honorium dan jasa profesi.

   Untuk Kegiatan Pelatihan

   a. Dalam rangka perencanaan pelatihan, pembayaran honorarium penyusunan bahan ajar pelatihan hanya dapat diberikan kepada pegawai diluar BPPK.
   b. Pembayaran honorarium pengajar dalam bentuk *team teaching* yang dilakukan oleh pakar/praktisi hanya dibayarkan sebesar maksimal 80% dari harga satuan biaya honorarium.
   c. Pembayaran honorarium untuk penceramah hanya dapat diberikan apabila penceramah berasal dari luar unit Kementerian Keuangan dan merupakan Pejabata Eselon II keatas/setara.

   Untuk kegiatan Non-Pelatihan

   a. Untuk kegiatan non pelatihan, pembayaran honorarium narasumber hanya dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Kementerian Keuangan.
   b. Kegiatan yang diselenggarakan secara panel, honorarium narasumber sebesar 89% dari satuan biaya untuk kegiatan yang diampu oleh dua orang dan 70% dari satuan biaya untuk kegiatan diampu oleh tiga orang atau lebih.

Kebijakan penghematan anggaran yang diberlakukan oleh BPPK ini semakin diperkuat dengan adanya arahan Menteri Keuangan terkait efisiensi belanja untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial seperti seminar, pertemuan, *event*, konferensi, dan perjalanan dinas. Contoh efisiensi belanja yang dilakukan BPPK pada tahun 2024 adalah mengubah lokasi pelaksanaan acara Puncak KLF (Kemenkeu *Learning Festival*) yang semula akan diadakan di Aula Mezzanine menjadi Aula Gedung Lantai 5 BPPK dan pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* sehingga dapat tetap diikuti oleh pegawai-pegawai

Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Begitupun dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi BPPK yang semula akan dilaksanakan di luar kota menjadi di Aula Gedung B Lantai 5 BPPK Purnawarman.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Inisiatif Strategis (IS)

Pada tahun 2024 BPPK memiliki satu buah IS, yaitu:

Perluasan dan pengembangan program edukasi bagi para pengelola dan/atau calan pengelola keuangan negara yang inklusif dan berdampak

IS ini memiliki periode dari Januari s.d. Desember 2024. Adapun target *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Perluasan edukasi keuangan negara melalui *executive training* bagi pimpinan KLPD
2. Perluasan edukasi keuangan negara bagi mahasiswa melalui Kemenkeu *Corpu Goes to Campus* (KC-GTC)

Berikut ini adalah upaya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

1. Pelaksanaan AKP yang dipenuhi melalui *executive training* bidang keuangan negara pimpinan KLPD;
2. Penyusunan desain pembelajaran *executive training* tematis bagi pimpinan KLPD,
3. Penyelenggaraan *executive training* tematis bagi pimpinan KLPD;
4. Pelaksanaan evalusi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut penyempurnaan program *executive training* bagi pimpinan KLDP;
5. Sampai dengan September 2024, telah diselenggarakan *executive training* bidang keuangan negara pimpinan KLDI dengan total Jumlah peserta sebanyak 959 peserta; dan
6. Semua PU Klasikal telah dilaksanakan, dan PU Digital sudah berjalan s.d. Desember 2024.

2. Program Unggulan

Program/proyek unggulan merupaka nprogram yang bersifat signifikan (memiliki *leverage* tinggi) untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan unit eselon I bersangkutan atau berdasarkan penugasan/ arahan Menteri Keuangan. Pada tahun 2024, BPPK memiliki tujuh proyek unggulan. Ketujuh proyek unggulan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembelajaran Digital terkait *Managing Change : Agile and Adaptive Mindset*
   Penanggung jawab program unggulan ini adalah Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Pembelajaran Digital terkait *Managing Change* : *Agile And Adaptive Mindset* Kementerian Keuangan merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bagi seluruh Pegawai pada jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya untuk pegawai yang akan atau baru saja menjalani proses *delayering*. Pembelajaran Digital terkait ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya *agile and adaptive mindset* dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pada era baru (FWS/*Collaboration Way of Working* (CWOW)). *Output* yang diharapkan dari program unggulan ini adalah terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memahami bagaimana mengelola perubahan, *agile* dan *adaptive mindset*. Sehingga dapat berperan dan terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi untuk melakukan transformasi yang efektif.
2. *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
   Penanggung jawab program unggulan ini adalah Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Program unggulan ini merupakan pembelajaran level eksekutif kepada pemangku kebijakan di pemerintah daerah, terutama bagi level mid-manajer pengelola keuangan. Pembelajaran akan dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan Kementerian/Lembaga (KL) terkait lain, dengan metode digital dan/atau *blended learning*.
3. Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Perpajakan – Penguatan Kompetensi dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsioanl (JF) Pemeriksa Pajak
   Penanggung jawab program unggulan ini adalah Pusdiklat Pajak. Kegiatan ini berupa program pembelajaran yang bertujuan untuk membekali pegawai Ditjen Pajak terdampak perluasan JF Pemeriksa Pajak, utamanya dengan *basic knowledge* pemeriksaan pajak dan pengetahuan teknis sesuai dengan rumpunnya. Program

Unggulan Pusdiklat Pajak akan diselenggarakan dengan tiga metode pembelajaran yaitu dalam bentuk *e-learning*, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan Pelatihan Klasikal. Adapun program tersebut adalah *E-Learning* Penguatan Kompetensi JF Pemeriksa Pajak, PJJ Penguatan Kompetensi JF Pemeriksa Pajak dan Pelatihan Teknis Penguatan Kompetensi JF Pemeriksa Pajak.

4. Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan

   Penanggung jawab program unggulan ini adalah Pusdiklat Bea dan Cukai. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai bea cukai yang bertugas di Kawasan Perbatasan baik laut, darat, maupun udara dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai *border agency* dalam hal pencegahan peningkatan konflik dan pengawasan sarana transportasi di perbatasan sehingga berdampak baik untuk pencapaian sasaran strategis/inisiatif strategis Kementerian Keuangan maupun tujuan strategis Nasional seperti optimalisasi penerimaan negara, pencegahan barang larangan dan perdagangan ilegal, dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan NPP, pencegahan *trans nasional organized crime* (CITES, KLHK, dsb). Program ini terdiri dari Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Pelatihan Pengawasan Sarana Transportasi di Perbatasan.

5. Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN

   Program unggulan Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN dilaksanakan oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Program Pembelajaran yang ditujukan agar para KPB mampu melakukan optimalisasi BMN serta pemanfaatan BMN dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Substansi pembelajaran menekankan pada praktik, analisis, studi kasus dan pembuatan rekomendasi sehingga para peserta di akhir kegiatan pembelajaran dapat menyusun rekomendasi optimalisasi pemanfaatan BMN di satuan kerja masing-masing. Penyelenggaraan program pembelajaran akan dilakukan baik di Pusdiklat maupun di Balai Diklat. tanggal 2 April 2024. Pelatihan direncanakan akan mulai dilaksanakan tanggal 13 - 22 Mei 2024.

6. Penguatan Pemahaman dan Pemanfaaat *Green and Sustainabale Financing* melalui Literasi yang Masif guna Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Program unggulan Pembelajaran terkait *Green and Sustainable Financing* dilaksanakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum sebagai penanggung jawab. Kegiatan pada tahun 2024 merupakan tahun kedua dari rangkaian *grand design* dukungan Pusdiklat Keuangan Umum dalam mengawal *green financing* untuk keperluan perubahan iklim di Indonesia, *Green and Sustainable Finance – Human Capital Development and Literacy Series*. Program unggulan ini merupakan dukungan kegiatan penyiapan sumber daya manusia dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun untuk mendukung akselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai langkah nyata penanggulangan isu perubahan iklim. Pentahapan yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi pembangunan afiliasi dengan K/L atau institusi terkait seperti BPDKH, LHK, OJK, dan BI Institute terkait *climate change management financing*.

7. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara/Daerah/BUM Desa

   Penanggung jawab program unggulan ini adalah Politeknik Keuangan Negara STAN. Peran BLU PKN STAN dalam melakukan akselerasi peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui 3 program:

   a. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan pada Pemerintah Daerah.
      Akselerasi dilakukan dengan penyelenggaraan peningkatan SDM pemda melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pembiayaan kegiatan ditanggung oleh mitra.
   b. Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan pada Kementerian/ Lembaga.
      Akselerasi dilakukan melalui berbagai kerja sama pelatihan di bidang pengelolaan keuangan negara yang secara spesifik dibutuhkan oleh K/L. Pembiayaan kegiatan ditanggung oleh mitra.
   c. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan BUM Desa.
      Program ini merupakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama agar dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, termasuk penggunaan teknologi informasi (aplikasi) yang telah disiapkan oleh tim Dosen PKN STAN guna memudahkan proses penyusunan laporan keuangan.

Realisasi untuk masing-masing proyek unggulan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 43 : Realisasi Program Unggulan BPPK Tahun 2024

No.	Program/Proyek	Target		Realisasi	
		Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	Pembelajaran Digital terkait *Managing Change : Agile and Adaptive Mindset*	60.000 orang	311.993.000	68.501 orang	290.816.195
2	*Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelolaan Keuangan Negar di Lingkungan Pemerintah Daerah	542 orang	1.676.620.000	1114 orang	1.673.606.671
3	Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak	12.944 orang	10.267.299.000	13.585 orang	9.584.375.101
4	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada "Pemerintah Pusat dan Daerah"	294 oang	522.901.000	318 orang	477.781.814
5	Pembelajaran terkait *Green and Sustainable Financing*"	700 orang	185.099.000	2.116 orang	129.539.000
6	Pelatihan Penguatan "Pengawasan di Kawasan Perbatasan"	359 orang	1.574.5775.000	1369 orang	1.533.729.496
7	Akeselrasi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan	1.400 orang	1.222.501.000	1.466 orang	1.190.030.644

No.	Program/Proyek	Target		Realisasi	
		Output	Anggaran	Output	Anggaran
	Negara/Daerah/BUMN Desa				

Salah satu Proyek Unggulan BPPK, yaitu *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak/*outcome* yang positif pada implementasi Sinergi Kebijakan Fiskal di tingkat daerah dimana sebanyak 23 provinsi (60,53%) telah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan telah dinilai kesesuaiannya dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM PPKF) tahun 2025 oleh DJPK. *Executive Course* juga berhasil memberikan pemahaman sinergi pendanaan guna mendukung Pembangunan di Daerah, baik dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya, salah satunya dengan skema Pinjaman Daerah dari PT SMI. Dampak positif tersebut tergambar dari catatan PT SMI dimana 16 Pemda berminat untuk beraudiensi, 8 diantaranya sudah dilakukan tindak lanjut dengan nilai pinjaman indikatif total Rp. 2,03 Triliun.

No.	Nama Pemda	Proyek Indikatif Pinjaman	Nilai
1	Kab. Lampung Selatan	Penanganan Ruas Jalan dan Pembangunan Kantor DPRD	Rp 200 miliar
2	Kab. Manggarai Barat	Pasar	TBC
3	Kab. Pangandaran	Pembiayaan Portfolio	Rp 350 Miliar
4	Kab. Purworejo	RSUD	Rp 40 Miliar
5	Kab. Raja Ampat	Pembelian Kapal	TBC
6	Kota Kediri	Ring Road, Perumahan, Pasar, Kawasan Bisnis, Persampahan	Rp 1.014 miliar
7	Kota Manado	SPAM	Rp 80 miliar
8	Prov. Kalbar	2 RSUD	Rp 346 miliar
	Total indikatif Pinjaman		**Rp 2,03 Triliun**

3. Realisasi Jamlator

Jamlator adalah jumlah jam pelatihan yang diselenggarakan dikalikan dengan jumlah orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Jamlator Kementerian Keuangan dihitung berdasarkan proyeksi jumlah pegawai Kementerian Keuangan (*potential trainees*) sebanyak 74.607 orang dengan jam kerja efektif 1.497 jam. Untuk jamlator Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah perhitungannya dilakukan berdasarkan *potential trainees* KLID sebanyak 60.000 orang dengan jam kerja efektif 1.200 jam. Realisasi jamlator yang dihitung dalam laporan ini tidak memperhitungkan kegiatan KCOC (Kemenkeu *Corpu Open Class*) dan Webinar.

Berikut ini adalah rincian realisasi jamlator Kementerian Keuangan sampai dengan berakhirnya Tahun 2024

Tabel 3. 44 : Realisasi Jamlator Kementerian Keuangan Tahun 2024

No	Unit	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	Pusdiklat KM	988.323	1.452.733	1,3007%
2	Pusdiklat AP	162.046	368.809	0,3302%
3	Pusdiklat Pajak	1.008.460	1.379.580	1,2352%
4	Pusdiklat BC	585.105	672.478	0,6021%
5	Pusdiklat KNPK	311.772	297.662	0,2665%
6	Pusdiklat KU	431.440	984.154	0,8812%
	Total	**3.487.146**	5.155.416	4,6160%

Sementara itu capaian jamlator Non-Kementerian Keuangan sampai dengan berakhirnya Triwulan I tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 45 : Realisasi Jamlator Non Kementerian Keuangan Tahun 2024

No	Unit	Target 2024	Realisasi Tw I	Persentaser
1	Pusdiklat AP	951.526	840 372	1,1672%

2	Pusdiklat KNPK	46.639	350 332	0,4866%
	Total	**998.165**	**1.190.704**	**1,6538%**

4. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan di Kementerian Keuangan adalah penguatan pemahaman dan komitmen *stakeholder* baik internal maupun eksternal, peningkatan kebijakan yang responsif gender, dan peningkatan kualitas layanan responsif gender.

BPPK berkomitmen dengan terus berupaya meningkatkan kebijakan yang responsif gender agar dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Hal tersebut tercermin dari tersedianya sarana dan prasarana yang responsif gender dan kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender ini tercermin dari Kantor-kantor di lingkungan BPPK yang menyediakan ruang laktasi, ruang ramah anak. Rincian di beberapa kantor adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat BPPK memiliki ruang laktasi, ruang ramah anak, kamar mandi untuk disabilitas, area parkir prioritas, ramp dan lift yang ramah untuk penyandang disabilitas;
2. PKN STAN memiliki ruang laktasi dan ruang *daycare.*
3. BDK Yogyakarta memiliki ruang laktasi dan kamar ramah pengguna kursi roda;
4. BDK Denpasar memiliki 1 ruang laktasi dan 1 ruang ramah anak yang tersedia di GKN 1 Denpasar sebagai fasilitas bersama sampai dengan tahun 2024;
5. BD Kepemimpinan menyediakan 1 ruang laktasi dan 1 ruang ramah anak;
6. Pusdiklat Keuangan Umum memiliki 1 ruang laktasi;
7. Pusdiklat Pajak memiliki 1 ruang laktasi dan 1 ruang ramah anak;
8. Pusdiklat KNPK memiliki 1 ruang laktasi dan 1 ruang ramah anak;
9. PKN STAN menyediakan ruang laktasi di Gedung K dengan fasilitas sofa dan karpet, parkir biru dan pink serta melakukan pemasangan *railing* jalur disabilitas Gedung N;

10. BDK Balikpapan memiliki 1 ruang laktasi dan 1 ruang bermain Anak;
11. BDK Makassar menyediakan ruang laktasi, ruang Ramah Anak dan juga melakukan pemasangan *handrail* pada setiap kamar mandi yang berada di kamar asrama.
12. BDK Pontianak menyediakan 1 ruang laktasi, 1 toilet disabilitas, 1 area parkir prioritas, ram akses bagi penyandang disabilitas di setiap gedung (gedung kantor, gedung kelas, dan gedung asrama), dan toilet terpisah laki-laki dan perempuan
13. BDK Cimahi memiliki ruang laktasi, ruang *daycare*, dan ruang olahraga; dan
14. BDK Manado memiliki ruang laktasi dan ruang ramah anak.

Selain penyediaan sarana dan prasaran yang responsif gender, BPPK juga menerapkan kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi misalnya pada Program *Ministerial Scholarship* 4 dimana peserta yang merupakan ibu dengan balita (max 5 tahun) atau ayah yang mempunyai bayi dibawah usia 1 tahun diizinkan untuk tidak menginap di asrama.

Lebih lanjut lagi BPPK juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender sepanjang tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3. 46 : Kegiatan PUG di BPPK Sepanjang Tahun 2024

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Pembentukan kelompok kerja implementasi PUG	Pembentukan kelompok kerja implementasi PUG yang bertanggung jawab terhadap implementasi PUG di lingkungan unit kerja terkait.	Awal tahun	-
Maklumat PUG Sekretariat BPPK	Maklumat PUG disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan Sekretariat BPPK tahun 2024.	Januari 2024	-
Bintal dengan tema "Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dan Lingkungan Kerja"	Kegiatan bintal BDK Pontianak yang ditujukan untuk pegawai BDK Pontianak beserta keluarganya.	01 Februari 2024	Diikuti oleh 29 peserta yang terdiri dari 12 Laki-Laki, 7 Perempuan,

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
			dan 10 Anak-Anak
Workshop Upgrading Yourself and Development di PKN STAN	Penyelenggaraan *Workshop Upgrading Yourself and Development*	13 September 2024	Diikuti oleh 50 peserta dimana 29 peserta merupakan perempuan dan 21 peserta lainnya merupakan laki-laki
Talkshow PUG di Lingkungan Belajar Mengajar di PKN STAN	Rangkaian dari kegiatan pengasuhan kepada mahasiswa dengan mengusung tema PUG, untuk kemudian mahasiswa diminta melakukan *public campaign* kepada masyarakat, dalam hal ini siswa SD, di lingkungan sekitar kampus yang dipilih.	08 November 2024	Diikuti oleh 326 peserta dimana 179 peserta merupakan perempuan dan 151 peserta lainnya merupakan laki-laki
Pelatihan Pemberdayaan UMKM Materi Permodalan dan Pembukuan	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sebagai Ketua Kelompok Kerja Teknis Joint Program UMKM Tim Sekretariat Bersama Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta menginisiasi Pelatihan Pemberdayaan UMKM Materi Permodalan dan Pembukuan.	01 Agustus 2024	-
E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Kementerian/Lembaga (*open access*)	*E-learning* ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman SDM di lingkungan Kementerian/Lembaga agar memahami perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	18 Oktober 2024	Diikuti 32 (peserta Kemenkeu) 31 (peserta KLID)

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Sosialisasi Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BPPK Tahun 2024 dengan tema "*Gender Action Budget* untuk BPPK yang Inklusif"	Pelaksanaan sosialisasi implementasi PUG di lingkungan BPPK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan BPPK khususnya Tim/Pokja terkait Implementasi PUG.	12 Juli 2024	-
Women Talent Development Program di Pusdiklat KM	Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial melaksanakan Seminar *Women to Women Career Mentorship* secara luring bertempat di Kompleks BPPK. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Ibu Sumiyati, Ibu Dwi Astuti, dan Bapak Dody Gusdiyandi. Tindak lanjut seminar ini adalah Program yang dilaksanakan yaitu *Women to Women Career Mentorship*, yang dilaksanakan melalui bimbingan pegawai perempuan yang merupakan *Cocolate talent* terkait keseimbangan antara karir dan keluarga melalui platform (*Coaching and Counseling Platform for Employee*)	10 September 2024	Seminar diikuti oleh lebih kurang 150 pegawai perempuan di Kementerian Keuangan yang merupakan *talent*.

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Bakti Sosial dalam rangka Hari Ibu di BDK Makassar	Sebagai bagian dari DKM Masjid Baitul Maal Kantor BPPK khususnya bidang kewanitaan, MUFAKAT berkolaborasi dengan DWP BPPK dan APWI Kemenkeu menyelenggarakan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ibu. Balai Diklat Keuangan Makassar berpartisipasi dalam bakti sosial tersebut dengan memberikan Sembako kepada dua PPNPN wanita BDK Makassar. Kegiatan ini menjadi sarana bagi Muslimah BPPK untuk mengasah rasa berkasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada para wanita.	11 Januari 2024	2 PPNPN Wanita BDK Makassar
Tes kesehatan berupa tes gula darah, *pap smear*, dan kesehatan mata untuk seluruh pegawai, PPNPN, beserta keluarga di BDK Yogyakarta	Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kesehatan pegawai dan anggota keluarga pegawai, BDK Yogyakarta menyelenggarakan tes kesehatan berupa tes gula darah, *pap smear*, dan kesehatan mata untuk seluruh pegawai, PPNPN, beserta anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk pengecekan lebih dini akan kesehatan anggota keluarga pegawai sehingga kondisi kesehatan yang buruk dapat dihindari.	12 Juli 2024	Peserta terdiri dari 9 orang peserta perempuan dan 29 orang peserta laki-laki

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Pelatihan Jarak Jauh Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	PJJ ini merupakan program pembelajaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang bertujuan agar tersedia SDM di lingkungan Kementerian Keuangan yang dapat menerapkan pengarusutamaan gender sesuai ketentuan yang berlaku.	12 s.d. 15 Agustus 2024	Diikuti oleh 28 pegawai Kemenkeu dengan rincian peserta laki-laki sejumlah 20 orang dan peserta peremuan sejumlah 8 orang.
Seminar Digital KCOC "UMKM Siap Ekspor" di BDK Malang	BDK Malang berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Jawa Timur dan juga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menyelenggarakan Seminar Digital KCOC UMKM Siap EKSPOR.	12 September 2024	total peserta 118 orang dengan rincian 45 laki-laki dan 73 perempuan
Training on Gender Issues and New Tools of Gender Responsive Planning And Budgeting (GRB) *In* Indonesia	Pelatihan *Gender Responsive Planning and Budgeting in* Indonesia berkolaborasi dengan *World Bank* di Indonesia dengan peserta lintas unit eselon I di Kementerian Keuangan.	13 -14 November 2024	Training diikuti oleh 50 orang peserta.
Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Mendeteksi Risiko Infeksi Human Papiloma Virus (HPV) di Sekretariat BPPK	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penerapan program pengarusutamaan gender yang sekaligus mendukung program/kegiatan penguatan budaya dan pembinaan mental khususnya program kesehatan dan kebugaran pegawai di lingkungan BPPK.	13 Juni 2024	Diikuti oleh 38 peserta perempuan

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Penyediaan sarana prasarana yang responsif gender dalam *Pre-Departure Program Ministerial Scholarship* 4	Penyediaan sarana prasarana yang mendukung PUG oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial seperti : 1. Kulkas untuk menyimpan ASI bagi ibu menyusui 2. Bagi ibu yang memiliki balita (max 5 tahun) atau ayah yang mempunyai bayi dibawah usia 1 tahun diijinkan untuk tidak menginap di asrama.	15 Juli - 25 Oktober 2024	2 pria, 2 wanita
Pemeriksaan Kesehatan "Bergegas Pap Smear, Deteksi Dini Kanker Serviks" di Pusdiklat Pajak	a. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan *pap smear* adalah mendeteksi keberadaan kanker serviks sejak dini. b. Target peserta: Pegawai perempuan dan istri pegawai (ASN & PPNPN) di Pusdiklat Pajak.	16 Desember 2024	-
Penunjukkan Duta Pengarusutamaan Gender di PKN STAN	ND-435/PKN/2024 Perihal Penyampaian Usulan Nama Duta PUG dan Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Implementasi PUG lingkup Eselon I BPPK Tahun 2024.	17 Mei 2024	Duta PUG yang ditunjuk terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki
Pelatihan Jarak Jauh Strategi Peningkatan Lelang pada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (KUMKM) di BDK Malang	Peserta diharapkan mampu meningkatkan hasil lelang melalui penggunaan *Branding Image Strategy* dan *Digital Marketing* Lelang.	18 s.d. 22 Maret 2024	Total peserta 31 orang dengan rincian 17 laki-laki dan 14 perempuan

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
KCOC "Membangun Lingkungan Kerja Apresiatif dan Responsif *Gender*" di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	Sebagai salah satu upaya untuk membangun kesadaran dan komitmen membangun budaya kerja yang apresiatif, responsif gender dan inklusif di lingkungan Kementerian Keuangan, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan Kemenkeu *Corpu Open Class* (KCOC) dengan mengangkat tema "Membangun Lingkungan Kerja yang Apresiatif dan Responsif *Gender*".	20 Mei 2024	Diikuti 421 Peserta Kementerian Keuangan dan 250 Peserta KLID lainnya
Lokakrya Pengelolaan Keuangan bagi UMKM di Pusdiklat AP	Dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan lokakarya dengan harapan para peserta yang merupakan pelaku UMKM dapat mengelola keuangan dengan lebih baik da berkualitas.	21 Agustus 2024	-
Seminar Digital KCOC "UMKM Siap Jadi Rekanan Pemerintah Melalui *Marketplace*" di BDK Malang	Merupakan serangkaian kegiatan seminar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi UMKM tentang bagaimana UMKM dapat memasarkan produknya secara digital melalui *platform marketplace* pemerintah seperti Bela Pengadaan dan Digipay.	23 Oktober 2024	total peserta 106 orang dengan rincian 34 laki-laki dan 72 perempuan.

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Talkshow "Membangun Komunikasi dengan Pasangan, Merajut Cinta dalam Keluarga" di Pusdiklat Pajak	a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merespon isu perselingkuhan hingga perceraian di lingkungan kerja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena dapat berdampak pada penurunan kinerja pegawai hingga menyebabkan citra organisasi yang dipandang negatif. b. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam membangun komunikasi dan *bonding* pada pasangan sehingga mampu meningkatkan fokus pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai di lingkungan Pusdiklat Pajak c. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Pusdiklat Pajak.	21 Juni 2024	-
KCOC “Pusing dengan Sampah? Ubah Jadi Mutiara Hitam, dengan Teknik EMPUK, Semua Bisa…!!!” di BDK Yogyakarta	Aktivitas ekonomi mendorong dampak pada lingkungan dimana salah satunya adalah timbunan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di antara semua jenis sampah, sampah rumah tangga termasuk ke dalam jenis sampah yang belum terkelola dengan baik, padahal dari skala terkecil itulah sebenarnya masih dalam pengelolaan kita. KCOC ini dilaksanakan untuk memberi edukasi kepada para pegawai Kemenkeu DIY, pegawai Kecamatan Kalasan, aparat Desa Purwomartani, perwakilan UMKM, kantor	22 Mei 2024	Peserta terdiri dari 25 orang peserta perempuan dan 30 orang peserta laki-laki

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
	pemerintahan/BUMN, dan komunitas kelompok tani di sekitar BDK Yogyakarta, mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk.		
Sosialisasi PUG, Kesetaraan Gender di Tempat Kerja: Akses yang Setara untuk Semua di Pusdiklat Bea dan Cukai	Sosialisasi PUG, Kesetaraan Gender di Tempat Kerja: Akses yang Setara untuk Semua" secara *hybrid* dengan narasumber Ibu Fithriyah, dari Universitas Airlangga dan Pejabat Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian KeuanganKegiatan ini dihadiri oleh pegawai Pusdiklat Bea dan Cukai, perwakilan pegawai BPPK, Dharma Wanita Persatuan Pusdiklat Bea dan Cukai serta Dharma Wanita Persatuan BPPK	22 Mei 2024	-
Seminar UMKM : Fotografi Produk dan Pengelolaan Konten Produk di Media Sosial di BDK Cimahi	Dalam rangka membekali pelaku UMKM terkait pemahaman teknik foto produk dan pengelolaan konten produk di media sosial sehingga UMKM dapat berdaya saing dan berkembang secara berkelanjutan dalam aspek kuantitas, kualitas dan daya saing produk, maka dianggap perlu diadakan Seminar UMKM : Fotografi Produk dan Pengelolaan Konten Produk di Media Sosial Tahun Anggaran 2024	23 Oktober 2024	Peserta Seminar UMKM berasal dari UMKM Jabar yang terdiri dari 4 pria dan 24 wanita

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
BIMTEK Kelas Asistensi Bersama Kemenkeu SATU untuk UMKM Berorientasi Ekspor atas Kolaborasi Kemenkeu SATU Perwakilan Provinsi Sulsel dan PT. BNI (Persero) Tbk. Kanwil 07	Kemenkeu SATU Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Kanwil 07 menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis "Kelas Asistensi Bersama Kemenkeu SATU untuk UMKM Berorientasi Ekspor" di Balai Diklat Keuangan Makassar. Kolaborasi ini, sebagai wujud komitmen bersama untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM agar dapat tumbuh baik melalui digitalisasi dan globalisasi "Go Global". Kegiatan ini, juga merupakan implementasi "program *Export Assistanc*e Bea Cukai Makassar" bersama Pokja UMKM Kemenkeu SATU Perwakilan Provinsi Sulsel.	26 Juni 2024	45 pelaku UMKM
Talkshow "Kesehatan Mental untuk Mewujudkan Karakter Pegawai yang Berkinerja Unggul" di Pusdiklat Pajak	a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menanamkan *awareness* pegawai akan pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja, yang pada hakikatnya akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pegawai pada unit tersebut. b. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Pusdiklat Pajak	27 Maret 2024	

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Seminar Digital KCOC, "Melangkah Bersama: Upaya Inklusi Ekonomi UMKM Penyandang Disabilitas Melalui Lelang Sukarela" di Pusdiklat KNPK	Pusdiklat KNPK melakukan penyebarluasan nilai-nilai PUG kepada pemangku kepentingan/stakeholders dan masyarakat melalui kegiatan Seminar dimaksud.	27 Maret 2024	diikuti 136 pegawai Kemenkeu dan 101 pegawai non Kemenkeu. (130 laki-laki dan 107 perempuan)
Pelaksanaan Tes *Pap Smear* di PKN STAN	Fasilitasi tempat pelaksanaan tes Pap Smear dari Prodia dan BPJS Kesehatan bagi para pegawai, kerabat pegawai, yang terdaftar BPJS Kesehatan	30 Juli 2024	Diikuti oleh 33 orang perempuan
Kegiatan kolaborasi *Women Islamic Studies Hub* (WISH) Kemenkeu dan Tim PUG Sekretariat BPPK	Pelaksanaan kegiatan "*Talkshow Festival* Hijriah Muslimah Kemenkeu (FHMK)"	31 Juli 2024	
KCOC dengan tema "Kolaborasi Peningkatan Mindset Keuangan Bagi UMKM: Memahami sambil Meng-Aplikasi-kan Laporan Keuangan" di BDK Manado	Merupakan KCOC yang bertujuan untuk: 1. Membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dasar tentang pentingnya mindset keuangan yang sehat. 2. Membangun kesadaran tentang pentingnya membedakan keuangan pribadi dan usaha. 3. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan peserta dalam menyusun dan menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan. 4. Mendorong UMKM untuk mengadopsi praktik keuangan yang modern dan berbasis data.	30 Desember 2024	Peserta terdiri dari 28 orang peserta perempuan dan 6 orang peserta laki-laki

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi UE 1 dan SMV	*E-Learning* ini merupakan program pembelajaran digital yang ada di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Setelah mengikuti e-*learning* ini peserta diharapkan dapat menjabarkan perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *E-Learning* PPRG ini terlaksana dua angkatan sepanjang tahun 2024.	Angkatan 1 : 23 s.d. 27 September 2024 Angkatan 2 : 14 s.d. 18 Oktober 2024	Angkatan 1 diikuti oleh 229 orang pegawai Kemenkeu (Peserta Perempuan 111 orang dan Laki-laki 118 orang) Angkatan 2 diikuti oleh 445 orang (Peserta Perempuan 139 orang dan Laki-laki 306 orang)
KCOC "*Hospitality dan Upgrade Skill* bagi Tenaga Honorer" di BDK Yogyakarta	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPNPN di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan pelatihan ini melibatkan seluruh PPNPN dari semua satker Kemenkeu DIY dengan tusi sekretaris, pramubakti, pengemudi, satpam, dan cleaning service. Pelatihan ini melibatkan PPNPN baik laki-laki maupun perempuan, dan memberikan keterampilan baru kepada PPNPN agar lebih memahami bagaimana melaksanakan tugasnya dengan baik.	6 Februari 2024	Peserta terdiri dari 6 orang peserta perempuan dan 28 orang peserta laki-laki

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
KCOC dengan tema "Kolaborasi Peningkatan Mindset Keuangan Bagi UMKM: Memahami sambil Meng-Aplikasi-kan Laporan Keuangan"	BDK Manado menyelenggarakan KCOC peningkatan *mindset* keuangan UMKM pada 30 Desember 2024 bertempat di Yayasan Pendidikan Al-Munawwarah Manado bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA). narasumber dari para ahli seperti Ibu Rukmini D. As'ad, Bapak Pujo Hariyanto, dan Bapak Subarja. Merupakan KCOC yang bertujuan untuk: 1. Membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dasar tentang pentingnya mindset keuangan yang sehat. 2. Membangun kesadaran tentang pentingnya membedakan keuangan pribadi dan usaha. 3. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan peserta dalam menyusun dan menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan. 4. Mendorong UMKM untuk mengadopsi praktik keuangan yang modern dan berbasis data.	30 Desember 2024	Kegiatan dilaksanakanan secara klasikal yang peserta seluruhnya beserta dari UMKM. Jumlah peserta 34 yang terdiri dari Laki-Laki: 6 dan Wanita: 28
Materi Pengenalan Inklusi Gender & Sosial (GEDSI) dalam PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)	Penyampaian materi Pengenalan Inklusi Gender & Sosial (GEDSI) dalam PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sesuai dengan KAP pada periode pembelajaran MOOC.	31 Juli 2024	Peserta terdiri dari 7 orang peserta perempuan dan 26 orang peserta laki-laki

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Bimbingan Teknis Bahasa Isyarat Bagi Pegawai Kementerian Keuangan di Unit Layanan Kementerian Keuangan Provinsi Banten	PKN STAN mengundang pegawai perwakilan dari kantor unit layanan Kemenkeu wilayah Banten dan sekitarnya (Kanwil DJBC, Kanwil DJP, Kanwil DJPb, Kanwil DJKN, KPP, KPPN di wilayah Banten serta beberapa Pusdiklat di BPPK) untuk mengikuti kegiatan dimaksud agar dapat memahami dan mempraktikkan bahasa isyarat sederhana	Kamis, 30 Mei 2024	35 orang peserta yg terdiri dari 13 pegawai laki-laki dan 22 pegawai perempuan
PUG dalam *E-Learning Managing Change: Adaptive and Agile Mindset*	Penambahan Materi terkait Kebijakan responsif gender yang ada di Kementerian Keuangan, dalam bagian *E-learning Managing Change: Being Adaptive and Agile* oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	Mei s.d. September 2024	*E-Learning* diikuti oleh pegawai Kementerian Keuangan. Peserta laki-laki sebanyak 46.030 dan peserta perempuan sebanyak 22.471.
KCOC dengan tema keluarga (Keluargaku adalah *Support System* Terbaik)	Kegiatan ini merupakan sesi berbagi pengetahuan terkait dengan tema tersebut yang dilaksanakan secara daring menggunakan platform zoom dan Youtube, sifat acaranya terbuka untuk diikuti oleh ASN Kemenkeu, ASN non Kemenkeu, dan masyarakat umum.	Rabu,15 Mei 2024	Diikuti 378 peserta yang terdiri dari ASN Kemenkeu 157 orang, ASN non Kemenkeu 221 orang dan masyarakat umum 23 orang.

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Kegiatan Pembinaan Mental agar Hidup Lebih Seimbang (PEMENANG) dengan tema terkait Kesehatan Jiwa di BDK Pekanbaru	Kegiatan yang dilaksanakan oleh BDK Pekanbaru dengan materi yang terdiri dari pengertian kesehatan itu sendiri yaitu sehat merupakan keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Dilanjutkan dengan hubungan sehat dengan jiwa, jiwa yang sehat menurut World Health Organization (WHO). Bertindak sebagai narasumber adalah dr. Amelia Dernaz (Klinik Thamrin Pekanbaru).	10 September 2024	Diikuti oleh seluruh pegawai BDK Pekanbaru: 6 orang perempuan 8 orang laki laki serta PPNPN BDK Pekanbaru: 1 orang perempuan 7 orang laki laki
E-Learning Dasar-Dasar Pengelolaan UMKM di Pusdiklat Keuangan Umum	E-Learning ini merupakan program pembelajaran digital yang ada di Pusdiklat Keuangan Umum yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi Masyarakat Umum dan Pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro terkait dasar-dasar pengelolaan UMKM.	Sepanjang Tahun	Diikuti oleh 685 orang peserta yang terdiri dari 473 (69%) laki-laki dan 212 perempuan (31%)
Pelatihan khusus bagi pegawai Wanita di Pusdiklat Bea dan Cukai	Sebagai unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Pada tahun 2024 Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pegawai Wanita yaitu : 1) Penyelenggaraan Peltek Intelijen Taktis Khusus Wanita 2) PJJ Pengantar Pemeriksaan Barang Penumpang Wanita 3) Pelatihan Teknis	2024	-

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
	Pemeriksaan Barang Penumpang Wanita		
Seminar Digital KCOC: Giatkan Literasi Keuangan melalui *Read Aloud* di BDK Pekanbaru	Dalam rangka menyemarakkan HORI ke-78, BPPK melalui BDK Pekanbaru berkolaborasi dengan Dharmawanita Persatuan (DWP) Kemenkeu serta Komunitas Kemenkeu Read Aloud mengadakan Seminar Digital KCOC: Giatkan Literasi Keuangan melalui Read Aloud. Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan metode pembelajaran literasi keuangan yang kreatif dan menarik, yaitu melalui metode *Read Aloud*, di mana membaca nyaring dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan konsep-konsep keuangan dengan cara yang lebih mudah dipahami.	25 September 2024	Diikuti oleh pegawai Kemenkeu dan umum secara daring melalui zoom dan Youtube

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Rumah Nyaman	Dalam rangka memberikan pendampingan psikologis, meningkatkan kesehatan mental, serta memberikan dukungan bagi pegawai dalam menghadapi tantangan baru, Pusdiklat Bea Cukai membuat wadah untuk fasilitas *coaching* dan konseling yaitu Rumah Nyaman. Program Rumah Nyaman selama tahun 2024 sebagai berikut: 1) Pembinaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Nergri (PPNPN) dilakukan secara berkala dengan bekerjasama dengan Tim Manajemen Sumber Daya Manuasia, Tim Layanan Publik dan dan Tim Manajemen Perubahan, 2) Layanan Coaching kepada beberapa pegawai dan OGC 3) *Workshop Coaching* dan Konseling bagi pejabat struktural dan WI Pusdiklat Bea dan Cukai 4) Workshop Kesehatan Mental bagi pegawai DJBC 5) Coaching pejabat talent di DJBC Kanwil Riau	Sepanjang Tahun	-

Gambar 3.2 : Dokumentasi Pelaksanaan Program Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BPPK

5. Penghargaan BPPK Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024 BPPK menerima berbagai penghargaan baik dari Internal Kementerian keuangan maupun dari lembaga-lembaga lain. Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh BPPK.

1. *Top Digital Implementation* 2024 #Level Stars 5 pada Ajang *Top Digital Awards* 2024
   Untuk ketiga kalinya, BPPK meraih penghargaan *Top Digital Awards* berturut-turut dari 2022, 2023, dan 2024 dari Majalah *IT Works*. Penghargaan ini diberikan karena Tim IT BPPK telah mengimplementasikan pengembangan sistem berbasis project, *IT Masterplan* berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan *Enterprise Architecture*, bahkan pemanfaatan Generative AI (*Artificial Intelligence*) pada Modul Chatbot Aplikasi *Knowledge Management System* serta Modul Chatbot Tutor Mingo pada *E-Learning Managing Change: Be Adaptive and Agile*, KLC LMS.

Gambar 3. 3 : Dokumentasi Pemberian Penghargaan pada *Ajang Top Digital Awards* 2024

2. *Top Leader on Digital Implementation* 2024 pada Ajang *Top Digital Awards* 2024
   Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto juga meraih penghargaan sebagai *Top Leader on Digital Implementation* 2024 pada Ajang *Top Digital Awards* 2024 yang digelar oleh Majalah It Works.
3. *Golden Trophy IT Works Top Digital Awards* 2024
   BPPK juga meraih penghargaan pertama "*Golden Trophy*". Penghargaan ini diberikan karena atas pencapaian BPPK tiga kali berturut meraih trophy bintang lima dalam *Top Digital Implementation* dan *Top Leader on Digital Implementation*.

Gambar 3. 4 : Dokumentasi *Trophy Top Digital Awards* 2024

4. Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif

   PPID Tingkat I BPPK berhasil memperoleh predikat informatif. Perolehan ini diumumkan pada kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kemenkeu 2024 dengan tema Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 di Aula Mezzanine, Jakarta Pusat. Predikat informatif merupakan kategori tertinggi dalam kategori pemeringkatan keterbukaan informasi publik badan publik. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen BPPK untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

Gambar 3. 5 : Dokumentasi Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif

5. Inovasi Gamifikasi Pembelajaran

   BPPK berhasil menyabet gelar atas inovasinya dalam bidang teknologi pembelajaran. Inovasi Gamifikasi Pembelajaran yang dirancang oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Pusdiklat KM berhasil membawa nama BPPK Kemenkeu mendapatkan penghargaan dari Pusdatin Kemendikbudristek. Penghargaan tersebut diberikan pada acara PTP *Connect* yang merupakan salah satu ajang unjuk kreasi inovasi PTP dari seluruh Indonesia. Pada acara ini puluhan inovasi teknologi pembelajaran dari berbagai K/L dipamerkan untuk mendorong kreativitas dalam pengembangan teknologi pembelajaran.

Gambar 3. 6 : Dokumentasi Penghargaan PTP *Connect*

6. Pusdiklat Bea dan Cukai memperoleh Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

   Pada tanggal 11 Desember 2024, Pusdiklat Bea dan Cukai menerima penganugerahan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam acara "Satu Dekade Zona Integritas" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Dalam momen ini, Pusdiklat Bea dan Cukai mewakili BPPK menjadi salah satu unit yang turut memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan dalam meraih penghargaan Honorable Award atas capaian tertinggi ZI WBBM tingkat nasional dengan capaian 39 Unit.

Gambar 3. 7 : Dokumentasi Penerimaan Predikat WBBM

7. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial memperoleh Penghargaan Mitra Strategis KPK

   Pusdiklat KM mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra strategis KPK yang telah melaksanakan kerjasama program diklat dan sertifikasi sektor antikorupsi tahun 2024.

Gambar 3. 8 : Dokumentasi Penghargaan Mitra Strategis KPK

8. Penghargaan ACCA Indonesia Institution *Partner of The Year* 2024 (*ACCA Qualification*) kepada PKN STAN

   Politeknik Keuangan Negara STAN menerima penghargaan ACCA Indonesia *Institution Partner of The Year* 2024 (*ACCA Qualification*). Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas pencapaian PKN STAN sebagai mitra institusi pendidikan terbesar yang menyelenggarakan ACCA *Qualification Program* di Indonesia.

Gambar 3. 9 *:* Dokumentasi Penghargaan ACCA Indonesia

9. PKN STAN memperoleh penghargaan Terbaik I Banten SDGS Awards Kategori Perguruan Tinggi/Mahasiswa

   Sustainable Development Goals (SDGs) Desa *Center* Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN berhasil meraih penghargaan Terbaik I Banten *SDGs Awards* Kategori Perguruan Tinggi/Mahasiswa Tahun 2024. Apresiasi ini diserahkan dalam acara Forum Tahunan SDGs Banten 2024 dan Pameran Pangan Lokal di Gedung Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Pemberian penghargaan ini merupakan wujud terima kasih dari Pemerintah Provinsi Banten kepada pihak yang berkontribusi dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs di Provinsi Banten.

Gambar 3. 10 : Dokumentasi Penghargaan Terbaik I Banten SDGS Awards Kategori Perguruan Tinggi/Mahasiswa

10. Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori akreditasi A dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kategori Akreditasi A

    Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori akreditasi A dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kategori Akreditasi A. Akreditasi ini berlaku dengan masa 5 tahun.

Gambar 3. 11 : Dokumentasi Akreditasi dari LAN RI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 1050/K.1/PDP.09

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 473/K.1/PDP.09/2024 tentang Penetapan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kementerian Keuangan sebagai Program Pelatihan dengan Status Terakreditasi, menerangkan bahwa:

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program :
1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori **Akreditasi A** dan masa berlaku 5 (lima) tahun; dan
2. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kategori **Akreditasi A** dan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Jakarta, 18 September 2024
PELAKSANA TUGAS KEPALA,

MUHAMMAD TAUFIQ

11. PPID Tingkat II Kategori Informastif pada PKN STAN

    PKN STAN selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan berhasil mendapatkan Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian keuangan Tahun 2024

Gambar 3. 12 *:* Dokumentasi Penghargaan PPID Tingkat II PKN STAN Kategori Informatif

12. Penghargaan Top 3 *Best Paper* pada *Public Sector International Conference* (PSIC)

    Bapak Eri Hariyanto, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Keuangan Umum berhasil memperoleh "Top 3 Best Paper" dengan mengangkat paper tentang Upaya Peningkatan Inovasi Pembiayaan di Indonesia, terutama dengan mekanisme KPBU yang menggunakan skema syariah pada kegiatan *Public Sector International Conference* (PSIC) 2024 dengan tema "*Creative Local Finance to Achieve Sustainable Development Goals* 2030" yang diselenggarakan tanggal 11 s.d. 12 September 2024 di Nusa Tenggara Barat.

13. Pada puncak acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional (PITNAS) Widyaiswara dengan Tema "Penghargaan Karya Tulis Ilmiah Terbaik" pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Widyaiswara

    Peningkatan Peran Widyaiswara dalam *Corporate University* Menuju Smart ASN Untuk Indonesia Emas 2045" yang dilangsungkan tanggal 21 September 2024, Ibu Jamila Lestyowati, Widyaiswara Ahli Madya / Utama Pusdiklat Keuangan Umum, berhasil menyabet penghargaan Karya Tulis Ilmiah Terbaik dengan judul

"Membangun Budaya Knowledge Sharing pada Pegawai Dalam Kerangka *Learning Organization*"

14. Penghargaan Duta Transformasi Terbaik Kementerian Keuangan

    Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM.1/2025, BPPK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum berhasil menjadi salah satu dari sepuluh Duta Transformasi Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2024. Duta Transformasi merupakan perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi manajemen perubahan RBTK terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan, setidaknya pada unit kerja serta *stakeholder* tempat yang bersangkutan bertugas. Sebagai agen perubahan, Duta Transformasi juga diharapkan dapat menjadi panutan (role model) dalam manajemen perubahan dan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan

Gambar 3. 13 : Dokumentasi Penghargaan Duta Transformasi Terbaik Tahun 2024

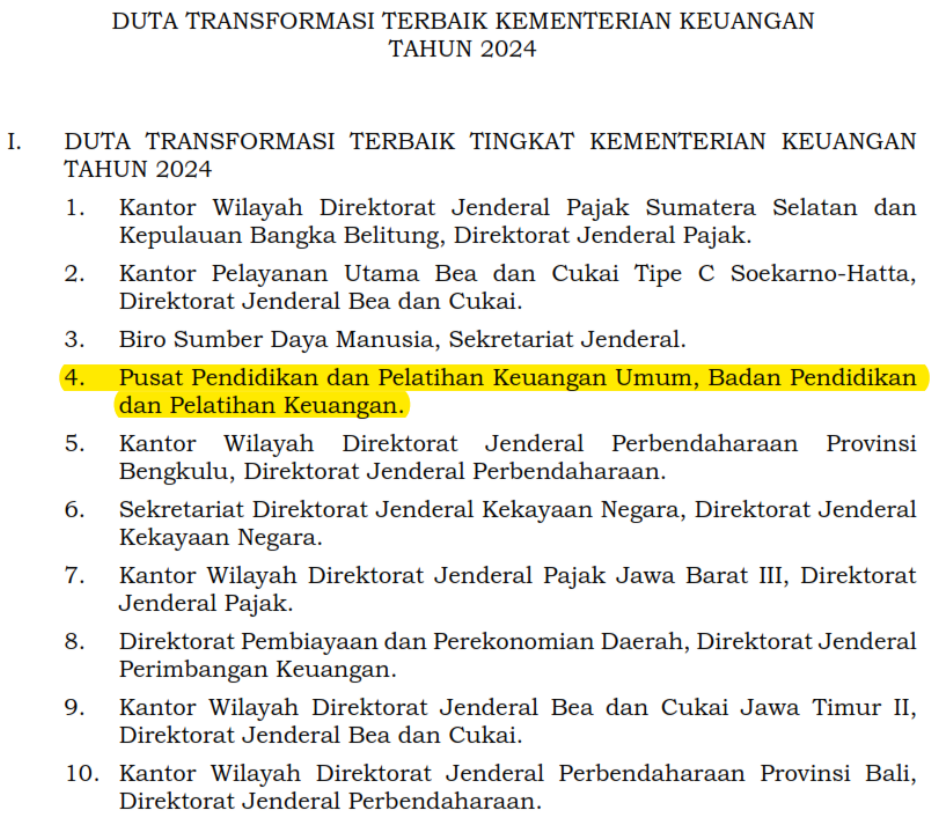

DUTA TRANSFORMASI TERBAIK KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

I. DUTA TRANSFORMASI TERBAIK TINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, Direktorat Jenderal Pajak.
8. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. *Benchmarking* Tahun 2024

Pada periode tahun 2024, BPPK menerima kunjungan dalam rangka *benchmarking* dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempelajari *good practices* yang diterapkan di BPPK. Berikut ini adalah daftar kunjungan *benchmarking* ke BPPK sepanjang tahun 2024.

Tabel 3. 47 : Daftar *Benchmarking* ke BPPK Tahun 2024

No.	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
1	Politeknik Statistika STIS	17 Januari 2024	*Benchmark* ke PKN STAN terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Tim *Contact Center* Hai DJPB)	25 Januari 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat KNPK terkait peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan pada operasionalisasi kanal layanan media sosial (*broadcasting* dan *live streaming*).
3	Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR	31 Januari 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat Bea dan Cukai untuk mempelajari penyusunan pedoman evaluasi pasca pembelajaran
4	Kementerian Kesehatan	6 Februari 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat KU terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan melalui pengembangan teknologi pembelajaran.
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM	7 Februari 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK terkait Penjaminan Mutu Pelatihan.
6	Balai Besar Pelatihan Kesehatan	12 Februari 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK terkait pengembangan digitalisasi pelatihan di Kemenkeu khususnya terkait *massive open online course* (MOOC), *microlearning*, dan Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

No.	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
7	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	12 Februari 2024	*Benchmark* ke PKN STAN terkait pembentukan prorgam studi baru dan pengembangan kurikulum.
8	Pusdiklatwas BPKP	27 Februari 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari *learning value chain* yang mengedepankan pengalaman belajar pemelajar serta mempelajari *Massive Open Online Courses* (MOOC) di Kemenkeu *Corporate University*.
9	Pusdiklatwas BPKP	29 Februari 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terkait pengelolaan pembelajaran.
10	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	5 Maret 2024	*Benchmark* ke PKN STAN dalam rangka *Knowledge Sharing* Penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Penyesuaian Hasil Evaluasi PTKL.
11	BPJS	7 Maret 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat KU untuk mempelajari ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*)
12	Mahkamah Konstitusi	13 Maret 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari Kemenkeu *Learning Center* (KLC) dan kebijakan pembelajaran.
13	Bank DKI	3 Mei 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari: 1. Dukungan *Top Management* dalam implementasi *Corporate University*; 2. Program Unggulan; 3. Keterlibatan *Learning Partner* dalam Kegiatan Pembelajaran;

No.	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
			4. Standardisasi Proses *Learning Value Chain*; 5. Desain Pembelajaran Berbasis Teori 10:20:70; 6. Evaluasi Pasca Pembelajaran.
14	BPSDM Kemendagri	22 Mei 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari *Corporate University.*
15	Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)	03 Juni 2024	*Benchmark* ke PKN STAN untuk mempelajari Persiapan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan
16	BPSDM Pemprov Kaltim	7 Juni 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari *Knowledge Management System* di BPPK
17	BKKBN	13 Juni 2024	*Benchmark* ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari Implementasi *Corporate University* di Kementerian Keuangan
18	Politeknik Penerbangan Surabaya	21 Juni 2024	*Benchmark* ke PKN STAN untuk mempelajari Pengasuhan Pembangunan Karakter Mahasiswa
19	Sekolah Vokasi IPB	24 Juni 2024	*Benchmark* ke PKN STAN untuk mempelajari Pengelolaan Tax Center
	Pusdiklatwas BPKP	15 Juli 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat AP untuk melakukan pendalaman pengelolaan jabatan fungsional Widyaiswara, pembahasan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pelatihan

No.	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
20	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kemenkes	17 Juli 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat KM untuk mempelajari Modul e-*learning* pelatihan manajerial dan sosial kultural
21	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, BPKP	19 Juli 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi JFA
22	Kementerian Luar Negeri	22 Juli 2024	Implementasi *Corporate University* di Kementerian Keuangan
23	Politeknik Pekerjaan Umum	01 Agustus 2024	*Benchmark* ke PKN STAN untuk mempelajari Tata Kelola Satuan Penjaminan Mutu
24	Politeknik STIA LAN Bandung	20 Agustus 2024	*Benchmark* ke PKN STAN untuk mempelajari Pengelolaan Tax Center
25	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	28 Agustus 2024	*Benchmark* ke PKN STAN untuk mempelajari Satuan Biaya, Standardisasi honorarium bagi tenaga pendidik, penyusun RPS, modul, dan bahan ajar
26	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian LHK	30 Agustus 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat KM untuk mempelajari Pembelajaran Jarak Jauh, khususnya *Massive Open Online Courses* (MOOC) di Kemenkeu *Corporate University*
27	Kemenkumham	11 September 2024	*Benchmark* ke BPPK untuk mempelajari Corpu, KLC
28	BPSDM Kementerian Hukum dan HAM	13 September 2024	*Benchmark* ke BPPK Pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Keuangan
29	PPSDM Kementerian Tenaga Kerja	24 September 2024	*Benchmark* ke BPPK untuk mempelajari: 1. *Blue print /* Design Pengembangan Kemenkeu Corpu;

No.	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
			2. Pengembangan *Knowledge Management System* pada Kemenkeu Corpu.
30	BPSDM Sumatera Barat	07 Oktober 2024	*Benchmark* ke BDK Medan untuk mempelajari Akreditasi Program Pembelajaran dibidang keuangan negara
31	Sekretariat DJBC	13 November 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat Bea dan Cukai untuk memahami lebih jauh proses evaluasi pasca pembelajaran bagi para pegawai Bagian Pengembangan
32	Lemdiklat POLRI	26 November 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat KM untuk mempelajari: 1. Overview KLDP, Analisis Kebutuhan Pembelajaran yangsesuai KLDP, Pembelajaran untuk mendukung KLDP; 2. Pengembangan Konten *E-Learning*
33	BPSDM Jawa Timur	28 November 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Implementasi Corporate University dan Pembelajaran Modern
34	BBPK Ciloto (Kementerian Kesehatan)	19 Desember 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
35	Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	20 Desember 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengelolaan Pelatihan Keuangan Negara dan Sertifikasi

No.	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
36	BPSDM Kemenkumham	20 Desember 2024	*Benchmark* ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengelolaan Pelatihan Keuangan Negara dan Sertifikasi

7. Inovasi dan Replikasi Sistem

- SIAP MUDIK (Sistem dan Aplikasi Pemantauan Mutu Diklat)

  SIAP MUDIK adalah Inovasi yang dikembangkan oleh Subbidang Penjaminan Mutu (PM) untuk mempermudah proses penjaminan mutu pembelajaran di Pusdiklat Bea dan Cukai. Awalnya, Subbidang PM mengembangkan inovasi KEN AROK pada tahun 2022 untuk keperluan yang sama. Namun pada perjalanannya, terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Pusdiklat Bea dan Cukai berupaya menyiapkan inovasi lain yang diharapkan dapat lebih mudah digunakan dengan memanfaatkan aplikasi Teams yang memang sudah disediakan sebagai perangkat dalam proses kerja pegawai sehari-hari, yang kemudian dinamakan dengan SIAP MUDIK

- Indeksasi Prosiding Kajian Akademis Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada *Google Scholar*

  Kajian Akademis adalah kegiatan penelitian atas suatu permasalahan tertentu yang dilakukan dengan metode ilmiah di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan output publikasi berupa prosiding yang memuat sinopsis Kajian Akademis yang telah dinyatakan layak publikasi. Publikasi ilmiah betujuan agar hasil penelitian dapat diketahui oleh publik sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, publikasi ilmiah adalah rekam jejak bagi peneliti yang dapat menunjukkan kepakaran mereka dalam bidangnya.

  Masuk ke dalam layanan indeksasi literatur ilmiah adalah sebuah poin penting bagi publikasi ilmiah agar dapat dicari oleh masyarakat, khususnya komunitas akademisi. *Impact* atau dampak dari publikasi maupun seorang peneliti dihitung dari seberapa banyak karya ilmiah dikutip pada publikasi lainnya. Oleh sebab itu, indeksasi diharapkan akan meningkatkan visibilitas dan

reputasi pengkaji dan organisasi, serta meningkatkan lingkup dampak yang dapat dihasilkan oleh karya ilmiah pada Kajian Akademis.

- Pemetaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Tim Kerja dengan Pendekatan *Exercise Based on Complexity Index* (ECI)

  Dalam rangka memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial pada saat implementasi penataan organisasi maka diperlukan formula untuk membentuk Tim Kerja dengan jumlah dan komposisi sumber daya manusia yang merata dan adil berdasarkan pertimbangan rentang kendali, hasil analisis jabatan, dan tingkat kerumitan pekerjaan.

  Proses pembentukan tim kerja dan pemetaan SDM Tim Kerja dilaksanakan dengan pendekatan Exercise Based on Complexity Index melalui beberapa langkah berikut.

  1. Penentuan kriteria dan *score* ;
  2. Identifikasi Sub RMP dan kriteria ;
  3. Pembagian *score* di kalender pembelajaran
  4. Rekapitulasi score;
  5. Alokasi kebutuhan SDM Berikut tahapan alokasi Kebutuhan SDM.

- Pembelajaran Terintegrasi untuk Mendorong UMKM Naik Kelas

  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melalui Nota Dinas ND-82/KBC.1008/2024 menyampaikan maksudnya untuk melakukan adopsi Model Pembelajatan Terintegrasi bagi UMKM binaan KPPBC Yogyakarta dalam kegiatan Program Penugasan Wanita Mandiri (PROSTARI). Model Pembelajatan Terintegrasi bagi UMKM merupakan inovasi BDK Yogyakarta yang pada tahun 2023 lalu memperolehPenghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan tahun 2023.

E. Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat VI selaku APIP telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP di BPPK. untuk menilai efektivitas implementasi SAKIP Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja BPPK yang tercantum dalam llaporan nomor LAP-15/IJ.7/2024 tanggal 15 Mei 2024, BPPK memperoleh nilai sebesar 89,70 dengan predikat “Memuaskan” dengan rincian sebagai berikut.

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30%	24,90
Pengukuran Kinerja	30%	30,00
Pelaporan Kinerja	15%	13,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100%**	**89,70**

Atas evaluasi Inspektorat Jenderal tersebut, BPPK melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang disampaikan. Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut.

1. Penyelarasan Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan Renstra BPPK

   Secara umum Renstra telah dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja untuk periode 5 (lima) tahun. Namun demikian, terdapat IKU yang belum dapat diukur karena sebelum Indikator dapat diimplementasikan perlu dipersiapkan mekanisme pengukuran dampak pasca pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan IKU tersebut dan perlu dilakukan penyusunan desain pembelajaran tahapan awal (*piloting*). Selain itu perlu penyediaan kajian atas analisis gap kompetensi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan *piloting* tersebut .

   Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal tersebut, BPPK telah melakukan rangkaian kegiatan *refinement* kinerja di lingkungan BPPK dengan memperhatikan indikator dan target yang terdapat pada Renja BPPK tahun 2025. Renja menjadi acuan karena Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan (belum ditetapkan).

2. Mengoordinasikan dan mereviu penyusunan dan penetapan PK UPK-*Two* secara berjenjang

   Sesuai dengan temuan Itjen terdapat 2 IKU pada Perjanjian Kinerja Eselon I yang masih Belum Selaras dengan unit eselon II dibawahnya. Adapun rekomendasi dari Inspektorat Jenderal pada evaluasi AKIP BPPK tahun 2023, BPPK mengoordinasikan dan mereviu penyusunan dan penetapan PK UPK-*Two* secara berjenjang.

Untuk meningkatkan kualitas kontrak kinerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, telah dilaksanakan kegiatan *refinement* kinerja dan risiko di lingkungan BPPK sejak November 2024 s.d. Januari 2025, dengan mengoordinasikan seluruh unit di lingkungan BPPK. Pada 31 Januari 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB 4

Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.

Bab IV
Penutup

Laporan Kinerja BPPK Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi BPPK menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPPK Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Untuk menjalankan perannya tersebut BPPK didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk menigkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan.

Sepanjang Tahun 2024 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp710.468.086.787,00 atau **97,49%** dari total pagu sebesar Rp728.761.335.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terkandung **67** rincian *output* (RO) dalam 10 kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp21.488.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp9.653.316,00 atau tercapai sebesar 44,92%
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp287.498.296.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp283.131.598.821,00 atau tercapai sebesar 98,48%.
3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp150.197.687.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp149.014.351.772,00 atau tercapai sebesar 99,21%.

4. Kegaiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.043.056.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp962.350.415,00 atau tercapai sebesar 92,26%
5. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp545.934.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp438.271.184,00 atau tercapai sebesar 80,28%.
6. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp242.111.587.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp230.341.411.210,00 atau tercapai sebesar 95,14%.
7. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp46.503.082.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp45.921.366.812,00 atau tercapai sebesar 98,75%.
8. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp190.558.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp128.437.045,00 atau tercapai sebesar 67,40%.
9. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp88.205.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp60.115.471,00 atau tercapai sebesar 68,15%.
10. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki pagu anggaran sebesar Rp561.442.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp460.530.742,00 atau tercapai sebesar 82,03%.

Laporan Kinerja ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK sepanjang Tahun 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 23 IKU yang dimiliki pada Tahun 2024, seluruh IKU telah memiliki realisasi dan dapat dihitung capaiannya. Berikut ini adalah realisasi dari IKU yang dimiliki oleh BPPK.

1. Tingkat implementasi *learning organization* (realisasi sebesar 108,52% dari target 100%).
2. Indeks integritas organisasi (realisasi sebesar 110,25 dari target 100).
3. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (realisasi sebesar 115,83% dari target 100%).
4. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi sebesar 104,72% dari target 90%).

5. Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi (realisasi sebesar 366,40 dari target 365).
6. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi sebesar 95,36% dari target 91%.
7. Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran (realisasi sebesar 116,27% dari target 85%).
8. Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi (realisasi sebesar 4,78 dari target 4,35).
9. Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN (realisasi sebesar 114,83 dari target 100).
10. Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan (realisasi sebesar 110,35% dari target 90%).
11. Tingkat kepuasan pengguna alumni (realisasi sebesar 4,5 dari target 4).
12. Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi (realisasi sebesar 117,6 dari target 100,00).
13. Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management* (realisasi sebesar 103,33 dari target 100,00).
14. Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran (realisasi sebesar 118,67% dari target 100%).
15. Tingkat kualitas pengelolaan SDM (realisasi sebesar 118,92% dari target 100%).
16. Nilai evaluasi organisasi (realisasi sebesar 104,48 dari target 100).
17. Tingkat kualitas pengelolaan TIK (realisasi 120% dari target 100%).
18. Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics (realisasi 100% dari target 94%).
19. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 (realisasi sebesar 117,16 dari target 100).
20. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan (realisasi sebesar 90,06 dari target 84,10).
21. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan (realisasi 120 dari target 100).
22. Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP (realisasi sebesar 110 dari target 100
23. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (realisasi sebesar 95,19 dari target 82)

Laporan kinerja ini tidak hanya tidak hanya memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Keuangan tetapi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPK untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Pada tahun-tahun berikutnya, BPPK akan menghadapi berbagai tantangan antara lain, penataan organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran. Penataan organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak pada layanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BPPK kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu sebagai respons terhadap penataan organisasi dan kebijakan efisiensi, BPPK perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan inovatif agar tetap dapat memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan juga relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Untuk memitigasi risiko yang dapat menghambat tercapaianya sasaran strategi terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh BPPK misalnya dengan melakukan optimalisasi sumber daya berupa *new ways of learning* dan *new ways of working*.

Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang telah diidentifikasi oleh BPPK dalam rangka pencapaian target organisasi.

1. Melaksanakan rencana strategis yang sebelumnya telah disusun namun dalam pelaksanaannya akan dirubah menjadi berbasis digital, misalnya dalam rangka internalisasi *Learning Organization* asistensi dilakukan secara daring, selain itu BPPK juga akan menyusun program e-*learning mandatory* terkait *Learning Organization.*
2. Melaksanakan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan SDM Manajemen Pendidikan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi digital (dilaksanakan secara daring);
3. Menyesuaikan kembali target dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat;
4. Mengoptimalkan penggunaan metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan E-Learning dalam rangka mendesain pembelajaran untuk pemenuhan AKP Strategis dan Jabatan;
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan evaluasi pasca pembelajaran;
6. Menyelenggarakan sertifikasi/uji kompetensi yng terintegrasi dengan pelatihan berbasis teknologi digital;
7. Melaksanakan pemantauan karyasiswa secara periodik dengan metode jarak jauh;
8. Melaksanakan penjaminan mutu secara daring dengan mengoptimalkan penggunaan *sharepoint* yang dimiliki;
9. Melaksanakan penguatan lini pertama dengan melakukan peningkatan kesadaran risiko pada seluruh level manajemen dengan *mandatory e-learning* manajemen risiko; dan
10. Melaksanakan Pembangunan KLC O*ffic*e sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan keandalan data pembelajaran.

Dengan melakukan hal tersebut diharapkan BPPK mampu menghadapi tantangan yang ada tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, BPPK diharapkan dapat mempertahankan relevansinya sebagai institusi yang berperan penting dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan negara.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5

Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.

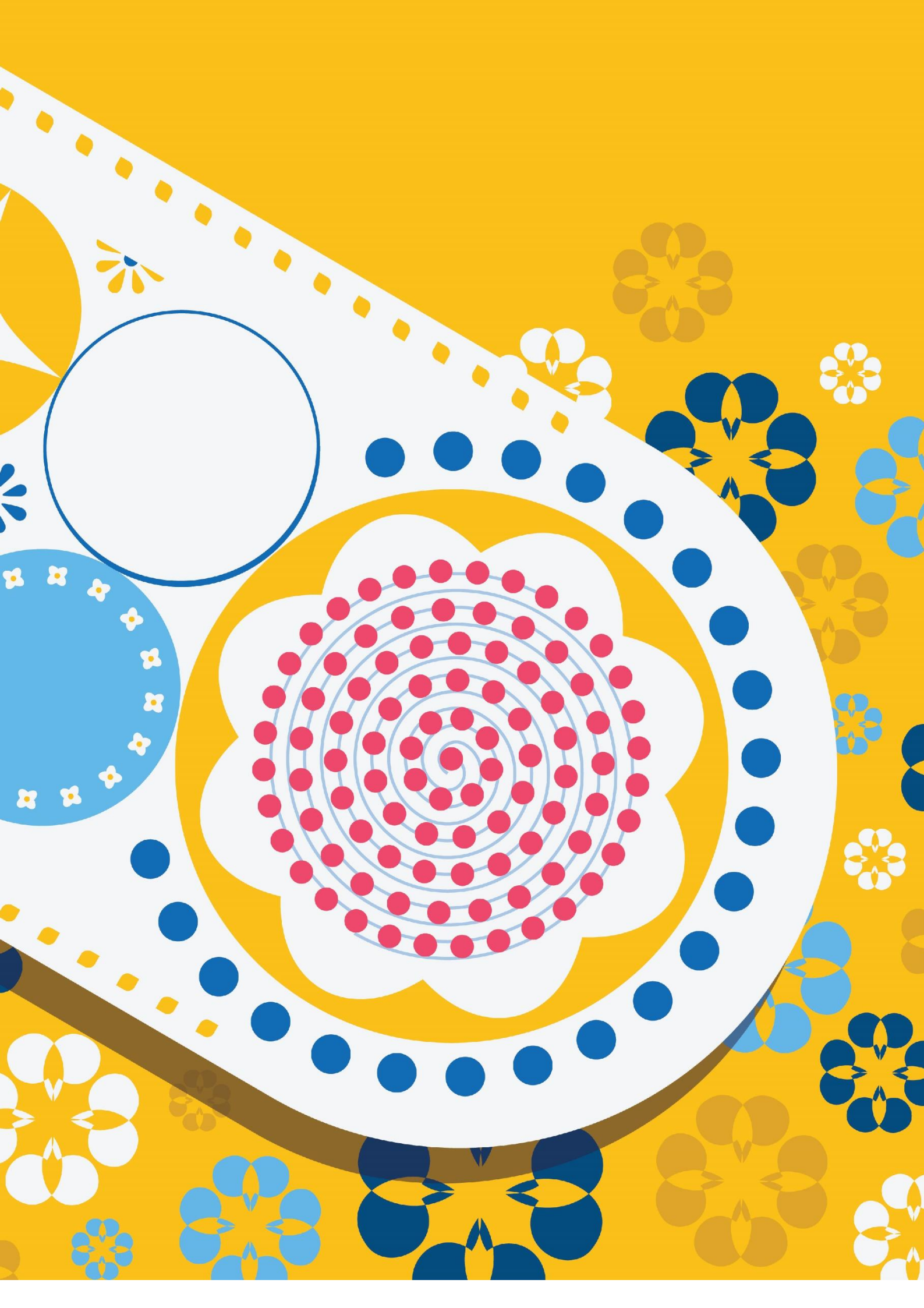

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/MK/2024
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

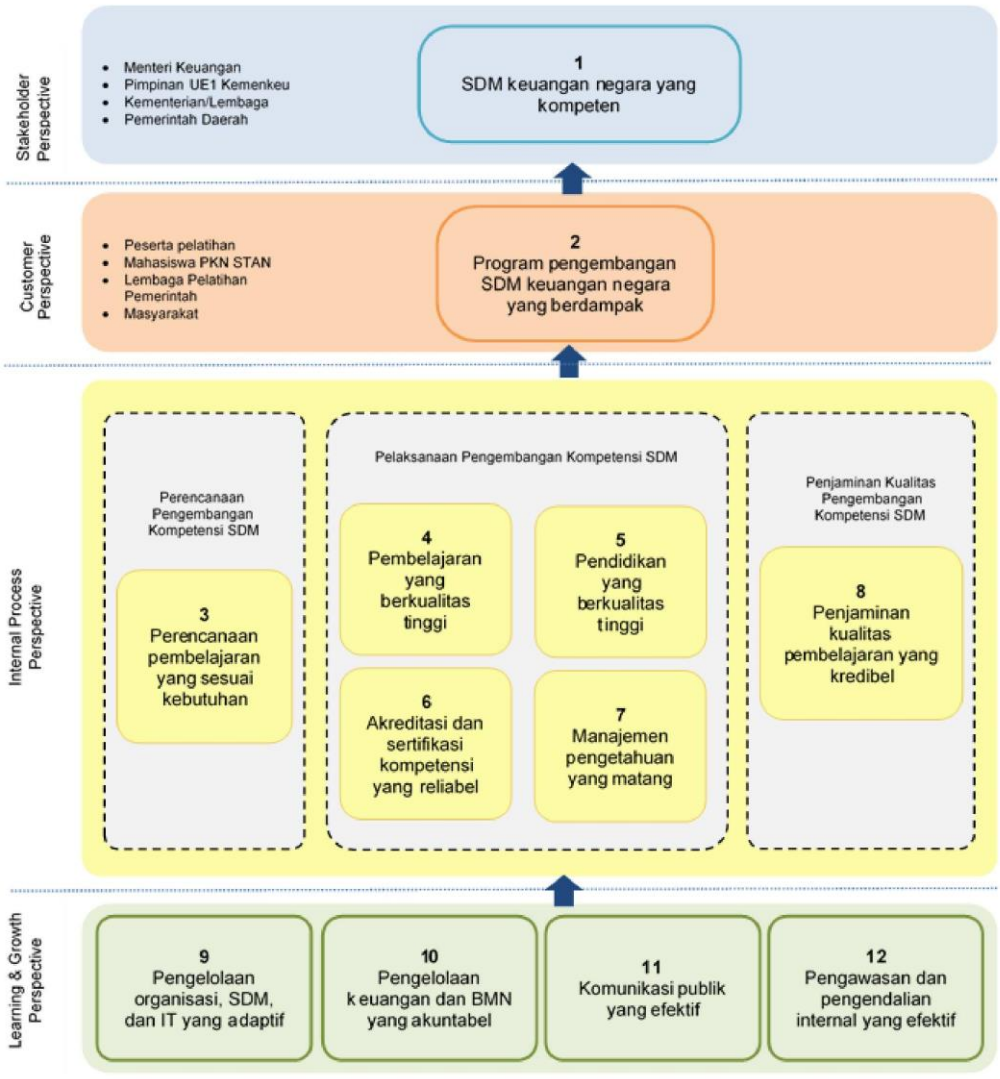

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	SDM keuangan negara yang kompeten	1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	90%
		1b-CP	Indeks integritas organisasi	100
		1c-N	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100%
		1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2.	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak	2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	365 (skala 400)
		2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%
3.	Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan	3a-N	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85%
4.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,35 (skala 5)
5.	Pendidikan yang berkualitas tinggi	5a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan tata kelola BLU PKN STAN	100
		5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%
		5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4 (skala 5)
6.	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel	6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	100
		6a1-N	Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara	3,75 (skala 5)
		6a2-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	90%
7.	Manajemen pengetahuan yang matang	7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	100
8.	Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel	8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100
9.	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		9c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
		9d-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*	94%
10.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
11.	Komunikasi publik yang efektif	11a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
12.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks maturitas Penyelenggaraan SPIP	100
		12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

Program/Kegiatan		**Anggaran**
Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**690.454.373.000,00**
1. Legislasi dan litigasi	Rp	45.048.000,00
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp	406.493.724.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	1.467.908.000,00
4. Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp	281.746.025.000,00
5. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp	202.418.000,00
6. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp	499.250.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024

Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	SDM keuangan negara yang kompeten							
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	-	-	-	-	-	90%	90%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
1c-N	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak							
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	-	-	-	-	-	365	365 (skala 400)
2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	91%	91%	91%	91%	91%	91%
3.	Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan							
3a-N	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
4.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi							
4a-N	Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35 (skala 5)
5.	Pendidikan yang berkualitas tinggi							
5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	-	-	-	-	-	100	100
5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	90%	90%
5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	-	-	-	-	-	4	4 (skala 5)
6.	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel							
6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	-	100	100	100	100	100	100

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a1-N	Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara	-	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75 (skala 5)
6a2-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7.	Manajemen pengetahuan yang matang							
7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	-	-	-	-	-	100	100
8.	Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel							
8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
9.	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif							
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
9c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9d-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
10.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
11.	Komunikasi publik yang efektif							
11a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
12.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
12a-CP	Indeks maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100
12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	*Output*			
1	SDM keuangan negara yang kompeten	Perluasan dan pengembangan program edukasi bagi para pengelola dan/atau calon pengelola keuangan negara yang inklusif dan berdampak	1. Perluasan edukasi keuangan negara melalui *Executive Training* bagi Pimpinan KLPD	1. Pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran yang akan dipenuhi melalui *Executive Training* bidang Keuangan Negara Pimpinan KLPD	Laporan pelaksanaan AKP program *Executive Training* bidang keuangan negara bagi Pimpinan KLPD	2024	BPPK	
				2. Penyusunan Desain Pembelajaran *Executive Training* tematis bagi Pimpinan KLPD	Desain Pembelajaran (Kurikulum) Program *Executive Training* Tematis bagi Pimpinan KLPD			
				3. Penyelenggaraan *Executive Training* Tematis bagi Pimpinan KLPD	Terselenggaranya *Executive Training* Tematis bagi Pimpinan KLPD			
				4. Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi Tindak Lanjut Penyempurnaan Program *Executive Training* bagi Pimpinan KLPD	Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Penyempurnaan Program *Executive Training* bagi Pimpinan KLPD			
			2. Perluasan edukasi keuangan negara bagi mahasiswa melalui Kemenkeu *Corpu Goes to Campus* (KC-GTC)	1. Penyusunan dan Perluasan Perjanjian Kerja Sama pembelajaran di bidang keuangan negara dengan Perguruan Tinggi	Perjanjian Kerja Sama pembelajaran di bidang keuangan negara dengan Perguruan Tinggi			
				2. Pengembangan konten pembelajaran pada KLC bagi mahasiswa PT dan integrasi dengan RPS sesuai kebutuhan masing-masing PT.	Konten Pembelajaran pada KLC yang terintegrasi dengan RPS (sesuai kebutuhan)			
				3. Pelaksanaan perkuliahan dengan pemanfaatan konten pembelajaran yang telah tersedia di KLC ditunjang dengan bentuk pembelajaran lain yang relevan (integrasi dengan pelatihan/PJJ/*blended learning*)	Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa baik melalui pelatihan, PJJ, dan/atau *e-learning* pada KLC.			
				4. Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi Tindak Lanjut Penyempurnaan Program KC-GTC	Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Penyempurnaan Program KC-GTC			

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
NOMOR: 11/MK/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

«TanggalPenandatanganan»

DAFTAR RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
1	SDM keuangan negara yang kompeten	1.1	Tingkat pemahaman pegawai Kemenkeu terhadap *learning organization* belum memadai	11	11
		1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	17	11
		1.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	17	11
		1.4	Pengguna layanan tidak memperoleh layanan sesuai dengan standar pelayanan	10	10
		1.5	Pembelajaran yang diselenggarakan belum mendorong pencapaian kinerja organisasi	11	11
2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak	2.1	Persentase alumni yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri	12	8
		2.2	Alumni pelatihan tidak dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran	11	11
3	Perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan	3.1	Pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh *stakeholder*	13	11
4	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	4.1	Layanan pembelajaran dan pengajar tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran	8	8
5	Pendidikan yang berkualitas tinggi	5.1	Tidak tersusunnya standar pengelolaan keluhan pelanggan di PKN STAN	17	11
		5.2	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	17	11
6	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel	6.1	Layanan akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan sertifikasi tidak dinilai baik	11	11
7	Manajemen pengetahuan yang matang	7.1	Proses manajemen pengetahuan di Kemenkeu tidak berjalan secara efektif	14	11

«TanggalPenandatanganan»

8	Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel	8.1	Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar penjaminan mutu	11	11
9	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif	9.1	Perbedaan kontribusi pejabat/pegawai yang diusulkan dalam mutasi antar unit eselon I	9	9
		9.2	Kegagalan sistem TIK	11	11
		9.3	Pemanfaatan aplikasi/data *analytic* dalam pencapaian kinerja organisasi	9	12
		9.4	Penyelesaian IS RBTK tidak sesuai dengan rencana	17	11
10	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	10.1	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	6	6
		10.2	Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target	14	13
		10.3	Rendahnya pemanfaatan sistem aplikasi peminjaman/ pengelolaan dan pengadaan BMN di lingkup BPPK.	6	6
11	Komunikasi publik yang efektif	11.1	Persepsi negatif atas pemberitaan di media massa atau media sosial tentang layanan BPPK	12	8
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	12.1	Jumlah dan/atau kompetensi SDM UKI tidak memadai	11	11

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik

Andin Hadiyanto

«TanggalPenandatanganan»

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-11A/MK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-11/MK/2024 tanggal 30 Januari 2024 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan *Trajectory* Target IKU dan Sub-IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
Stakeholder perspective						*Stakeholder perspective*					
1	SDM keuangan negara yang kompeten					1	SDM keuangan negara yang kompeten				
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	-	-	-	90%	1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	9%	17%	25%	100%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	100	1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	90%	90%	90%	1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	90%	90%	90%
Customer Perspective						*Customer Perspective*					
2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak					2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak				

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	-	-	-	365	2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	310	320	330	365
2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	91%	91%	91%	2b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%	91%	91%	91%
Internal Process Perspective						*Internal Process Perspective*					
5	Pendidikan yang berkualitas tinggi					5	Pendidikan yang berkualitas tinggi				
5a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan tata kelola BLU PKN STAN	-	-	-	100	5a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan tata kelola BLU PKN STAN	100	100	100	100
5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	90%	5b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	20%	40%	60%	90%
5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	-	-	-	4	5c-N	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4	4	4	4
6	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel					6	Akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang reliabel				
6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	-	100	100	100	6a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	100	100	100	100
6a1-N	*Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara*	-	*3,75*	*3,75*	*3,75*	*6a1-N*	*Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara*	*3,75*	*3,75*	*3,75*	*3,75*
6a2-N	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	-	*90%*	*90%*	*90%*	*6a2-N*	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
7	Manajemen pengetahuan yang matang					7	Manajemen pengetahuan yang matang				
7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	-	-	-	100	7a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur *knowledge management*	100	100	100	100
Learning and Growth Perspective						*Learning and Growth Perspective*					
9	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif					9	Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif				
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	100	9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100
10	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel					10	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel				
10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	84,1	10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	42,5	60	70	84,1
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif					12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif				
12a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	100	12a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	100	100	100
12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	82	12b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	15	20	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
1.	Tingkat implementasi learning organization	-	-	-	90%	1	Tingkat implementasi learning organization	9%	17%	25%	100%
2.	Indeks integritas organisasi	-	-	-	100	2.	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100
3.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	70%	100%	3.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	70%	100%
4.	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	90%	90%	90%	4.	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	90%	90%	90%
5.	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	-	-	-	365	5.	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	310	320	330	365
6.	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	91%	91%	91%	6.	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%	91%	91%	91%
7.	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85%	85%	85%	85%	7.	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85%	85%	85%	85%
8.	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,35	4,35	4,35	4,35	8.	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	4,35	4,35	4,35	4,35
9.	Tingkat kualitas pengelolaan tata kelola BLU PKN STAN	-	-	-	100	9.	Tingkat kualitas pengelolaan tata kelola BLU PKN STAN	100	100	100	100

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
10.	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	90%	10.	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	20%	40%	60%	90%
11.	Tingkat kepuasan pengguna alumni	-	-	-	4	11.	Tingkat kepuasan pengguna alumni	4	4	4	4
12.	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	-	100	100	100	12.	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	100	100	100	100
13.	Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara	-	3,75	3,75	3,75	13.	Indeks kualitas pengelolaan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara	3,75	3,75	3,75	3,75
14.	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	-	90%	90%	90%	14.	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	90%	90%	90%	90%
15.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur knowledge management	-	-	-	100	15.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur knowledge management	100	100	100	100
16.	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	3%	7%	11%	100%	16.	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	3%	7%	11%	100%
17.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	17.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%
18.	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	100	18.	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100
19.	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	19.	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%
20.	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics	23%	46%	69%	94%	20.	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics	23%	46%	69%	94%
21.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	21.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100
22.	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	84,10	22.	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	42,5	60	70	84,1
23.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	23.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
24.	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	100	24.	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	100	100	100
25.	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	82	25.	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	15	20	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat Yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto
196506091990121001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG
MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024
NOMOR: 11-A1/MK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum KESATU terhadap Piagam Manajemen Risiko nomor 11/MK/2024 dan dokumen pendukung manajemen risiko tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
9	**Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif**			**9**	**Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif**		
-	-	-	-	9.5	Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	8	8

«TanggalPenandatanganan»

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
10	**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel**			**10**	**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel**		
-	-	-	-	10.4	Penyelesaian *Transit Office* dan Hunian Sementara Kemenkeu tidak sesuai dengan jadwal	13	10

Jakarta, 27 Mei 2024
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

«TanggalPenandatanganan»

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/MK/2025
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

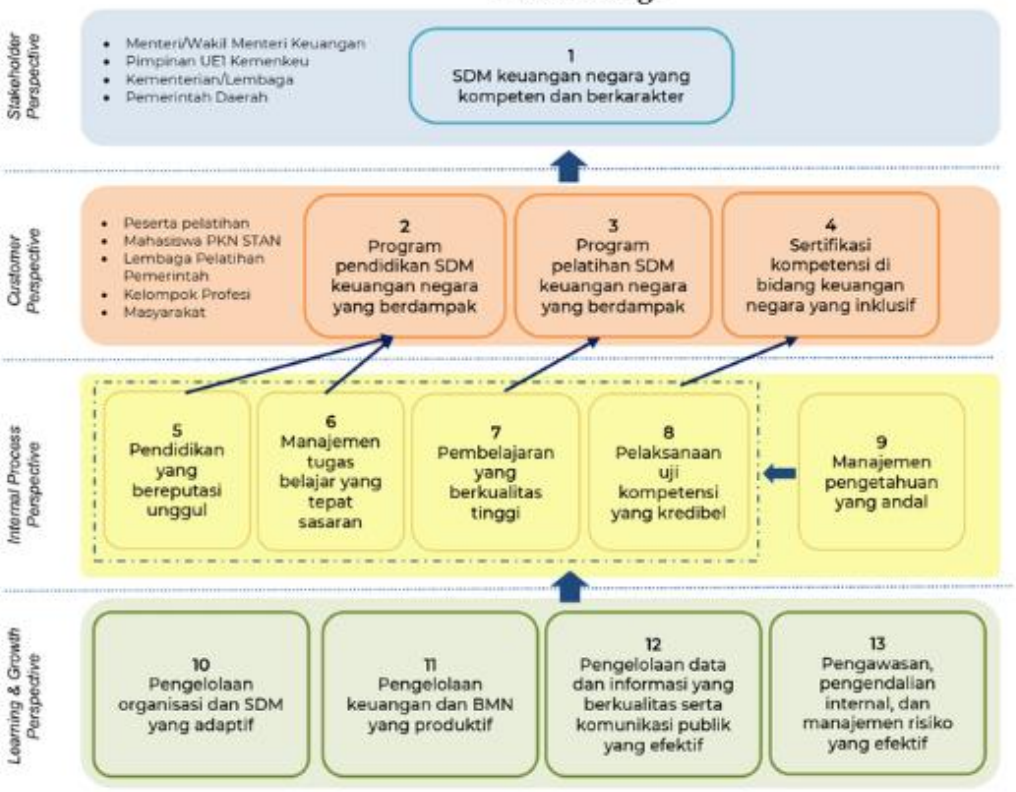

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	100%
		1b-CP	Indeks integritas organisasi	100
		1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak	2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366 (skala 400)
		2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak	3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%
		3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif	4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100
5	Pendidikan yang bereputasi unggul	5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100%
		5b-N	Indeks kualitas penelitian	300
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4.2 (skala 5)
9	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
12	Pengelolaan data dan	12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan	80%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif		interoperabilitas antar sistem	
		12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13a-CP	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5%

Program/Kegiatan 2025		**Anggaran**
Program:		
Dukungan Manajemen		Rp551,996,735,000
Kegiatan		
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp21,488,000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp192,582,153,000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1,910,098,000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp342,228,782,000
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp228,280,000
6.	Pelaksanaan tugas khusus (special mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Peneltiian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	Rp15,025,934,000

Jakarta, 29 Januari 2025

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter**							
1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	**Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak**							
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	310	320	320	330	330	366	366 (skala 400)
2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	6	19	19	40	40	100	100
3	**Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak**							
3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif**							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100	100	100	100	100	100	100
5	**Pendidikan yang bereputasi unggul**							
5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-N	Indeks kualitas penelitian	6	26	26	76	76	300	300
6	**Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran**							
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
7	**Pembelajaran yang berkualitas tinggi**							
7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	**Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel**							
8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2 (skala 5)
9	**Manajemen pengetahuan yang andal**							
9a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif**							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
10c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
11	**Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif**							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
12	**Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif**							
12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
13	**Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif**							
13a-CP	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73%	76%	76%	79%	79%	92.5%	92.5%

Jakarta, 29 Januari 2025

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

Andin Hadiyanto

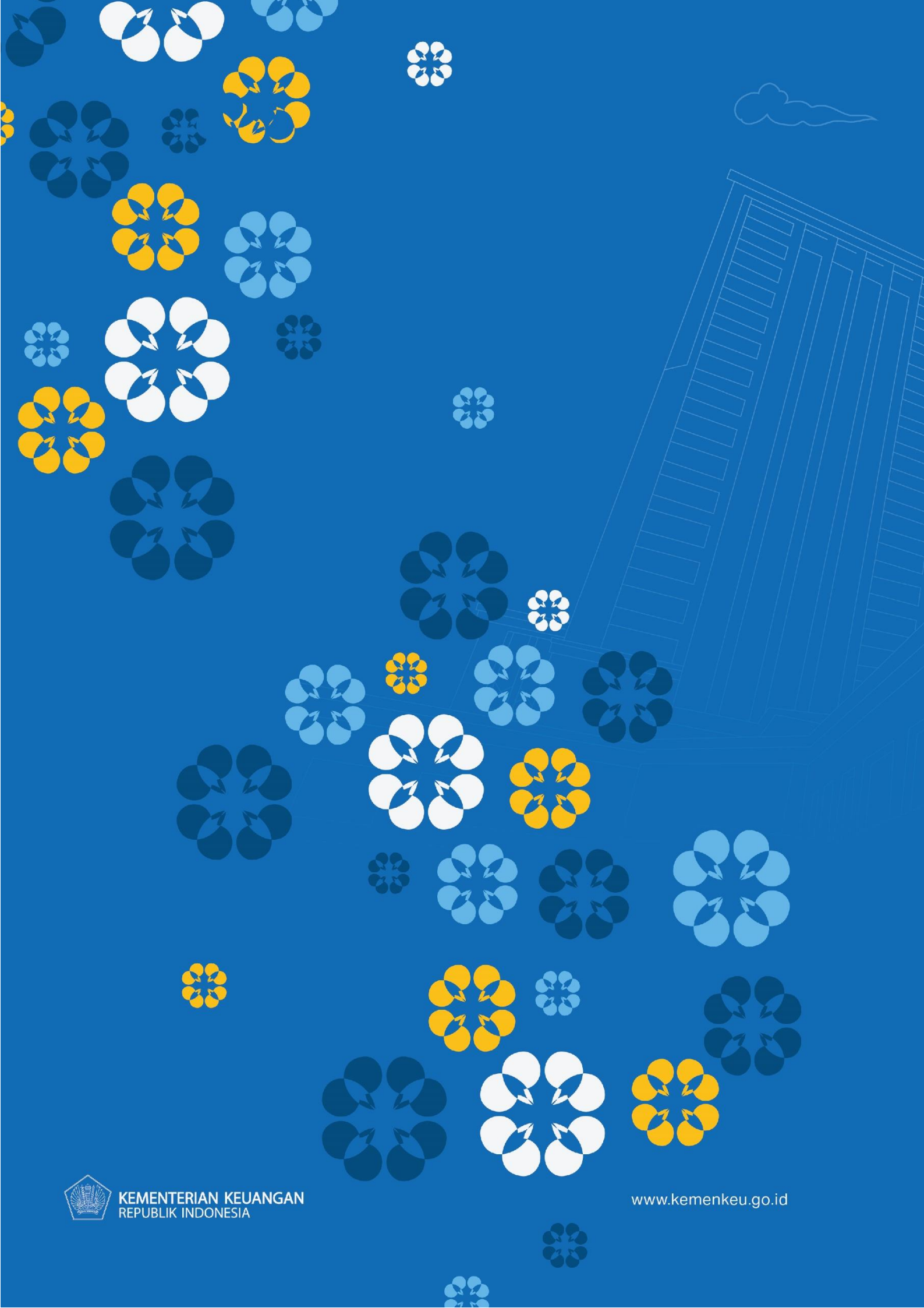

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id